

Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Editor :
Aryana Abubakar
Musni Hardi K. Atmaja



TRANSFORMASI EKONOMI JAKARTA
UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



TRANSFORMASI EKONOMI JAKARTA UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKELANJUTAN

Bank Indonesia

Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Editor

Arlyana Abubakar
Musni Hardi K. Atmaja

Kontributor

Muhamad Shiroth
Reska Prasetya
Dewa Ayu Komang Bintari Dewi DP
Binar Tyas Aini
Reza Kianendra
Elisabeth R.S.Y Silitonga
Yulianita Rahayu
Marissa Novita
Aninditha Kemala Dinianyadharani
Dhia Atika Anggraini
Alhamdi Alfi Fajri
Chendy Dea Andriany

Copyright 2025, Bank Indonesia
Cetakan I, Maret 2025

Penerbit

Bank Indonesia

Dikeluarkan oleh :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 Jakarta, 10410 Indonesia

Mengukir Sinergi untuk Jakarta yang Berdaya Saing dan Inklusif

Ariyana Abubakar

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk yang besar yaitu sebanyak 10,68 juta jiwa, Jakarta menyumbang sekitar 17% terhadap perekonomian nasional dan sekitar 6% dari total PDB (Produk Domestik Bruto) ASEAN pada tahun 2023. Interkoneksi ekonomi Jakarta dengan wilayah aglomerasi di sekitarnya juga sangat tinggi sehingga Jakarta mendapatkan tambahan penduduk “siang” yang jumlahnya mencapai sekitar 3,3 juta, berasal dari wilayah sekitarnya yang beraktivitas di Jakarta. Hal inilah yang juga menjadikan peran Jakarta sangat penting sebagai hub transportasi dan distribusi barang dan jasa, termasuk pasokan bahan pangan yang tidak hanya digunakan untuk konsumsi Jakarta, tetapi juga untuk konsumsi kawasan aglomerasi Bodetabek dan daerah lain.

Pasca COVID-19, perekonomian Jakarta tumbuh dengan tren yang terus meningkat meskipun dibayangi berbagai dinamika kondisi global seperti meningkatnya tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta tingginya harga komoditas global seperti CPO dan emas. Pemulihan ekonomi Jakarta terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor. Pelaksanaan berbagai event dan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) yang semakin marak, berlanjutnya pembangunan proyek strategis Pemerintah maupun swasta, serta terus membaiknya kinerja ekspor menjadi motor pendorong ekonomi Jakarta. Pemulihan ekonomi Jakarta juga didukung oleh inflasi Jakarta yang terjaga rendah dan stabil dalam 3 tahun terakhir, dalam kisaran sasaran.

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menerbitkan buku Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan. Buku ini hadir untuk mendokumentasikan bagaimana proses pemulihan ekonomi Jakarta pasca COVID-19, bagaimana Jakarta bertransformasi di tengah krisis dan dinamika ekonomi global dan domestik, serta sinergi kebijakan yang dilakukan sehingga ekonomi Jakarta tetap dapat tumbuh kuat. Buku ini juga menggambarkan pemikiran dan gagasan kami untuk mendorong ekonomi Jakarta ke depan khususnya dalam mencapai visi Jakarta yang tidak hanya menjadi kota global yang berdaya saing namun ditargetkan dapat menempati peringkat 20 besar dalam Global City Index (GCI) dalam 20 tahun mendatang.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain BPS Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, kalangan pelaku usaha, narasumber dalam berbagai *Focus Group Discussion*, dan pihak-pihak lainnya, atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta ke depan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Refleksi di Masa Transisi

Teguh Setyabudi

PJ. Gubernur DKI Jakarta
Periode 2024-2025

Jakarta dengan sejuta pesonanya telah menjadi episentrum dan akselerator pembangunan di Indonesia. Memimpin kota ini sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta di masa transisi, merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Amanah yang diemban sejak Oktober 2024, telah memberi kesempatan untuk melihat bagaimana kota ini bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 hingga mengawal transformasi Jakarta menuju Kota Global yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Jakarta telah menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Kini, fokus saya adalah memastikan keberlanjutan program-program strategis yang telah berjalan, menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi, sekaligus memberikan arah baru untuk menjawab tantangan di era mendatang. Salah satu prioritas yang tengah diupayakan adalah mempersiapkan Jakarta untuk bersaing di panggung perekonomian global melalui inovasi dan digitalisasi.

Sistem pembayaran digital dan ekonomi kreatif menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi besar ini. Kolaborasi dengan Bank Indonesia guna memperluas adopsi QRIS, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat ekosistem UMKM digital menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transformasi ekonomi.

Di sisi lain, keberlanjutan tetap menjadi fokus utama pembangunan. Dalam periode kepemimpinan yang singkat ini, saya berkomitmen untuk terus menggalakkan berbagai program berbasis lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan pada sistem transportasi publik, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur hijau yang mendukung kehidupan urban yang sehat dan berkelanjutan.

Saya berkeyakinan bahwa visi Jakarta menjadi kota global yang setara dengan kota-kota besar dunia adalah hal yang dapat dicapai dengan kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Harapannya, dalam proses mewujudkan visi ini, Jakarta tetap menjadi rumah yang nyaman bagi warganya sekaligus menjadi simbol kemajuan Indonesia di mata dunia.

Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, Jakarta akan terus melangkah maju menjadi kota yang berketahanan dan pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, sosial serta budaya yang berdaya saing di tingkat global.

Refleksi Perjalanan 2022-2024

Heru Budi Hartono
P.J. Gubernur DKI Jakarta
Periode 2022-2024

Jakarta, pusat ekonomi terbesar Indonesia, menghadapi tantangan global pasca-pandemi serta transisi ibu kota negara. Kepemimpinan yang proaktif diperlukan untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Oleh karena itu, sepanjang kepemimpinan saya, strategi utama Jakarta bertumpu pada tiga pilar utama: stabilitas ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Setiap kota besar di dunia hanya dapat berkembang jika ia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan stabil. Dalam dua tahun terakhir, kami memastikan bahwa Jakarta tidak hanya pulih dari keterpurukan pandemi, tetapi juga siap untuk memasuki fase akselerasi pertumbuhan.

Jakarta memastikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi melalui pengendalian inflasi dan stabilitas harga bekerja sama dengan BI dan TPID. Sinergi dengan Jabodetabekjur diperkuat untuk ketahanan pangan dan efisiensi rantai pasok. Selain itu, kebijakan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi terus dioptimalkan melalui kerja sama dengan sektor swasta dan institusi keuangan.

Jakarta juga mempercepat digitalisasi dengan adopsi QRIS, peningkatan transaksi nontunai, serta penguatan fintech dan ekosistem keuangan digital. Kota ini juga berupaya menjadi Hub Ekonomi Digital Asia Tenggara dengan menarik perusahaan teknologi dan memperkuat pelatihan tenaga kerja digital.

Jakarta bukan hanya sebuah kota, tetapi sebuah ekosistem yang harus dirancang agar tahan terhadap perubahan iklim dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pembangunan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan ketahanan lingkungan. Revitalisasi infrastruktur dan transportasi publik dilakukan melalui percepatan MRT, LRT, dan Transjakarta berbasis digital. Jakarta juga bertransformasi menuju smart city dengan infrastruktur berbasis energi bersih dan kebijakan insentif untuk industri hijau.

Jakarta memiliki modal yang luar biasa untuk menjadi kota global yang setara dengan pusat ekonomi dunia lainnya. Untuk mencapai visi tersebut, Jakarta menargetkan lima agenda strategis: menjadi pusat keuangan internasional, mempercepat digitalisasi ekonomi kreatif, mewujudkan smart city berkelanjutan, meningkatkan infrastruktur mobilitas global, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi Jakarta yang telah kita bangun selama dua tahun terakhir bukan sekadar kebijakan, tetapi warisan yang harus dilanjutkan. Dengan cita yang saya canangkan "Sukses Jakarta Untuk Indonesia!", Jakarta berkomitmen menjadi lokomotif kemajuan nasional dan kota kelas dunia yang inovatif, tangguh, dan berkelanjutan.

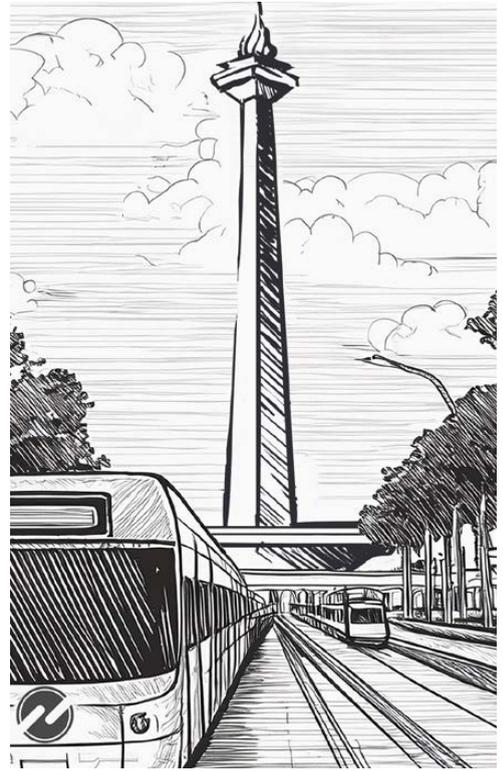
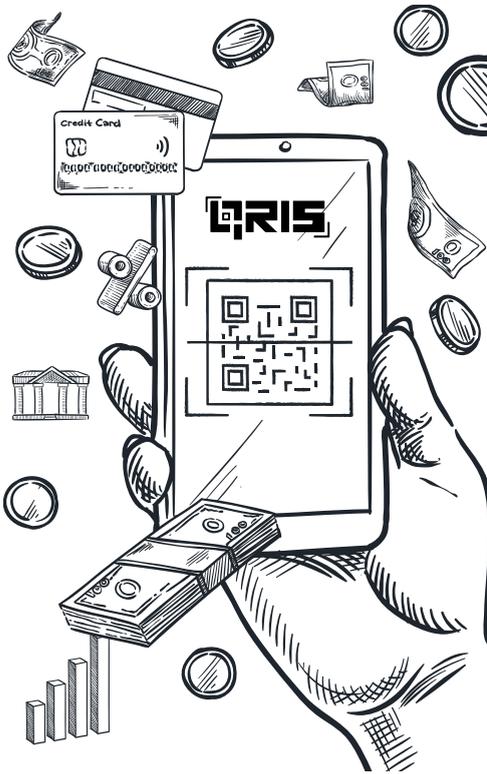
Daftar Isi

Mengukir Sinergi untuk Jakarta yang Berdaya Saing dan Inklusif	V
Refleksi Masa Transisi	VI
Refleksi Perjalanan 2022-2024	VII
Daftar Isi	VIII
Daftar Tabel	X
Daftar Gambar	XI
Daftar Grafik	XII
Jakarta Dalam Angka	XVI
Prolog	XX
Epilog	153
Testimoni	159



Bab I	
Jakarta Bangkit dan Pulih	2
1. Dari Rumah ke Mall	3
2. Transformasi Otomotif Jakarta Untuk Masa Depan	9
3. Idulfitri dan Mudik: Peluang Emas Industri Otomotif	17
4. Ekonomi Jakarta di Tengah Badai Geopolitik	21
5. Pulih Lebih Kuat	25
6. Harmoni Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi	31
7. Gelombang <i>Layoff Startup</i>	37
8. Kilau Emas di Balik Dinamika Ekonomi Jakarta	41

Bab II	
Menjaga Stabilitas Harga Demi Kesejahteraan Rakyat	48
1. Dari Medan Perang ke Pasar	49
2. Mengendalikan Inflasi di Tengah Kenaikan Harga BBM	55
3. Properti Jakarta Semakin Naik Daun	59
4. Ketika Kontrak Rumah Hingga Upah ART Jadi Penentu	63
5. Saat El-Nino Mengguncang Pasar Pangan	67
6. Pola Konsumsi, Inflasi, dan Strategi Menghadapi Tantangan ke Depan	71



Bab III

Digitalisasi, Fondasi Keuangan yang Inklusif 78

1. Jakarta Menari di Era Digital 79
2. Memperkuat Reputasi Keuangan 85
3. Dari Kampung ke Mancanegara 89
4. Menggempur Kejahatan Keuangan 93
5. Saatnya Generasi Muda Miliki Hunian 97
6. Perlindungan Konsumen di Era Digital 101
7. Jakarta Menghubungkan Dunia Digital 105

Bab IV

Kota Global dan Sinergi Aglomerasi 110

1. Optimisme Ekspor Impor Jakarta Pasca Reopening Tiongkok 111
2. Kelancaran Mobilitas untuk Kota yang Lebih Layak Huni dan Efisien 115
3. Properti Jakarta vs Bodetabek 121
4. Destinasi Urban Berkelas Global 125
5. Sinergi Baru Pengendalian Inflasi Jabodetabekjur 131
6. Mengamankan Pasokan, Mengendalikan Harga 137
7. Satu Kartu, Seribu Kemudahan 143
8. Integrasi Sistem Pembayaran Sektor Transportasi Jakarta 147

Daftar Tabel

Tabel I.5.1	Pemetaan Sektor Utama dan Potensial di DKI Jakarta	28
Tabel I.6.1	Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022 (s.d. Agustus 2022)	34
Tabel I.8.1	Pangsa Komoditas Ekspor Unggulan Jakarta Triwulan II 2024	44
Tabel II.1.1	Perubahan Harga Komoditas Global	51
Tabel II.4.2	Elastisitas Kenaikan UMP dan Upah ART	65
Tabel II.4.1	Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)	66
Tabel III.1.1	Digital Maturity Level (DML)	80
Tabel III.1.2	IETPD berdasarkan aspek	82
Tabel III.3.1	Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan UMKM Potensial Ekspor	90
Tabel III.5.1	Skema Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah	98
Tabel IV.2.1	Gap antara Kondisi Eksisting Jakarta dan Standar Kota Global dalam Bidang Layanan Publik	119
Tabel IV.4.1	Lokasi Wisata Urban di DKI Jakarta	126
Tabel IV.5.1	Volatilitas Inflasi Jabodetabek 2020 – 2023	133

Daftar Gambar

Gambar I.1.1	Digitalisasi Proses Bisnis	6
Gambar I.2.1	Roadmap Industri Kendaraan Bermotor Nasional	14
Gambar I.2.2	Sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	15
Gambar II.1.1	Alur Dampak Konflik Rusia – Ukraina	50
Gambar II.6.1	Bobot Nilai Konsumsi Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan	73
Gambar III.7.1	Alur transaksi dalam mekanisme kerja sama berjenjang	107
Gambar III.7.2	Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga	108
Gambar IV.6.1	Kegiatan Urban Farming Jakarta	138
Gambar IV.6.2	Model Pengembangan Urban Farming Jakarta (1a. Hidroponik; 1b. Vertiminaponik; 2. roof top, gang, dinding; 3. Agroeduwisata)	139
Gambar IV.8.2	Waktu Tempuh Perjalanan di Jakarta Berdasarkan Jam Operasional	148
Gambar IV.8.1	Posisi TomTom Traffic Index Jakarta	148
Gambar IV.8.4	Skema Perluasan Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ)	149
Gambar IV.8.3	Total Waktu dan Produksi Emisi Mengendara di Jakarta 2023	149
Gambar IV.8.5	Skema <i>Mobility as a Service, First Mile-Last Mile</i>	150
Gambar IV.8.6	<i>Urban Mobility Readiness Index</i> Jakarta	151

Daftar Grafik

Grafik I.1.1	Indeks Penjualan Ritel Global	4	Grafik I.3.6	Perkembangan Produksi Mobil Periode Januari-April	20
Grafik I.1.2	Perubahan Aktivitas Masyarakat Setelah Pandemi	4	Grafik I.4.1	Nominal Impor Jakarta dari Rusia	22
Grafik I.1.3	Tingkat Kunjungan di Pusat Perbelanjaan (dibandingkan dengan 2019)	5	Grafik I.4.2	Nominal Impor Jakarta dari Ukraina	22
Grafik I.1.4	Pangsa Penjualan Barang Melalui <i>E-commerce</i>	5	Grafik I.4.3	Asal Negara Impor Besi/Baja	23
Grafik I.2.1	Produksi Mobil di ASEAN	10	Grafik I.4.4	Asal Negara Impor Aluminium	23
Grafik I.2.2	Penjualan Mobil di ASEAN	10	Grafik I.4.5	PMA di Jakarta dari Negara Rusia dan Ukraina	23
Grafik I.2.3	Produksi Mobil Nasional	11	Grafik I.4.6	Pangsa Negara Asal PMA ke Jakarta 2021	23
Grafik I.2.4	Penjualan Mobil	11	Grafik I.5.1	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Komponennya	27
Grafik I.2.5	Sebaran Penjualan Mobil di Indonesia	12	Grafik I.5.2	Pangsa Sektor Ekonomi DKI Jakarta	28
Grafik I.2.6	Penjualan Mobil Jakarta	12	Grafik I.7.1	Perkembangan Jumlah Karyawan Terdampak <i>Layoff Startup</i> Global	38
Grafik I.2.7	Ekspor Mobil, Alat Berat, dan <i>Spare Part</i>	13	Grafik I.7.2	Perusahaan <i>Startup</i> Global dengan <i>Layoff</i> Tertinggi	38
Grafik I.2.8	Kredit Kendaraan Bermotor DKI Jakarta	13	Grafik I.7.3	Persebaran Lokasi <i>Startup</i> di Indonesia	38
Grafik I.2.9	NPL Kredit Kendaraan Bermotor DKI Jakarta	13	Grafik I.7.4	Pangsa Sektor Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi DKI Jakarta	39
Grafik I.2.10	Target Penjualan Mobil Tahun 2022	13	Grafik I.7.5	Perusahaan <i>Startup</i> dengan <i>Layoff</i> Tertinggi di DKI Jakarta	39
Grafik I.2.11	Proyeksi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia	16	Grafik I.7.6	Pangsa Sektor Usaha Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta	39
Grafik I.2.12	Perkiraan Kebutuhan SPKLU	16	Grafik I.7.7	Pangsa Jumlah Karyawan <i>Layoff Startup</i> terhadap Total Tenaga Kerja DKI Jakarta	39
Grafik I.3.1	Historis Penjualan Mobil pada HBKN Sebelum Pandemi	18	Grafik I.7.8	Perkembangan PMA DKI Jakarta	40
Grafik I.3.2	Historis Produksi Mobil pada HBKN Sebelum Pandemi	18	Grafik I.8.1	Inflasi Emas Perhiasan Jakarta (mtm)	42
Grafik I.3.3	Historis Penjualan Mobil pada HBKN Periode Pandemi	19	Grafik I.8.2	Perkembangan Inflasi Emas Perhiasan Jakarta dan Pertumbuhan Harga Emas Global (yoy)	42
Grafik I.3.4	Historis Produksi Mobil pada HBKN Periode Pandemi	19			
Grafik I.3.5	Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta Periode Januari-April	20			

Daftar Grafik

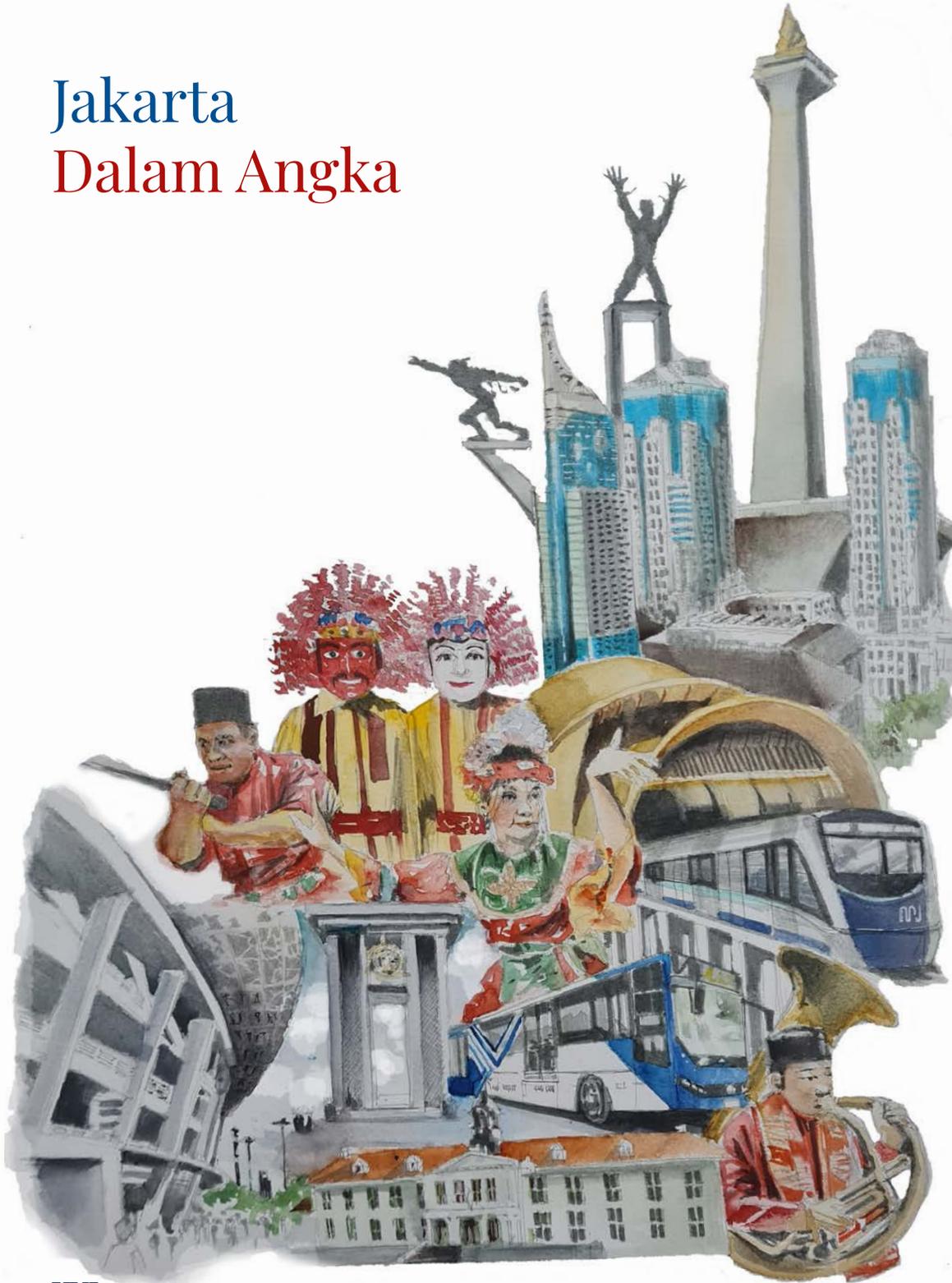
Grafik I.8.3	Perkembangan Harga Emas Global (yoy)	43	Grafik II.3.4	Harga Properti Residensial vs Inflasi Sewa Rumah dan Kontrak Rumah	61
Grafik I.8.4	Perkembangan Harga Emas Global, FFR, dan Fed Total Assets	43	Grafik II.4.1	Status Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa dan Milik Sendiri	64
Grafik I.8.5	Perkembangan US CPI	43	Grafik II.4.2	Perkembangan Harga Properti Residensial	64
Grafik I.8.6	Perkembangan <i>Demand</i> Emas oleh Central Bank Dunia	43	Grafik II.4.3	Pasar Properti Kondominium di Wilayah Jakarta melambat	65
Grafik I.8.7	Perkembangan Simpanan Cadangan Emas Bank Sentral Dunia	44	Grafik II.5.1	Perkembangan Harga Beras	69
Grafik I.8.8	Perkembangan Ekspor Perhiasan/Permata di Jakarta	45	Grafik II.5.2	Perkembangan Stok Beras	69
Grafik II.1.1	Perkembangan Harga Global Minyak Kelapa Sawit, Batu Bara, dan Pupuk	51	Grafik II.5.3	Perkembangan Harga Aneka Cabai	69
Grafik II.1.2	Perkembangan Harga Minyak Goreng Jakarta	51	Grafik II.5.4	Perkembangan Stok Aneka Cabai	69
Grafik II.1.3	Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga Jakarta	52	Grafik II.5.5	Perkembangan Harga Daging dan Telur Ayam Ras	70
Grafik II.1.4	Perkembangan Harga Global Gandum, Kedelai dan Jagung	52	Grafik II.5.6	Perkembangan Stok Daging dan Telur Ayam Ras	70
Grafik II.1.5	Perkembangan Harga Tempe dan Tahu Mentah Jakarta	52	Grafik III.1.1	Indeks Literasi Digital	80
Grafik II.1.6	Perkembangan Harga Mie Instan Jakarta	52	Grafik III.1.2	Indeks ETPD	81
Grafik II.1.7	Perkembangan Harga Emas Global dan Inflasi Emas Perhiasan Jakarta	53	Grafik III.1.3	Penerimaan QRIS Pajak dan Retribusi terhadap PAD	81
Grafik II.2.1	Pangsa Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengeluaran	56	Grafik III.1.4	Sebaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Jakarta	81
Grafik II.2.2	Distribusi Pendapatan	56	Grafik III.5.1	Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial	99
Grafik II.3.1	Perkembangan Harga Properti Residensial (Rumah Tapak) Jabodetabek-Banten	60	Grafik III.5.2	Perkembangan KPR	99
Grafik II.3.2	Perkembangan Harga Properti Komersial (Ruko, Gedung Kantor) Jabodetabek-Banten	60	Grafik III.6.1	Jenis Pengaduan di Jakarta	103
Grafik II.3.3	Harga Properti Residensial vs Inflasi Bahan Bangunan	61	Grafik III.7.1	Persentase Kepemilikan Sistem PJP LR di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta	106
			Grafik III.7.2	Jumlah pengajuan inovasi PJP LR kepada KPwBI DKI Jakarta	106
			Grafik III.7.3	Tren nilai transaksi judi online di Indonesia	106
			Grafik IV.1.1	Negara Asal Wisman DKI Jakarta	112

Daftar Grafik

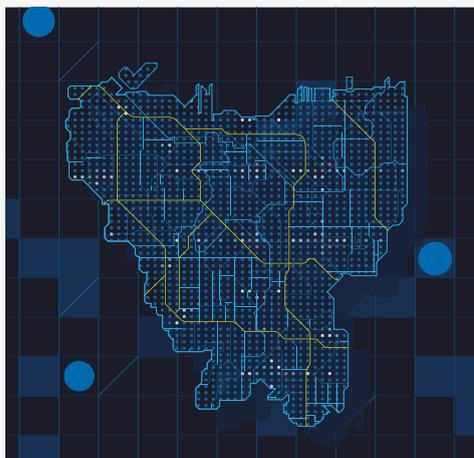
Grafik IV.1.2	Negara Tujuan Ekspor Utama DKI Jakarta	112	Grafik IV.4.6	Jumlah Penyelenggaraan Konser Musik di Jakarta	128
Grafik IV.1.3	Perkembangan Ekspor Jakarta Ke Tiongkok	113	Grafik IV.5.1	Perkembangan Inflasi Jabodetabek	132
Grafik IV.1.4	Negara Asal Impor Utama DKI Jakarta	113	Grafik IV.5.2	Perkembangan Inflasi Provinsi	132
Grafik IV.1.5	Perkembangan Impor Jakarta dari Tiongkok	113	Grafik IV.5.3	Sumber Pasokan dan Distribusi Komoditas Beras Jakarta	133
Grafik IV.2.1	Tingkat Kemacetan DKI Jakarta 2022	116	Grafik IV.5.4	Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Komponennya	134
Grafik IV.2.2	Pola Waktu Perjalanan DKI Jakarta	116	Grafik IV.8.1	Perkembangan Penumpang Angkutan Umum Jakarta (juta)	150
Grafik IV.2.3	Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan	116			
Grafik IV.2.4	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas DKI Jakarta	117			
Grafik IV.3.1	Perkembangan Harga Sewa dan Harga Jual Properti Komersial di DKI Jakarta	122			
Grafik IV.3.2	Perkembangan Permintaan Properti Komersial di DKI Jakarta	122			
Grafik IV.3.3	Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek	123			
Grafik IV.3.4	Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta	123			
Grafik IV.4.1	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara	126			
Grafik IV.4.2	Asal Negara Wisatawan Mancanegara	127			
Grafik IV.4.3	Rata-Rata <i>Length of Stay</i> Tamu Asing di Jakarta	127			
Grafik IV.4.4	Perkembangan Jumlah Perjalanan Domestik Menggunakan Transportasi Publik di Jakarta	127			
Grafik IV.4.5	Jumlah Penyelenggaraan Pameran dan Konferensi di Jakarta	128			

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta Dalam Angka



WILAYAH ADMINISTRASI*



Kab. Kepulauan Seribu
10,73 KM²

Kota Jakarta Timur
185,54 KM²

Kota Jakarta Utara
147,21 KM²

Kota Jakarta Selatan
144,94 KM²

Kota Jakarta Barat
125 KM²

Jumlah Kecamatan
44

Kota Jakarta Pusat
47,56 KM²

Jumlah Kelurahan
267

PENDUDUK & TENAGA KERJA



Jumlah Penduduk
10,68 Juta



Kepadatan Penduduk
16.165 / KM²



Jumlah Pekerja
5,43 Juta



Pengangguran
337,99 Ribu



Rata-rata Gaji Bersih per Bulan
Rp 5,81 Juta



Indeks Pembangunan Manusia
84,15

KEUANGAN

Pendapatan Daerah
Rp 66,55 Triliun



PDRB Harga Berlakur
Rp 3.679 Triliun



Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per bulan
Rp 1,66 Juta



Penduduk dengan Pengeluaran di Atas Rp 1,5 juta
62,06%



Indeks Gini
0,431



PENDUDUK & TENAGA KERJA

Jumlah Industri Besar dan Sedang **1.359**

Jumlah Tenaga Kerja **262,6 Ribu**



Jumlah Industri Mikro dan Kecil **79,9 Ribu**

Jumlah Tenaga Kerja **226,7 Ribu**



Industri Penyerap Tenaga Kerja Terbanyak



Pakaian Jadi



Makanan

EKSPOR IMPOR

Nilai Ekspor **13,53 Miliar Dollar AS**



Nilai Impor **109,89 Miliar Dollar AS**



3 Jenis Komoditas Pendorong Ekspor



Kendaraan



Logam Mulia



Alas Kaki

5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar



Tiongkok



Amerika Serikat



Singapura



Filipina

5 Negara Asal Impor Terbesar



Tiongkok



Jepang



Thailand



Korea



Singapura

TRANSPORTASI

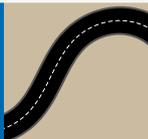
Jumlah Sepeda Motor **19,40 Juta**



Jumlah Mobil **3,90 Juta**



Panjang Jalan **7.208 KM**



Jalan dengan Kondisi Baik **97,19%**



Jumlah Penumpang KRL Jabodetabek **328,15 Juta**



SISTEM PEMBAYARAN

KARTU KREDIT



Nominal Transaksi Kartu Kredit (yoy)
3,86%
Volume Penggunaan Kartu Kredit (yoy)
18,96%

QRIS



Jumlah Merchant QRIS (mtm)
5,78 juta merchant

Pangsa QRIS Berdasarkan Jenis Usaha

36,78% UMI	30,66% UKE
20,75% URE	8,39% UME
3,42% UBE	0,01% PSD

KESEHATAN



Jumlah Rumah Sakit
196



Jumlah Rumah Sakit Bersalin
23



Jumlah Posyandu
4.475



Jumlah Puskesmas
336

PERTANIAN



Produksi Beras
1.453,78 Ton



Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian
13 Ribu



Jumlah Petani Milenial
2.568



Populasi Sapi Potong
2.083

PENGELOLAAN SAMPAH*



Tempat Pembuangan Sampah Sementara
1.175



Jumlah Sampah Organik
2.921,8 Ton



Jumlah Sampah Anorganik
2.912,5 Ton



Bahan Beracun dan Berbahaya
24,6 Ton

PARIWISATA



Jumlah Wisman
2,50 Juta



Rata-rata Lama Menginap Wisatawan
1,77 Hari

Wisata Unggulan*



Ancol



Monas



Ragunan

Prolog

Pandemi COVID-19 telah membawa guncangan luar biasa terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Jakarta. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, Jakarta tidak hanya mengalami dampak langsung dari pembatasan aktivitas masyarakat tetapi juga menjadi barometer pemulihan ekonomi nasional. Buku ini, “Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan”, mengisahkan bagaimana Jakarta bertransformasi di tengah dinamika ekonomi global dan domestik melalui kebijakan yang tepat, sinergi lintas sektor, dan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ini adalah dokumentasi penting tentang upaya kolektif untuk melewati masa krisis dan membuka lembaran baru bagi Jakarta.

Setiap krisis memaksa kita beradaptasi dengan cepat, dan pandemi COVID-19 adalah salah satu ujian terbesar dalam sejarah kota ini. Aktivitas ekonomi terhenti, daya beli masyarakat menurun, dan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perdagangan, dan industri mengalami kemunduran tajam. Buku ini berperan sebagai refleksi dari setiap kebijakan yang diambil serta strategi yang diterapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, buku ini diharapkan menjadi pelajaran bagi para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana sebuah kota besar seperti Jakarta dapat bangkit dari krisis besar dan menjaga momentum pertumbuhan di masa depan.

Buku ini tidak hanya memaparkan data dan analisis mengenai perjalanan ekonomi Jakarta, tetapi juga memperlihatkan transformasi yang terjadi di berbagai sektor. Perubahan pola konsumsi masyarakat, adaptasi dunia usaha melalui digitalisasi, serta kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga menjadi tema-tema utama yang diangkat. Setiap bab menggambarkan dengan detail upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, mulai dari stimulus fiskal dan moneter hingga inisiatif sosial-ekonomi untuk mendukung kelompok rentan.

Pembaca akan menemukan beragam perspektif tentang peran penting infrastruktur, kebijakan investasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, buku ini juga menyoroti langkah-langkah inovatif dalam pengendalian inflasi serta digitalisasi sistem pembayaran, yang menjadi katalisator bagi stabilitas ekonomi daerah. Transformasi digital tidak hanya mengubah pola konsumsi tetapi juga mendorong terciptanya layanan publik yang lebih inklusif.

Prolog

Bagian awal buku ini mengulas bagaimana Jakarta berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian melalui proyek strategis dan investasi jangka panjang. Bab ini menjelaskan bagaimana sektor-sektor seperti transportasi, industri kreatif, dan perdagangan digital menjadi motor penggerak dalam memulihkan ekonomi kota. Tidak hanya fokus pada pencapaian ekonomi, bab ini juga menggali dampak sosial yang muncul, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah yang paling terdampak pandemi.

Bab kedua mengeksplorasi upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah, dengan fokus pada sinergi antara pemerintah provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bagian ini menyoroti pentingnya menjaga kestabilan harga pangan melalui kebijakan-kebijakan seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam memastikan suplai kebutuhan pokok tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat bisa terjaga.

Bab ketiga berfokus pada pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan stabilitas keuangan. Inovasi di bidang teknologi keuangan memungkinkan layanan perbankan menjadi lebih inklusif dan efisien. Buku ini juga menyoroti peran penting inklusi keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta. Selain itu, stabilitas keuangan menjadi aspek yang sangat krusial dalam mengurangi dampak risiko eksternal, seperti ketidakpastian global dan perubahan geopolitik.

Bab keempat membahas peran strategis Jakarta dalam membangun sinergi aglomerasi di Jabodetabekjur. Bagian ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan bagaimana Jakarta menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan kawasan metropolitan.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi atas perjalanan ekonomi Jakarta tetapi juga menjadi inspirasi bagi kota-kota lain yang menghadapi tantangan serupa. Pelajaran yang diperoleh dari krisis ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, adaptasi cepat, dan sinergi antara berbagai pihak, sebuah kota mampu bangkit dari keterpurukan. Pemahaman ini penting tidak hanya untuk menghadapi krisis saat ini, tetapi juga sebagai bekal untuk masa depan.



Photo: Jalan Sudirman, Jakarta

Bab I

Jakarta Bangkit dan Pulih

Bab ini membahas dinamika pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan Pemerintah dan investasi strategis berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di tengah krisis. Perubahan pola konsumsi masyarakat, peningkatan investasi dalam infrastruktur seperti MRT dan LRT, serta peran sektor industri pengolahan menjadi sorotan utama. Pemulihan ekonomi Jakarta dipercepat melalui insentif fiskal dan kebijakan pro-bisnis yang memungkinkan investasi tetap berjalan meskipun aktivitas ekonomi sempat terhenti.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada awal pandemi mengalami kontraksi signifikan, namun mulai membaik seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Konsumsi rumah tangga kembali meningkat, terutama selama periode liburan dan hari besar keagamaan. Pemerintah daerah fokus mendorong proyek strategis berkelanjutan untuk menjaga momentum pemulihan, seperti pengembangan transportasi publik dan revitalisasi ekonomi kreatif. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa tumbuh pesat sebagai respons terhadap peningkatan permintaan domestik.

Bab ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan Pemerintah dalam mendorong investasi, baik melalui proyek pembangunan maupun insentif pajak untuk menarik investor. Meski terdapat risiko eksternal seperti ketidakpastian global, Jakarta menunjukkan ketahanan melalui diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor strategis. Bab ini menggambarkan bagaimana Jakarta berhasil mengubah krisis menjadi peluang dengan menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di masa depan.



Foto: Central Park Mall, Jakarta

01. Dari Rumah ke Mall

INTISARI

- Perubahan perilaku konsumsi masyarakat selama pandemi
- Pemulihan mobilitas masyarakat Jakarta
- Kinerja penjualan ritel yang membaik
- Tren penurunan penggunaan layanan online
- Potensi besar toko ritel di masa depan

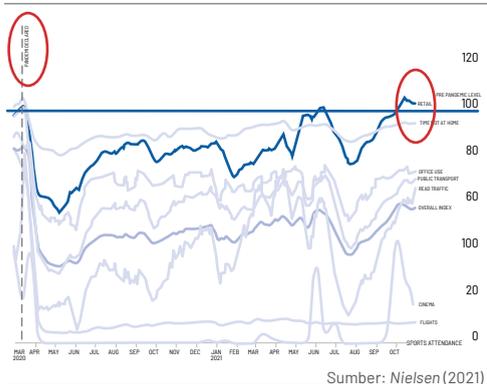
*“The only constant in life is change” -
Heraclitus*

Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama dua tahun telah membawa dampak besar pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Pada awal pandemi, aktivitas masyarakat yang umumnya dilakukan secara langsung berubah drastis menjadi serba *online* dan digital. Hal ini juga berdampak pada perilaku konsumen yang semakin condong berbelanja *online*, terutama karena adanya pembatasan aktivitas dan penutupan pusat perbelanjaan serta toko ritel.

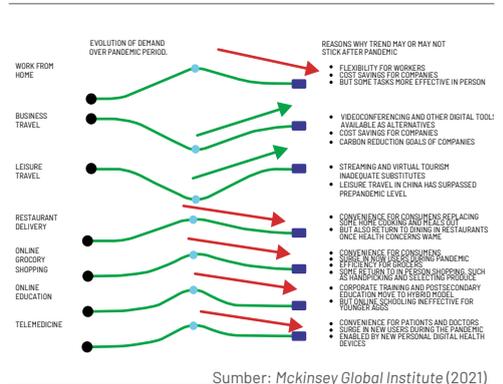
Dwi, seorang ibu rumah tangga di Jakarta, misalnya, mulai mengandalkan aplikasi *online* untuk memesan kebutuhan sehari-hari. Namun, setelah pembatasan mulai dilonggarkan, ia merasa lebih leluasa berbelanja secara langsung ke pusat perbelanjaan, menikmati interaksi dan pengalaman yang hilang selama pandemi. Kisahnya mencerminkan perubahan yang dialami banyak orang di seluruh Jakarta.

Menurut riset Nielsen, hingga Oktober 2021, kinerja penjualan ritel untuk produk-produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG) telah kembali normal seperti sebelum pandemi (Grafik I.1.1). Namun, penjualan barang-barang terkait gaya hidup, seperti produk *fashion*, bioskop, dan hiburan lainnya, masih berada di kisaran 70% dari level normal. Hal ini mengindikasikan bahwa tren belanja *online* yang marak selama pandemi belum menjadi kebiasaan permanen dan masyarakat cenderung akan kembali kepada pola belanja lama.

Sejalan dengan riset McKinsey Global Institute, perubahan perilaku *online* ini diprediksi akan menurun setelah pandemi mereda dan masyarakat mulai kembali berani beraktivitas di luar ruangan serta bertemu secara fisik (Grafik I.1.2). Misalnya, semakin banyak orang yang kembali bekerja dari kantor (*Work from Office/WFO*) karena dinilai lebih efektif dan efisien bagi perusahaan. Mobilitas menuju tempat rekreasi dan hiburan juga meningkat. Sebaliknya, penggunaan layanan *online* seperti pesan-antar makanan, belanja kebutuhan sehari-hari, sekolah *online*, dan *telemedicine* diperkirakan akan berkurang. Hal ini terutama



Grafik I.1.1 Indeks Penjualan Ritel Global

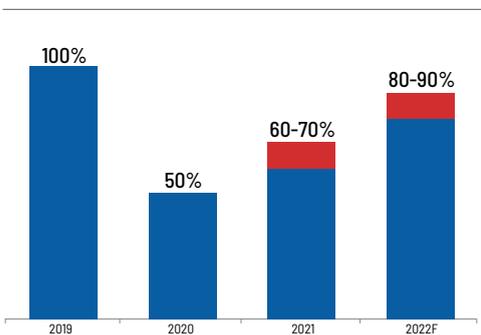


Grafik I.1.2 Perubahan Aktivitas Masyarakat Setelah Pandemi

karena masyarakat sudah jenuh dengan aktivitas di rumah selama pandemi dan ingin kembali beraktivitas di luar, terutama saat situasi COVID-19 sudah terkendali. Tren serupa telah terjadi di Amerika dan Tiongkok, yang juga berdampak pada penurunan pangsa pasar penjualan *online*.

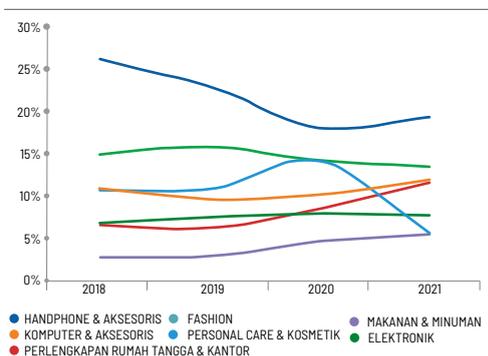
Di DKI Jakarta, mobilitas masyarakat pada triwulan IV 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dan mencapai level tertinggi sejak pandemi, meskipun masih di bawah *baseline*. Peningkatan terbesar terjadi pada kunjungan ke toko ritel, tempat rekreasi, taman, dan hub transportasi, sementara mobilitas ke tempat tinggal justru menurun. Peningkatan mobilitas ini selaras dengan perbaikan Indeks Penjualan Ritel DKI Jakarta pada triwulan IV 2021, meskipun masih dalam level kontraksi. Selain itu, tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan dan mall pada tahun 2021 mencapai 60-70% dari kondisi normal sebelum pandemi (Grafik I.1.3), meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 50%. Kenaikan ini diprediksi akan berlanjut hingga 2022, dengan tingkat kunjungan yang diperkirakan bisa mencapai 80-90% dari kondisi normal.

Meski penjualan *online* masih tumbuh positif, laju pertumbuhannya mulai melambat sejak akhir triwulan III 2021, seiring dengan meningkatnya kunjungan langsung ke pusat perbelanjaan. Berdasarkan pangsa penjualan, *handphone* dan aksesoris mencatat pangsa terbesar. Produk lain seperti perlengkapan rumah tangga dan kantor, komputer dan aksesoris, serta makanan dan minuman juga menunjukkan peningkatan penjualan. Sebaliknya, produk perawatan pribadi mengalami penurunan pangsa seiring kinerjanya yang berkontraksi sejak Mei 2021 (Grafik I.1.4).



Sumber: APPBI, diolah

Grafik I.1.3 Tingkat Kunjungan di Pusat Perbelanjaan (dibandingkan dengan 2019)



Sumber: Beberapa Marketplace, diolah

Grafik I.1.4 Pangsa Penjualan Barang Melalui E-commerce



Gambar 1.1.1 Digitalisasi Proses Bisnis

Di DKI Jakarta, perdagangan *online* diperkirakan terus mengalami pertumbuhan, meskipun tidak secepat saat puncak pandemi, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Selain itu, akselerasi belanja *online* juga akan melambat seiring dengan kembalinya aktivitas ekonomi ke kondisi sebelum pandemi. Saat ini, pangsa perdagangan *online* di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 1%. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ritel *offline* menjadi krusial, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi ke depan. Potensi pasar ritel masih sangat besar, didukung oleh pertumbuhan populasi berpendapatan menengah di Indonesia, yang sejalan dengan peningkatan PDB per kapita Indonesia menjadi kelas menengah atas pada 2019. Meski sempat turun kembali ke kelas menengah bawah pada 2020 akibat pandemi, konsumen secara umum telah beralih menjadi kelas menengah, sehingga toko ritel perlu bersiap menghadapi perubahan ini.

Salah satu perubahan perilaku yang akan terlihat adalah meningkatnya permintaan terhadap produk berkualitas dalam kemasan mini seiring dengan daya beli yang naik, serta tren konsumsi barang yang lebih sehat, segar, alami, dan organik. Toko-toko dengan konsep unik yang menawarkan pengalaman berbelanja juga akan semakin diminati, bersamaan dengan meningkatnya digitalisasi proses bisnis.

Langkah strategis untuk menangkap peluang ini adalah melalui digitalisasi proses bisnis. Digitalisasi tidak hanya berarti beralih dari toko *offline* ke *online*, melainkan juga melibatkan digitalisasi seluruh proses operasional. Dengan digitalisasi, produksi dapat lebih optimal, efisiensi meningkat, dan kepuasan pelanggan pun dapat ditingkatkan. Contoh digitalisasi yang dapat diterapkan mencakup pencatatan stok barang secara *real time*, pelacakan pengiriman, serta sistem pembayaran digital yang akan mempermudah pengalaman berbelanja sekaligus meningkatkan efisiensi operasional toko.

Dalam menghadapi perubahan yang tak terelakkan, seperti yang pernah diungkapkan oleh Heraclitus, “*The only constant in life is change.*” Konsumen dan bisnis di Jakarta, serta di seluruh Indonesia, telah beradaptasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dunia mulai pulih dari pandemi, perubahan perilaku konsumen akan terus berlanjut, memberikan tantangan sekaligus peluang baru bagi industri ritel. Dengan memanfaatkan digitalisasi dan mengikuti tren konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan, toko ritel dapat memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen.





02. Transformasi Otomotif Jakarta untuk Masa Depan

INTISARI

- Jakarta sebagai Pusat Perkembangan Otomotif
- Peluang Ekspansi di Luar Pulau Jawa
- Pengembangan Kendaraan Ramah Lingkungan di Jakarta
- Kontribusi Industri Otomotif terhadap PDB Nasional
- Tantangan Global yang Dihadapi Industri Otomotif

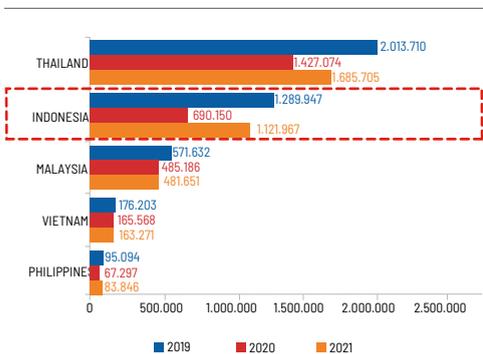
“The measure of intelligence is the ability to change”

– Albert Einstein

Bagi Dwi, seorang *sales* di salah satu *dealer* mobil di Jakarta, pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri. Penjualan yang dulu lancar tiba-tiba terhenti akibat pembatasan sosial. Namun, seiring dengan pelonggaran aturan PSBB dan insentif pemerintah seperti relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Dwi merasakan optimisme baru. “Setiap hari selalu ada telepon dari pelanggan yang ingin membeli mobil baru,” ujarnya dengan senyum. Pengalaman Dwi mencerminkan bagaimana industri otomotif Jakarta mulai bangkit setelah masa sulit.

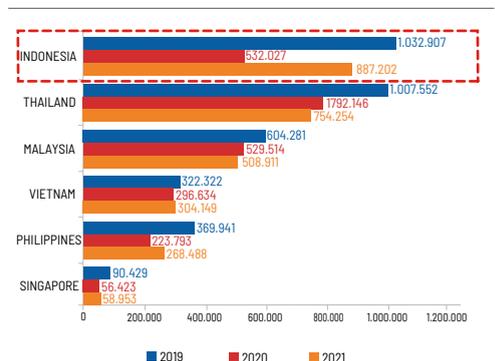
Indonesia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam industri Kendaraan Bermotor (KBM) di tingkat global, khususnya di kawasan ASEAN. Di wilayah ini, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Thailand dalam hal volume produksi kendaraan, sementara dalam penjualan mobil, Indonesia menempati posisi pertama dengan kontribusi sebesar 32% dari total penjualan kendaraan di ASEAN (Grafik I.2.1-I.2.2). Meskipun begitu, rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih terbilang rendah, yakni 99 kendaraan per 1.000 penduduk, tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang memiliki rasio kepemilikan lebih dari 200 kendaraan per 1.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa masih ada peluang besar bagi industri KBM Indonesia untuk mengembangkan pasar domestik.

Kapasitas produksi mobil nasional saat ini mencapai 2,4 juta unit per tahun. Namun rata-rata utilisasi produksi hanya sekitar 1,2 juta unit per tahun. Pada tahun 2021, utilisasi produksi tercatat sebesar 46%, dengan realisasi produksi 1,1 juta unit, tumbuh 62,6% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah berkontraksi pada tahun 2020 akibat COVID-19, kinerja produksi mobil mulai kembali pulih sejak triwulan III 2020 (Grafik I.2.3). Pemulihan ini didukung oleh kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) yang



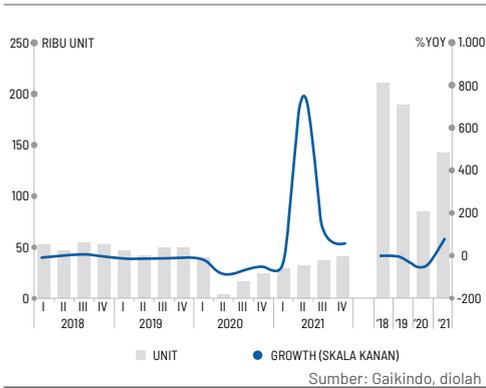
Sumber: Asean Automotive Federation

Grafik I.2.1 Produksi Mobil di ASEAN

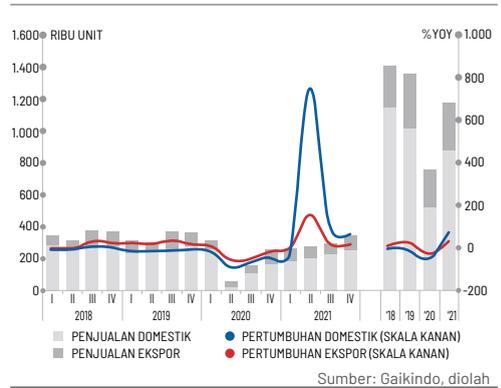


Sumber: Asean Automotive Federation

Grafik I.2.2 Penjualan Mobil di ASEAN



Grafik I.2.3 Produksi Mobil Nasional

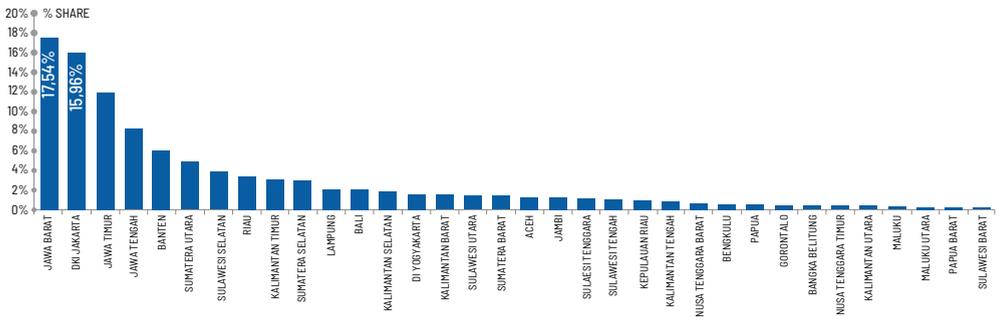


Grafik I.2.4 Penjualan Mobil

dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, vaksinasi pekerja, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi, yang memungkinkan industri beroperasi dengan kapasitas penuh.

Industri KBM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, baik di sektor domestik maupun ekspor. Dari sisi domestik, pada tahun 2021 industri ini menyumbang 1,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja ini tersebar di berbagai sektor, termasuk *assembling, supplier, dan outlet/sales services*, baik *authorized* maupun *non-authorized*. Seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mulai diterapkan pada April 2021, permintaan mobil domestik mulai pulih, setelah hanya terjual 24.042 unit pada triwulan II 2020 (Grafik I.2.4). Secara keseluruhan, penjualan mobil nasional pada tahun 2021 mencapai 887.205 unit, tumbuh 66,6% (yoy) setelah sempat terkontraksi sebesar 48,3% (yoy) pada tahun 2020.

Selain itu, industri KBM juga menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan pajak di Indonesia. Pada tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang 27,9% dari total penerimaan pajak, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan kontribusi sebesar 14,2%. Dari sisi ekspor, industri KBM nasional menempati posisi kelima komoditas ekspor unggulan, dengan kontribusi terhadap ekspor nasional ±3,9% pada tahun 2021. Ekspor mobil secara *completely built up* (CBU) mencapai 294.457 unit, tumbuh 26,8% (yoy), didorong oleh pemulihan ekonomi global dan upaya penanganan pandemi COVID-19 yang terus berlangsung.



Sumber : : Gaikindo, diolah

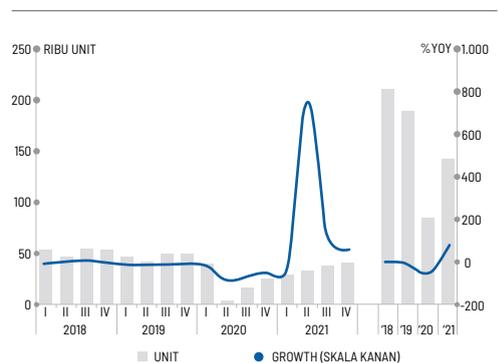
Grafik I.2.5 Sebaran Penjualan Mobil di Indonesia

Kinerja Industri

Distribusi kendaraan bermotor di Indonesia saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan penjualan mencapai 365.134 unit pada tahun 2020, atau sekitar 61,3% dari total penjualan domestik. DKI Jakarta menempati posisi kedua dengan pangsa pasar sebesar 15,69%, setelah Jawa Barat yang memimpin dengan pangsa pasar 17,54% (Grafik I.2.5). Ke Depan, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pasar kendaraan bermotor di daerah-daerah tersebut. Pada tahun 2020, pangsa pasar di luar Jawa tercatat meningkat dari 33,2% pada tahun 2019 menjadi 38,7%.

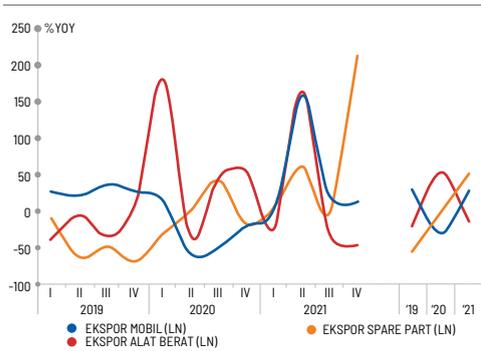
Pelonggaran PSBB/PPKM dan insentif PPnBM juga telah mendorong pemulihan penjualan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Setelah mengalami kontraksi sebesar 55,1% (yoy) pada tahun 2020, penjualan mobil di Jakarta tumbuh 66,6% (yoy) pada tahun 2021. Penurunan tajam pada triwulan II 2020, berangsur pulih sejak triwulan III 2020 (Grafik I.2.6).

Di bidang ekspor, kinerja ekspor mobil dan suku cadang melalui PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menunjukkan tren positif pada tahun 2021. Pada triwulan IV 2021, ekspor suku cadang tumbuh signifikan sebesar 208,1% (yoy), setelah sempat berkontraksi 2,9% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.2.7). Pemulihan ekspor ini mencerminkan perbaikan permintaan global seiring dengan membaiknya penanganan pandemi



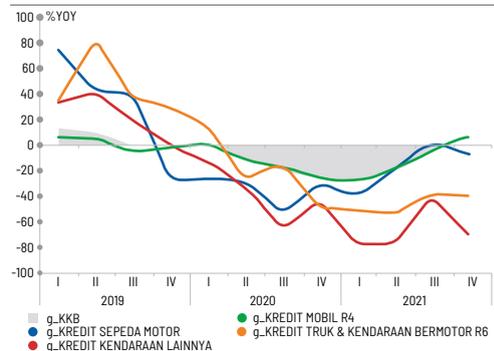
Sumber: Gaikindo, diolah

Grafik I.2.6 Penjualan Mobil Jakarta



Sumber: IKT, diolah

Grafik I.2.7 Ekspor Mobil, Alat Berat, dan Spare Part

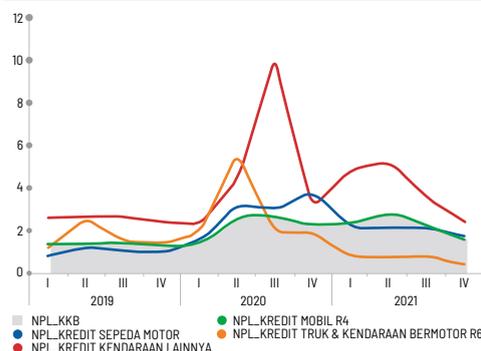


Sumber: BI, diolah

Grafik I.2.8 Kredit Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

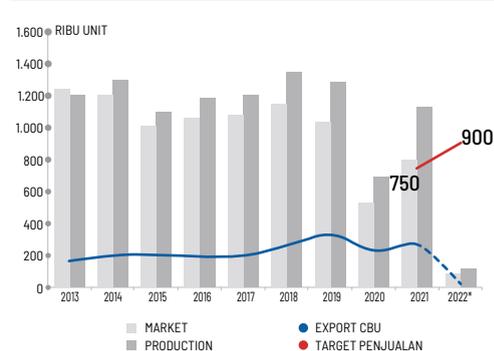
di negara-negara tujuan ekspor. Namun, kinerja ekspor alat berat dari Jakarta mencatat kontraksi 13,3% (yoy) pada tahun 2021, setelah mencatat pertumbuhan 52% pada tahun sebelumnya. Industri pertambangan dan perkebunan, yang relatif tidak terdampak oleh pandemi pada tahun 2020, mendorong permintaan alat berat tetap tinggi pada saat itu.

Dari sisi pembiayaan, kredit kendaraan bermotor di DKI Jakarta, yang menjadi sumber utama pembiayaan kendaraan bermotor, mencatat pertumbuhan sebesar 2,5% (yoy) pada akhir tahun 2021, setelah sempat berkontraksi 27,1% (yoy) pada akhir 2020. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kredit mobil sebesar 6,6% (yoy), meskipun kredit untuk sepeda motor, truk, dan kendaraan roda enam masih berkontraksi (Grafik I.2.8). Peningkatan permintaan mobil ini sejalan dengan kebijakan relaksasi PPnBM dan *loan to value* (LTV) untuk kredit kendaraan bermotor, yang turut didukung oleh perbaikan aktivitas ekonomi. Sementara itu, *non-performing loan* (NPL) untuk kredit kendaraan bermotor pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,64%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (2,32%) dan triwulan sama tahun sebelumnya (2,28%) pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik I.2.9).



Sumber: BI, diolah

Grafik I.2.9 NPL Kredit Kendaraan Bermotor DKI Jakarta



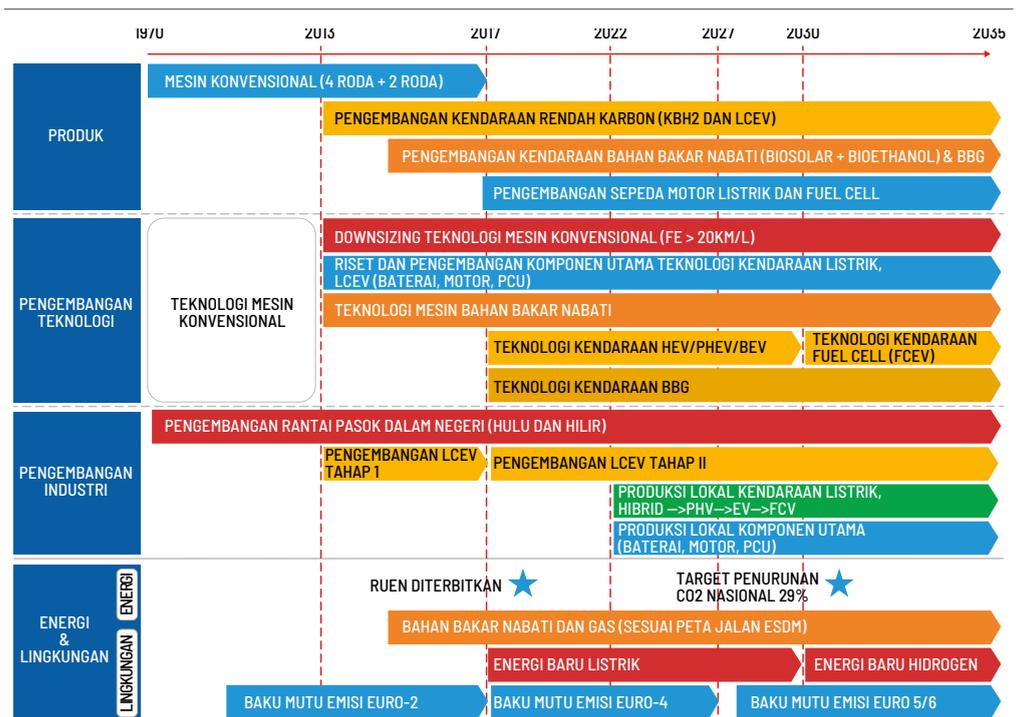
Sumber: Gaikindo

Grafik I.2.10 Target Penjualan Mobil Tahun 2022

Tantangan dan Prospek

Meski demikian, pengembangan industri KBM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global, optimalisasi kapasitas produksi, serta penguatan rantai nilai lokal (*local value chain*). Saat ini, produksi kendaraan di Indonesia didominasi oleh model MPV, yang mencakup 48% dari total produksi, sementara permintaan global lebih cenderung ke model SUV dan sedan. Tantangan lain meliputi optimalisasi kapasitas produksi, yang saat ini baru mencapai 46% dari kapasitas terpasang, serta ketergantungan yang tinggi pada komponen impor, terutama komponen elektrik dan presisi tinggi. Industri KBM juga masih menghadapi kendala kelangkaan semikonduktor, kontainer, dan keterbatasan kapal, yang diperkirakan berlanjut hingga tahun 2022. Hal ini turut menyebabkan kenaikan biaya logistik dalam negeri.

Prospek industri KBM pada tahun 2022 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. GAIKINDO memperkirakan produksi kendaraan pada tahun 2022 dapat mencapai 900.000 unit (Grafik I.2.10). Pemerintah juga memperpanjang insentif PPNBm hingga September 2022, terutama untuk mobil jenis *low cost green car* (LCGC) dengan



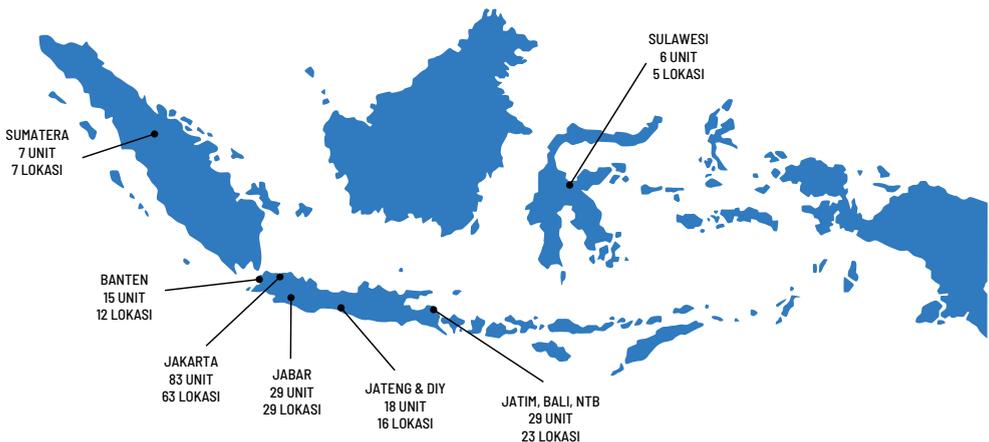
Sumber : Kementerian Perindustrian

Gambar I.2.1 Roadmap Industri Kendaraan Bermotor Nasional

minimum local purchase sebesar 80%. Insentif diberikan dalam bentuk pengurangan PPnBM 100% pada triwulan I, 66,66% pada triwulan II, dan 33,33% pada triwulan III. Selain itu, mobil dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp250 juta juga mendapatkan relaksasi PPnBM 50% hingga akhir triwulan I 2022. Pemerintah juga memperpanjang kebijakan uang muka (DP) 0% untuk kredit kendaraan baru hingga Desember 2022.

Pengembangan industri KBM ke depan diarahkan pada kendaraan ramah lingkungan (Low Emission Vehicle), termasuk pengembangan *electric vehicle* (EV) sebagai bagian dari upaya menurunkan emisi CO₂ sebesar 29% pada tahun 2030. Pada tahun 2021, penjualan EV, yang meliputi *battery EV* (BEV), *plug-in hybrid EV* (PHEV), dan *hybrid EV* (HEV), masih rendah, dengan total penjualan 2.857 unit hingga November, atau hanya 0,4% dari total penjualan kendaraan. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan PPnBM berbasis emisi CO₂ sejak Oktober 2021, serta menggantikan PP No. 73 Tahun 2019 dengan PP No. 74 Tahun 2021 untuk mendukung penetrasi EV di pasar domestik.

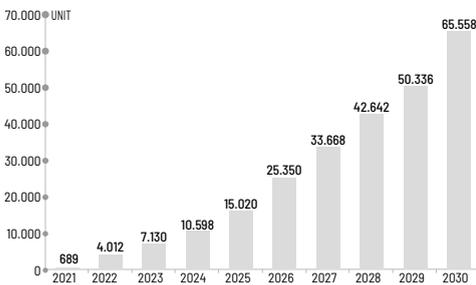
Penetrasi EV juga didorong melalui penggunaan kendaraan listrik di transportasi umum. Pada tahun 2022, DKI Jakarta merencanakan penambahan 100 bus listrik Transjakarta, dua di antaranya berasal dari China (BYD dan Higer). Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif bagi pengguna EV, seperti bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), parkir gratis di beberapa lokasi, dan pembebasan dari aturan ganjil-genap.



Sumber : Kementerian ESDM, per September 2021

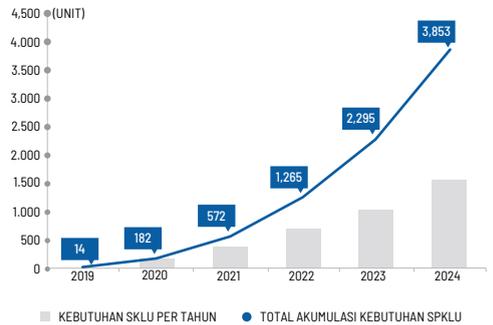
Gambar 1.2.2 Sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Penetrasi EV di Indonesia juga didukung oleh rencana investasi pabrik dan pengembangan infrastruktur pendukung, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Terdapat 187 unit SPKLU yang tersebar di 155 titik di seluruh Indonesia, dan percepatan pembangunan dilakukan melalui tiga skema bisnis: *provider*, *retailer*, dan kerja sama. Sementara itu, terdapat 86 lokasi SPBKLU yang tersebar di wilayah Jakarta dan Banten (Gambar 1.2.2). Berdasarkan proyeksi PLN, penggunaan EV di Indonesia diperkirakan akan tumbuh signifikan, mencapai lebih dari 65 ribu unit pada tahun 2030 (Grafik 1.2.11), yang juga mendorong peningkatan kebutuhan SPKLU (Grafik 1.2.12).



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.2.11 Proyeksi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia



Sumber: PLN

Grafik 1.2.12 Perkiraan Kebutuhan SPKLU

Menghadapi tantangan global seperti ketergantungan pada impor komponen dan perubahan tren kendaraan, industri otomotif Jakarta terus beradaptasi dengan melakukan transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan. Seperti yang dikatakan Einstein, kemampuan untuk berubah adalah ukuran kecerdasan. Dalam hal ini, industri otomotif di Jakarta membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan mengubah tantangan menjadi peluang, dan menata masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.



Foto : Gerbang Tol Cikampek

03. Idulfitri dan Mudik: Peluang Emas Industri Otomotif

INTISARI

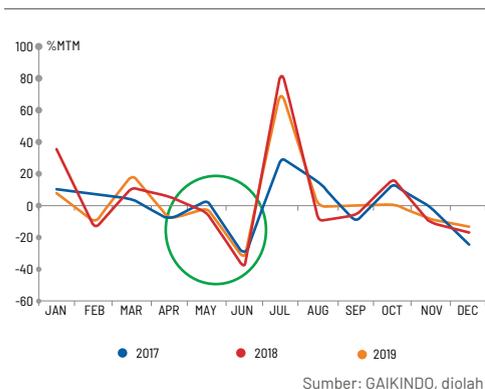
- Bagaimana pola penjualan dan produksi mobil terkait perayaan Idulfitri.
- Dampak kebijakan pemerintah terhadap industri otomotif nasional.
- Peran industri otomotif di Jakarta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Tantangan industri otomotif selama pandemi dan pemulihannya.
- Pentingnya kebijakan insentif dalam mendorong permintaan pasar dan produksi kendaraan.

“Success is not final, failure is not fatal; it is the courage to continue that counts” – Winston Churchill

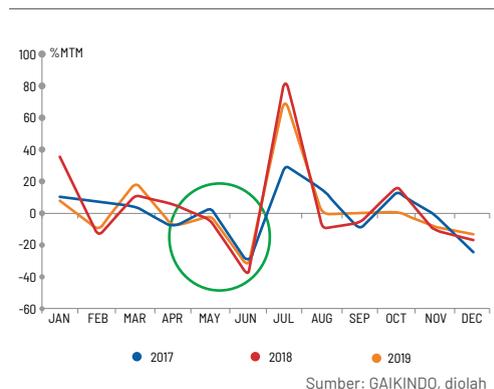
Awan, seorang karyawan swasta di Jakarta, ingat betul bagaimana dia membeli mobil barunya pada Mei 2019, satu bulan sebelum Idulfitri. “Lebih nyaman bawa mobil sendiri buat mudik ke kampung,” kenangnya. Awan bukan satu-satunya—banyak masyarakat yang setiap tahun memilih membeli mobil menjelang lebaran demi kelancaran perjalanan mudik. Tren ini telah menjadi bagian dari siklus tahunan penjualan kendaraan di Indonesia, terutama saat memasuki periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idulfitri.

Tak heran, Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam industri KBM di tingkat global, khususnya di ASEAN. Selain itu, industri alat angkut juga menjadi salah satu subsektor utama dalam sektor Industri Pengolahan di DKI Jakarta, dengan kontribusi sebesar 6,4% terhadap PDRB DKI Jakarta pada 2021. Permintaan mobil di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh aktivitas mudik saat HBKN Idulfitri.

Data historis sebelum pandemi COVID-19 (2017-2019) menunjukkan bahwa penjualan mobil meningkat secara bulanan, terutama satu bulan sebelum Idulfitri (Grafik I.3.1). Namun, selama Idulfitri, penjualan justru menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan aktivitas mudik dan berkurangnya operasional *dealer* karena libur dan cuti bersama. Pola penjualan ini juga tercermin dalam tren produksi mobil pada periode yang sama (Grafik I.3.2).



Grafik I.3.1 Historis Penjualan Mobil pada HBKN Sebelum Pandemi



Grafik I.3.2 Historis Produksi Mobil pada HBKN Sebelum Pandemi

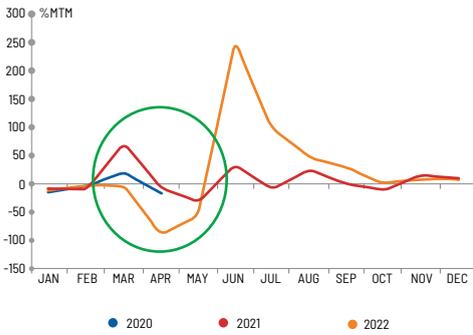
Namun, selama pandemi COVID-19 (2020-2021), peningkatan penjualan mobil menjelang Idulfitri tidak terjadi. Kebijakan pemerintah yang melarang mudik dan meniadakan cuti bersama untuk menekan penyebaran COVID-19 mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli mobil. Akibatnya, perjalanan darat dengan kendaraan pribadi pun berkurang drastis. Sementara itu, peningkatan penjualan pada Maret 2021 lebih dipengaruhi oleh

insentif PPnBM sebesar 0%, yang mendorong masyarakat memanfaatkan momentum untuk membeli mobil dengan harga lebih terjangkau (Grafik I.3.3).

Dampak Idulfitri 2022

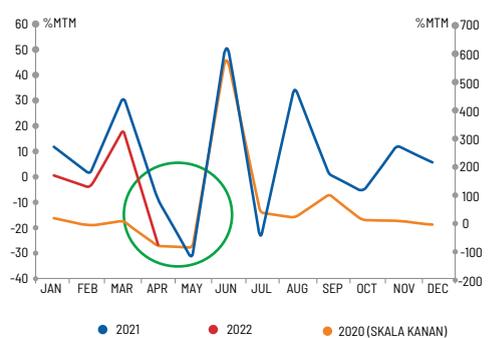
Menjelang HBKN Idulfitri 2022, Pemerintah melonggarkan aturan kapasitas, menetapkan cuti bersama yang lebih panjang, dan kembali memperbolehkan mudik. Kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan penjualan dan produksi mobil pada Maret 2022, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 21,23% (mtm) dan 19,23% (mtm). Preferensi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi selama mudik di tengah pandemi turut mendorong tren ini.

Namun, berbeda dengan kondisi sebelum pandemi, penjualan dan produksi mobil pada April 2022 mengalami penurunan dibandingkan Maret. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa distribusi mobil dari pabrikan ke *dealer* pada April 2022 turun sebesar 15,9% (mtm) menjadi 82.877 unit, lebih rendah dari 98.544 unit pada Maret (Grafik I.3.3).



Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik I.3.3 Historis Penjualan Mobil pada HBKN Periode Pandemi



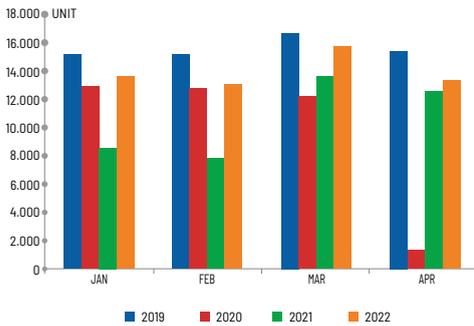
Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik I.3.4 Historis Produksi Mobil pada HBKN Periode Pandemi

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti berakhirnya relaksasi PPnBM 50% untuk mobil dengan harga Rp200-250 juta berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc. Selain itu, kinerja produksi selama Ramadan juga menurun, diperparah oleh kendala pasokan *chip* semikonduktor. Pada April 2022, produksi mobil mengalami penurunan sebesar 26,52% (mtm) dibandingkan Maret 2022 (Grafik I.3.4). Disrupsi rantai pasok semikonduktor global turut memengaruhi kinerja produsen mobil dalam negeri.

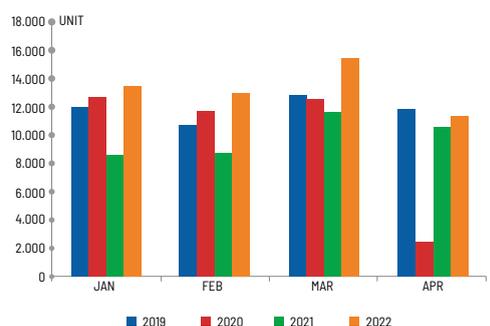
Tren Penjualan dan Produksi

Meskipun terjadi penurunan penjualan pada bulan April, penjualan mobil di DKI Jakarta selama Januari-April 2022 tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2021 (Grafik 1.3.5). Dari sisi produksi nasional, sepanjang Januari-April 2022, kinerja produksi mobil mencapai lebih dari 471 ribu unit, tumbuh 34,41% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan produksi pada 2019, sebelum pandemi COVID-19 (Grafik 1.3.6).



Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik 1.3.5 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta Periode Januari-April



Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik 1.3.6 Perkembangan Produksi Mobil Periode Januari-April

Untuk mendorong permintaan dan produksi kendaraan dalam negeri, pemerintah kembali memberikan insentif PPnBM pada 2022. Kebijakan PPnBM Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022. Insentif ini berlaku hingga September 2022, dengan skema potongan PPnBM 100% pada triwulan I, 66,66% pada triwulan II, dan 33,33% pada triwulan III. Khusus untuk kendaraan berjenis LCGC dengan nilai *minimum local purchase* 80%, potongan ini diberikan untuk mendukung produksi dan penjualan di pasar domestik.

Seperti yang dikatakan Winston Churchill, “*Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.*” Industri otomotif Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, dari pandemi hingga gangguan rantai pasok, namun tetap mampu bertahan dan beradaptasi. Dengan strategi yang tepat dan kebijakan yang adaptif, industri ini tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga semakin memperkuat posisinya di kancah nasional dan internasional.



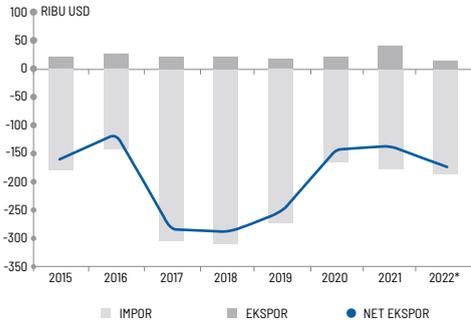
Foto: Tanjung Priok, Jakarta

04. Ekonomi Jakarta di Tengah Badai Geopolitik

INTISARI

- Bagaimana Jakarta menyesuaikan impor gandum akibat perang Rusia-Ukraina.
- Dampak ketegangan geopolitik terhadap ekspor Jakarta.
- Adaptasi Jakarta dalam mencari alternatif pemasok komoditas utama.
- Risiko dan peluang investasi di Jakarta di tengah situasi global.
- Tren perdagangan global dan dampaknya terhadap perekonomian daerah.

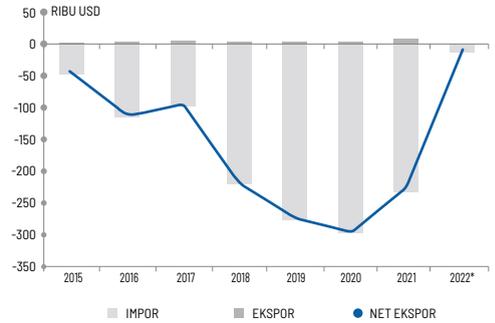
“In the midst of chaos, there is also opportunity” – Sun Tzu



*) s.d Juli 2022

Sumber: BI, diolah

Grafik 1.4.1 Nominal Impor Jakarta dari Rusia



*) s.d Juli 2022

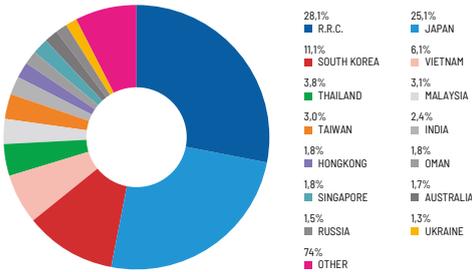
Sumber: BI, diolah

Grafik 1.4.2 Nominal Impor Jakarta dari Ukraina

Ketegangan geopolitik global, khususnya konflik yang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina, berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian DKI Jakarta melalui dampaknya terhadap jalur perdagangan internasional dan aliran investasi. Dari perspektif perdagangan global, Jakarta mengalami defisit dalam perdagangan dengan Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2021, ekspor dan impor dari Rusia masing-masing tercatat sebesar USD 40,7 juta dan USD 176,6 juta. Sementara itu, ekspor dan impor dari Ukraina mencapai USD 9,4 juta dan USD 233 juta.

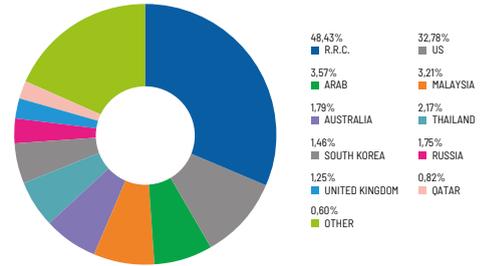
Setelah pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina, impor dari Ukraina ke Jakarta mengalami penurunan tajam. Hingga Juni 2022, nilai impor dari Ukraina hanya mencapai USD 10,8 juta—turun 68,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya impor gandum, komoditas yang menyumbang lebih dari 80% total impor Ukraina. Pada Juli 2022, impor gandum dari Ukraina hanya mencapai USD 2,2 juta, jauh lebih rendah dibandingkan USD 194,9 juta pada tahun 2021. Sebagai gantinya, impor gandum Jakarta dialihkan ke Argentina dan Brazil, yang mencatat peningkatan sebesar 473,9%, dengan nilai total impor mencapai USD 285,3 juta hingga Juli 2022.

Berbeda dengan impor dari Ukraina, impor dari Rusia justru menunjukkan peningkatan hingga Juni 2022, mencapai USD 186,1 juta, atau naik sebesar 162,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Komoditas utama yang diimpor dari Rusia adalah besi/baja dan aluminium, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil, masing-masing sebesar 1,5% dan 3,1%. Sebagai alternatif pemasok, beberapa negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Utara dapat menggantikan peran Rusia untuk besi/baja, sementara aluminium dapat disubstitusi dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.



Sumber: BI, diolah

Grafik I.4.3 Asal Negara Impor Besi/Baja

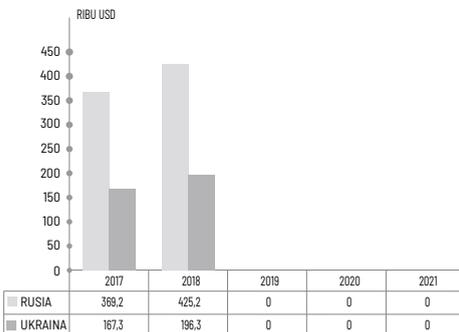


Sumber: BI, diolah

Grafik I.4.4 Asal Negara Impor Aluminium

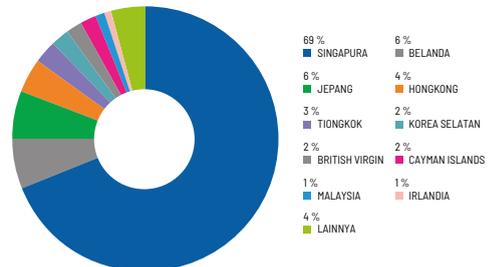
Dari sisi ekspor, hingga Juni 2022, ekspor Jakarta ke Rusia dan Ukraina menunjukkan tren penurunan masing-masing sebesar 24,7% dan 64,8%. Namun, pangsa ekspor Jakarta ke kedua negara tersebut relatif kecil—hanya 0,36% untuk Rusia dan 0,08% untuk Ukraina—sehingga dampak penurunannya tidak signifikan terhadap total ekspor DKI Jakarta. Bahkan secara keseluruhan, total ekspor DKI Jakarta masih mampu tumbuh 2,2% hingga pertengahan 2022.

Konflik geopolitik Rusia-Ukraina juga tidak memberikan dampak berarti terhadap investasi di DKI Jakarta. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dari Rusia dan Ukraina tergolong kecil dan terbatas pada sektor perdagangan dan reparasi. Pada periode 2019-2021, tidak ada realisasi investasi PMA dari kedua negara tersebut di Jakarta. Pada tahun 2021, investasi PMA di Jakarta didominasi oleh Singapura, dengan kontribusi mencapai 69%.



Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.4.5 PMA di Jakarta dari Negara Rusia dan Ukraina



Sumber: BKPM, diolah

Grafik I.4.6 Pangsa Negara Asal PMA ke Jakarta 2021

Di tengah situasi yang tidak menentu, seperti kata Sun Tzu, “*In the midst of chaos, there is also opportunity.*” Jakarta telah membuktikan bahwa ketidakpastian global merupakan kesempatan untuk bertransformasi. Ketika rantai pasok terganggu, Jakarta mampu beradaptasi dengan cepat, menemukan sumber baru, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.



Foto : Car Free Day, Benhil, Jakarta

05. Pulih Lebih Kuat

INTISARI

- Jakarta terus melanjutkan pemulihan ekonomi meski dihadapkan pada tantangan global.
- Pemerintah DKI Jakarta berperan aktif dalam mengatur kebijakan terkait acara publik dan mobilitas warga.
- Sektor jasa di Jakarta menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi penopang pemulihan ekonomi.
- Pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi.
- Digitalisasi dan ekonomi hijau menjadi fokus masa depan.

“Recovery is not just about bouncing back, it’s about bouncing forward with greater strength” – James Clear

Pada pagi hari yang cerah di Sudirman, Yani, seorang pemilik kedai kopi kecil, bercerita tentang bagaimana ia akhirnya melihat pelanggannya kembali memadati gerai setelah dua tahun dilanda pandemi. “Waktu PSBB pertama kali, saya hampir tutup. Tapi sekarang, meski tantangan baru seperti harga BBM naik, pelanggan mulai balik lagi. Harapannya bisa stabil, ya,” ujar Yani. Kisah ini adalah salah satu dari banyak cerita tentang pemulihan ekonomi Jakarta, yang secara perlahan mulai bangkit kembali seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional, ekonomi Jakarta pada triwulan III 2022 melanjutkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 5,94% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan triwulan sebelumnya, serta pertumbuhan ekonomi nasional (5,72% yoy). Pertumbuhan ini juga kembali mengikuti pola historis setelah dalam tiga triwulan sebelumnya tercatat lebih rendah dari rata-rata nasional. Dari sisi pengeluaran, perbaikan ekonomi DKI Jakarta terutama didorong oleh ekspor, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Dari sisi lapangan usaha, sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya menjadi tiga kontributor terbesar pada triwulan ini. Pemulihan ekonomi Jakarta juga diperkuat oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai acara yang diselenggarakan di kota ini (Gambar I.5.1), meskipun inflasi sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum pemulihan ekonomi ini harus terus dijaga agar dapat berlanjut di masa mendatang. Namun, berbagai fenomena domestik sepanjang tahun 2022 berpotensi menghambat kelanjutan pemulihan ekonomi. Dampak lanjutan (*second-round effect*) dari kenaikan harga BBM bersubsidi serta insiden terkait penyelenggaraan acara musik tertentu, yang memengaruhi minat pengunjung, menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 3 September 2022 diperkirakan berdampak tidak hanya pada inflasi, tetapi juga pada tingkat pendapatan, kemiskinan, dan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Penurunan daya beli ini dapat memengaruhi konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi hingga 26% terhadap perekonomian DKI Jakarta.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Ekspektasi Konsumen pada November 2022 turun menjadi 167,71 dari 168,86 pada bulan sebelumnya (Grafik I.5.1).

Penurunan ini sejalan dengan merosotnya indeks ekspektasi penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha enam bulan mendatang. Hal ini menunjukkan penurunan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dan inflasi.

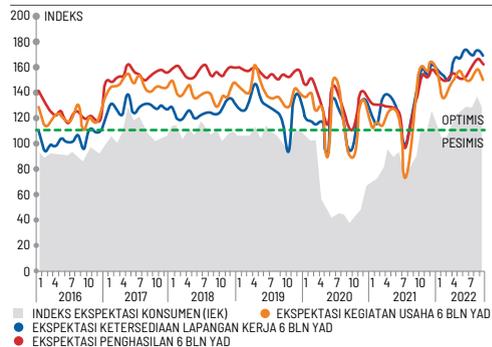


IIMS, 31 MAR-10 APR 2022 FORMULA-E, 4 JAN 2022 SIDE EVENT G20 BERBAGAI KONSER MUSIK

1. BNI JAVA JAZZ FESTIVAL (27-29 MEI 2022)
2. LOUIS TOMLINSON WORLD TOUR (10 JULI 2022)
3. EPIK HIGH IS HERE (16 JULI 2022)
4. THE BOYZ WORLD TOUR (9 JULI 2022)
5. WE THE FEST (23-25 SEPTEMBER 2022)
6. SARANGHAEYO INDONESIA (10 DESEMBER 2022) DLL

Sumber: Bl, diolah

Gambar I.5.1 Pelaksanaan Berbagai Event di DKI Jakarta 2022



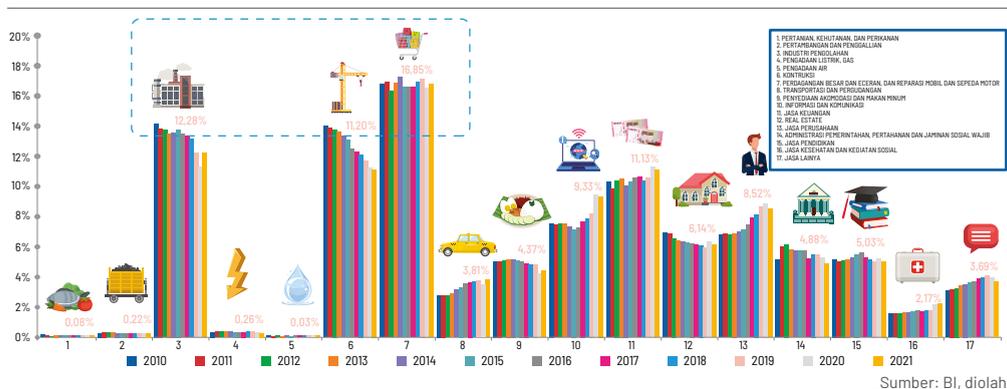
Sumber: Bl, diolah

Grafik I.5.1 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Komponennya

Selain itu, pelaksanaan acara musik dengan potensi kerumunan dan risiko keamanan juga menjadi perhatian. Tanpa kebijakan pengaturan yang tepat, risiko ini dapat menurunkan minat pengunjung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan batas maksimal kapasitas pengunjung sebesar 70% dan jam operasional mulai pukul 11.00 hingga 24.00 WIB. Penyelenggara konser juga diwajibkan mendapatkan surat rekomendasi dari Satgas COVID-19, tanda daftar pertunjukan temporer (TDPT), dan izin keramaian dari kepolisian. Mereka juga perlu mengatur alur masuk dan keluar penonton serta menerapkan sistem *Payment Gateway* untuk transaksi dan registrasi tiket. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengunjung sekaligus menjaga keamanan, kenyamanan, dan kesehatan, terutama dari potensi penyebaran COVID-19.

Selain kenaikan harga BBM dan penyelenggaraan acara besar, terdapat tren penurunan kontribusi sektor utama, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, dalam sepuluh tahun terakhir. Sebaliknya, beberapa sektor jasa seperti kesehatan, transportasi, dan pergudangan mengalami peningkatan (Grafik I.5.2). Bahkan, selama pandemi (2020–2021), sektor jasa seperti informasi dan komunikasi, kesehatan, serta transportasi dan pergudangan tumbuh signifikan dan menjadi penopang perekonomian.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi jangka panjang, diperlukan optimalisasi sektor-sektor yang ada dan pengembangan sektor baru. Berdasarkan beberapa indikator, seperti pangsa pasar, pertumbuhan, keterkaitan antar-sektor, dan potensi sektor progresif, beberapa sektor potensial yang dapat dikembangkan meliputi transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan-minuman, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan sosial (Tabel I.5.1).



Grafik I.5.2 Pangsa Sektor Ekonomi DKI Jakarta

Tabel I.5.1 Pemetaan Sektor Utama dan Potensial di DKI Jakarta

LAPANGAN USAHA	PANGSA UTAMA/ TERBESAR	PERTUMBUHAN DI ATAS RERATA	FL/BL	SEKTOR BASIS	SEKTOR PROGRESIF	PENGEMBANGAN SEKTOR
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan						
2. Pertambangan dan Penggalan						
3. Industri Pengolahan	•		•		•	Sektor Utama
4. Pengadaan Listrik dan Gas		•		•		
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
6. Konstruksi	•		•	•	•	Sektor Utama
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	•		•	•	•	Sektor Utama
8. Transportasi dan Pergudangan		•	•		•	Sektor Potensial
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				•	•	Sektor Potensial
10. Informasi dan Komunikasi	•	•	•	•	•	Sektor Utama
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	•	•	•	•	•	Sektor Utama
12. Real Estat				•		
13. Jasa Perusahaan				•		
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib				•		
15. Jasa Pendidikan				•	•	Sektor Potensial
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		•		•	•	Sektor Potensial
17. Jasa lainnya				•	•	

Sumber: Bank Indonesia, Universitas Indonesia

Adapun upaya menjaga pemulihan ekonomi DKI Jakarta mencakup:

1. Sinergi percepatan vaksinasi dan *booster* untuk mengantisipasi penyebaran varian baru COVID-19.
2. Pengendalian inflasi dan pengoptimalan sektor utama serta UMKM. Pengembangan UMKM diarahkan agar lebih terintegrasi dengan usaha besar untuk memperkuat rantai pasok.
3. Penguatan inovasi melalui akselerasi digitalisasi. Selain itu, inovasi kebijakan dan program ekonomi hijau perlu terus dikembangkan agar selaras dengan tren pembangunan berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi bukan sekadar tentang kembali ke kondisi semula, tetapi tentang membangun kembali dengan kekuatan dan ketahanan yang lebih baik. Seperti yang disampaikan James Clear dalam kutipan di awal, upaya pemulihan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga melangkah lebih maju dengan lebih kuat. Jika semua langkah dan strategi diterapkan dengan baik, optimisme pemulihan ekonomi DKI Jakarta akan terus berlanjut, meskipun tantangan global tetap harus diwaspadai.





Foto : Jalan Tol Lingkar Dalam Cawang-Grogol, Jakarta

06. Harmoni Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

INTISARI

- Kebijakan Bank Indonesia membentuk fondasi pemulihan ekonomi di Indonesia.
- Jakarta tampil sebagai lokomotif pertumbuhan meskipun menghadapi tantangan inflasi.
- Pelonggaran mobilitas memperkuat intermediasi perbankan di DKI Jakarta.
- Sinergi kebijakan antara BI dan pemerintah berperan penting menjaga stabilitas ekonomi Jakarta.

“Stability is not the absence of change, but the balance between change and constancy” – Albert Einstein

Suasana pasar uang bergejolak, begitu pula pikiran seorang pelaku pasar bernama Raka, yang setiap hari mengamati pergerakan Rupiah di layar monitornya. Ketika nilai tukar Rupiah anjlok pada Juli 2022, ia tahu bahwa gejolak ekonomi global kembali menghantui. “Semua orang bicara The Fed, tapi kita masih punya momentum di dalam negeri,” ujarnya. Keyakinan ini tumbuh saat Bank Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kestabilan.

Kerentanan ekonomi dan keuangan, baik global maupun domestik, mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Tekanan inflasi global semakin kuat seiring ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Meskipun upaya memperbaiki gangguan rantai pasok sudah dilakukan, hasilnya masih terbatas, sehingga memaksa sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS), untuk menerapkan kebijakan moneter ketat.

Pada Juli 2022, inflasi AS tercatat sebesar 8,5% (yoy). Walaupun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 9,1% (yoy) — tertinggi dalam lebih dari empat dekade — inflasi masih berada di level tinggi. Untuk mengendalikan inflasi tersebut, AS menaikkan suku bunga sebesar 225 bps sepanjang tahun 2022, hingga mencapai 2,5% pada Juli.

Pengetatan kebijakan moneter ini meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global, membatasi aliran modal asing, dan menekan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Juli 2022, terjadi arus keluar investasi portofolio sebesar 2,1 miliar dolar AS, dan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi. Tekanan inflasi domestik juga meningkat akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi global. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94% (yoy), naik dari bulan sebelumnya sebesar 4,35% (yoy).

Inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) melonjak hingga 11,47% (yoy), dipicu kenaikan harga pangan global dan gangguan pasokan. Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) mencapai 6,51% (yoy), didorong kenaikan tarif angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi. Meski demikian, inflasi inti masih terjaga di level 2,86% (yoy).

Respons Kebijakan

Menghadapi berbagai tantangan ini, Bank Indonesia merumuskan kebijakan secara hati-hati dan terukur, dengan fokus menjaga stabilitas harga serta sistem keuangan. Di tengah tren kenaikan suku bunga The Fed dan inflasi nasional, BI tidak serta-merta menaikkan suku

bunga acuan. Bank Indonesia memperkuat respons bauran kebijakan, dengan waspada terhadap risiko peningkatan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan.

BI akhirnya menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75% pada Agustus 2022. Kebijakan ini bersifat *pre-emptive* dan *forward-looking*, untuk mengantisipasi kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi serta harga pangan bergejolak. Langkah ini juga bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar tetap sesuai dengan fundamental ekonomi di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan penguatan ekonomi domestik.

Pengalaman dari krisis keuangan global 2008/09 menunjukkan pentingnya keseimbangan antara stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan. Sebelumnya, banyak bank sentral berfokus pada kerangka Inflation Targeting Framework (ITF) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, krisis 2008/09 mengajarkan bahwa fokus semata pada stabilitas harga dapat mengabaikan risiko dari keterkaitan antara sektor keuangan dan makroekonomi. Kebijakan bauran yang diterapkan BI hingga Agustus 2022 mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Tabel I.6.1.

Selain itu, BI juga memperkuat kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. BI mendorong pengembangan UMKM dan usaha syariah agar naik kelas melalui program pemberdayaan bagi individu berpenghasilan rendah. Kebijakan dan kelembagaan hijau turut diperkuat untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam inisiatif seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia (GBWI), guna mempercepat pemulihan ekonomi.

BI bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID). Program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga digalakkan sebagai bentuk respons terhadap tantangan inflasi.

Dampak Positif

Bauran kebijakan BI telah memberikan dampak positif dengan terjaganya stabilitas keuangan dan berlanjutnya pemulihan ekonomi hingga Agustus 2022. Di Provinsi DKI Jakarta, perbaikan intermediasi perbankan terlihat dari peningkatan kredit produktif dan terjaganya risiko kredit di level rendah. Pertumbuhan kredit yang kuat ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memadai, menunjukkan bahwa sektor

Tabel I.6.1 Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022 (s.d. Agustus 2022)

- a. Kebijakan moneter lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed), Melalui:
 - i. Mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum konvensional), BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) dan memberikan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan kewajiban GWM setelah memperhitungkan insentif bagi bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas UMKM dan/atau memenuhi target RPIM.
 - ii. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR.
 - iii. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.
 - iv. Melakukan pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil investasi portofolio SBN jangka pendek dan mendorong struktur yield SBN jangka panjang lebih landai, dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya dalam jangka menengah panjang.
 - v. Akselerasi pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai (hedging), dan fasilitas perdagangan-investasi antarnegara berupa:
 - Reformasi pengaturan pasar valuta asing.
 - Perluasan penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dengan melakukan sosialisasi kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna potensial lainnya, bekerjasama dengan instansi terkait
- b. Kebijakan makroprudensial akomodatif untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, melalui:
 - i. Meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan UMKM dan/atau memenuhi target RPIM mulai berlaku 1 September 2022.
 - ii. Memperkuat implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) terutama melalui pemenuhan komitmen bank terhadap target RPIM yang ditetapkan sesuai dengan keahlian dan model bisnis bank.
 - iii. Mempertahankan: (a) rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, (b) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022, serta (c) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.
 - iv. Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit sektor prioritas dan lainnya.
- c. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui:
 - i. Perluasan penggunaan QRIS melalui penyelenggaraan Pekan QRIS Nasional. Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp 5 Juta menjadi Rp 10 juta per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022.
 - ii. Memperluas QRIS antarnegara antara lain melalui akselerasi implementasi, piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) dengan negara-negara di Asi.
 - iii. Peningkatan peserta, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI-FAST untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien.
 - iv. Intensifikasi program elektronifikasi melalui (I) digitalisasi Bansos, (ii) elektronifikasi layanan Pemda khususnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), (iii) integrasi moda transportasi;
 - v. Menjamin ketersediaan Uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang.
 - vi. Mendorong kesiapan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) khususnya PJP first mover, dalam rangka implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) guna mendukung interlink antara perbankan dan fintech
 - vii. Meningkatkan batas nilai yang dapat disimpan pada uang elektronik registered dari Rp 10 juta menjadi Rp 20 juta dan batas nilai transaksi bulanan dari Rp 20 juta per bulan menjadi Rp 40 juta per bulan, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022
 - viii. Melanjutkan masa berlaku kebijakan batas minimal pembayaran dan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dari semula 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022 guna mendukung perkembangan transaksi Kartu Kredit dengan tetap menjaga risiko kredit.
 - x. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp 1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp 2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.
 - xi. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

perbankan memiliki likuiditas cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan korporasi dan UMKM seiring dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi pasca pelonggaran mobilitas.

Meski pembiayaan meningkat, ketahanan perbankan tetap kuat, tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah. Perekonomian DKI Jakarta menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II 2022, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun lalu. Meskipun inflasi di Jakarta pada Juli 2022 meningkat, namun angka tersebut tetap berada dalam kisaran target 3,50 (yoy), serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional (3,85% yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Seperti yang diungkapkan Albert Einstein, *“Stability is not the absence of change, but the balance between change and constancy.”* Langkah strategis Bank Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menyeimbangkan perubahan dengan kepastian dalam kebijakan ekonomi. Dengan sinergi kuat dan respons kebijakan yang tepat, Indonesia siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang untuk membangun ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.



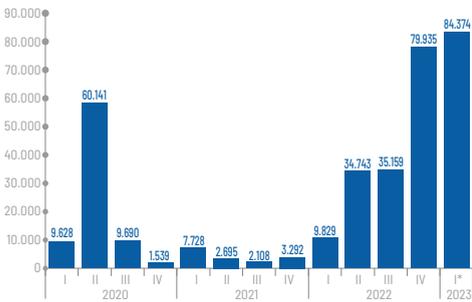


Foto : Fenomena layoff startup

07. Gelombang *Layoff Startup*

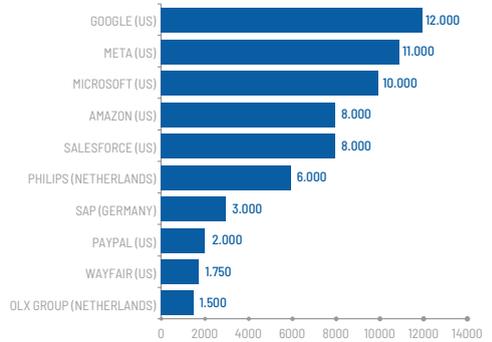
INTISARI

- Kebijakan perusahaan *startup* menghadapi ketidakpastian ekonomi membawa dampak luas terhadap tenaga kerja.
 - DKI Jakarta berada di jantung fenomena *layoff startup* dengan sektor pendidikan dan ritel menjadi sorotan utama.
 - Fenomena *layoff* di Jakarta memengaruhi pola investasi dan keberlanjutan bisnis *startup*.
 - Gelombang *layoff* membuka tantangan baru bagi ekosistem *startup* dalam menjaga efisiensi tanpa mengorbankan pertumbuhan.
 - Peran regulasi dalam memastikan hak karyawan *startup* yang terkena *layoff*
-



Sumber: Layoffs.fyi (data TW I s.d 31 Januari 2023), diolah

Grafik 1.7.1 Perkembangan Jumlah Karyawan Terdampak Layoff Startup Global



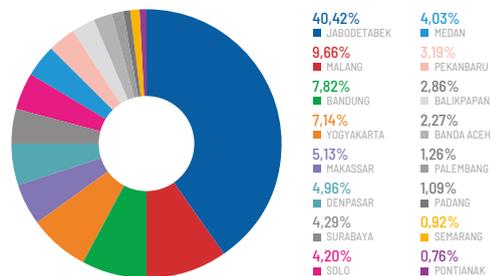
Sumber: Layoffs.fyi (data TW I s.d 31 Januari 2023), diolah

Grafik 1.7.2 Perusahaan Startup Global dengan Layoff Tertinggi

Suasana dunia *startup* saat ini penuh ketidakpastian. Bayu, seorang pengembang aplikasi di Jakarta, tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya akan terdampak oleh gelombang *layoff*. “Setiap hari datang ke kantor dengan rasa was-was, takut email selanjutnya adalah pemberitahuan *layoff*,” tuturnya. Sejak pandemi melanda, perusahaan tempatnya bekerja merampingkan tim, dan kondisi semakin sulit seiring dengan ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, Bayu merasa beruntung masih mendapatkan kompensasi dan dukungan karier setelah *layoff*.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang dunia usaha di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peningkatan ketidakpastian ekonomi global mendorong perusahaan rintisan (*startup*) untuk melakukan efisiensi model bisnis. Sejak awal pandemi tahun 2020, langkah efisiensi ini diwujudkan melalui perampingan tenaga kerja (*layoff*). Fenomena *layoff* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan tren global yang masih berlangsung hingga triwulan I 2023. Pada Januari 2023, Amerika Serikat mencatat pengurangan karyawan *startup* terbesar, dengan 12 ribu pegawai terkena dampaknya.

DKI Jakarta menjadi sorotan dalam fenomena ini, karena 40,42% *startup* Indonesia beroperasi di kawasan Jabodetabek, termasuk Jakarta. Pertumbuhan *startup* mendorong peningkatan kebutuhan SDM seiring dengan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. *Startup* di bidang perdagangan/ritel, transportasi, dan

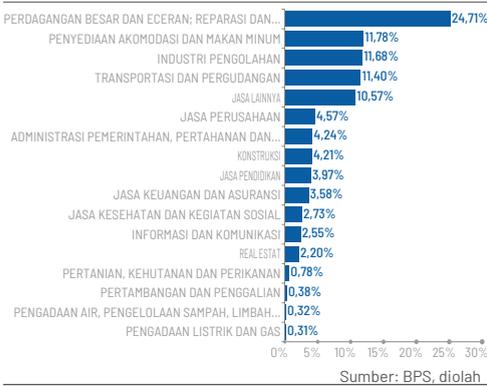


Sumber: BPS, diolah

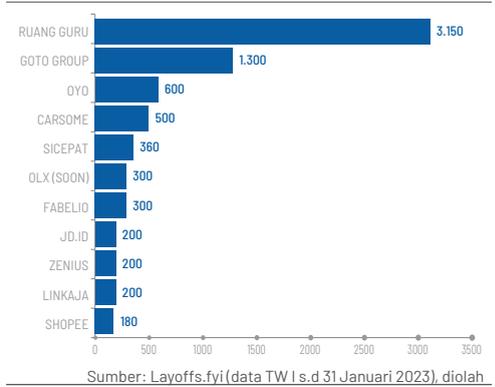
Grafik 1.7.3 Persebaran Lokasi Startup di Indonesia

Jakarta Bangkit dan Pulih

Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



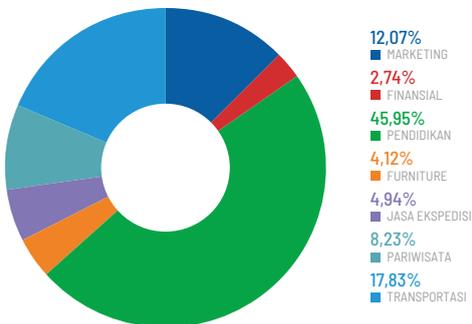
Grafik I.7.4 Pangsa Sektor Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi DKI Jakarta



Grafik I.7.5 Perusahaan Startup dengan Layoff Tertinggi di DKI Jakarta

penyediaan akomodasi serta makanan-minuman termasuk ke dalam lima sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di DKI Jakarta.

Berdasarkan sektor, *layoff startup* di Indonesia paling banyak terjadi di sektor ritel (12,5%), diikuti oleh sektor konsumen (12,4%), transportasi (10%), keuangan (8,1%), dan makanan (7%). Seluruh sektor tersebut merupakan sektor penyerap tenaga kerja signifikan di DKI Jakarta. Jumlah karyawan yang terdampak *layoff* terus meningkat. Pada Januari 2023, tercatat ada tambahan 1.290 karyawan terkena *layoff*, menyusul 2.125 karyawan pada tahun 2020 dan 6.824 karyawan pada 2021. Di antara perusahaan, Ruangguru menempati posisi teratas dengan *layoff* terbesar, mencapai 3.150 karyawan. Hal ini turut menjadikan sektor pendidikan sebagai sektor dengan *layoff* tertinggi di DKI Jakarta, menyumbang hingga 59% dari total karyawan *startup* terdampak.

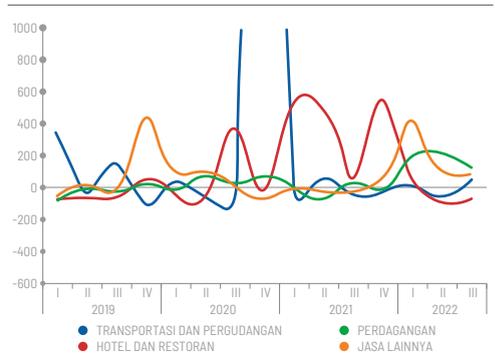


Grafik I.7.6 Pangsa Sektor Usaha Penyerapan Tenaga Kerja DKI Jakarta



Grafik I.7.7 Pangsa Jumlah Karyawan Layoff Startup terhadap Total Tenaga Kerja DKI Jakarta

Layoff tidak hanya memengaruhi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membawa potensi dampak negatif bagi investasi di Indonesia, terutama di DKI Jakarta. *Startup* umumnya memilih memiliki jumlah karyawan terbatas (kurang dari 50 orang) sebagai langkah efisiensi biaya. Selain itu, 90% investasi *startup* di Indonesia bersumber dari luar negeri, sehingga tren *layoff* turut berpotensi menurunkan Penanaman Modal Asing (PMA). Tren ini terlihat sejak triwulan II 2020, ketika lonjakan *layoff* beriringan dengan penurunan PMA. Dampak berlanjutnya *layoff* juga akan memengaruhi realisasi pembiayaan investasi *startup* ke Indonesia, mengurangi minat investor terhadap sektor ini.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik I.7.8 Perkembangan PMA DKI Jakarta

Meskipun *layoff* dilakukan sebagai langkah efisiensi bisnis, perusahaan tetap berusaha memenuhi kewajiban kepada karyawan terdampak sesuai dengan regulasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perburuhan, karyawan yang terkena *layoff* berhak atas kompensasi berupa asuransi kesehatan hingga tiga bulan serta pendampingan karier.

Meski *layoff* menjadi kenyataan pahit, kebijakan yang tepat dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa depan. Dengan sinergi antara pelaku bisnis dan Pemerintah, badai ini bisa menjadi kesempatan untuk bangkit lebih kokoh dari sebelumnya.



Foto : Logam Mulia

08. Kilau Emas di Balik Dinamika Ekonomi Jakarta

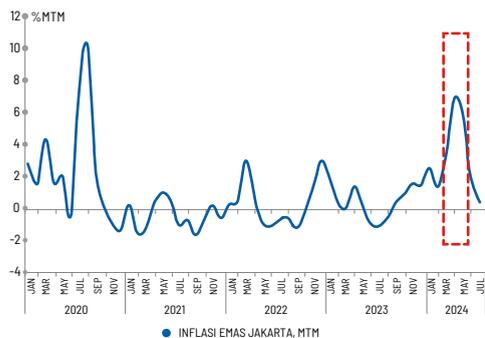
INTISARI

- Bagaimana perkembangan harga emas global memengaruhi inflasi di Jakarta.
- Apa saja faktor global yang berperan dalam kenaikan harga emas
- Mengapa bank sentral dunia meningkatkan cadangan emas mereka dan dampaknya bagi perekonomian Jakarta.
- Bagaimana ekspor emas Jakarta dapat mendukung perekonomian kota dan nasional.
- Apa strategi Jakarta dalam menghadapi tantangan ekonomi dan inflasi yang dipengaruhi harga komoditas global.

“Gold is a treasure, and he who possesses it does all he wishes to in this world” – Christopher Columbus

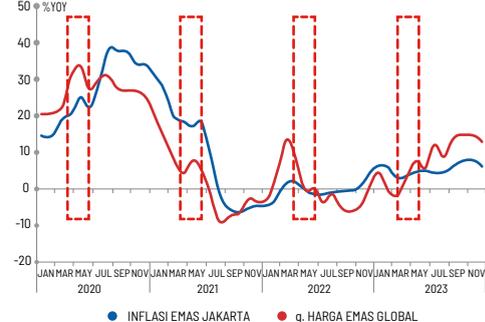
Pada Juli 2024, Dimas, seorang pedagang emas di Pasar Tanah Abang, melihat penjualan emas perhiasan meningkat pesat saat Idulfitri. Fenomena ini bukan hal baru baginya, karena setiap momen hari besar keagamaan (HBKN), harga dan permintaan emas cenderung melonjak. Meski demikian, ia juga menyadari bahwa dinamika harga emas global semakin memengaruhi harga di pasar lokal, termasuk inflasi di Jakarta. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana perekonomian Jakarta dan fluktuasi harga emas global saling terkait erat.

Jakarta berperan penting dalam perekonomian nasional, dengan pengaruh besarnya terhadap inflasi di Indonesia. Pada Juli 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jakarta mencatat inflasi sebesar 1,97% (yoy), terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,13% (yoy). Salah satu komoditas yang konsisten menyumbang inflasi di Jakarta adalah emas perhiasan, dengan andil 0,29% (yoy), sedikit lebih tinggi daripada kontribusinya secara nasional sebesar 0,27% (yoy). Lonjakan harga emas perhiasan sering kali terjadi pada momen seperti Idulfitri—seperti yang terlihat pada April 2024, saat inflasi emas perhiasan mencapai 7,02% (mtm) (Grafik I.8.1).



Sumber: BPS, diolah

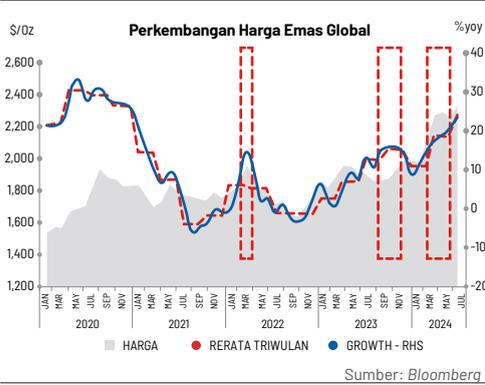
Grafik I.8.1 Inflasi Emas Perhiasan Jakarta (mtm)



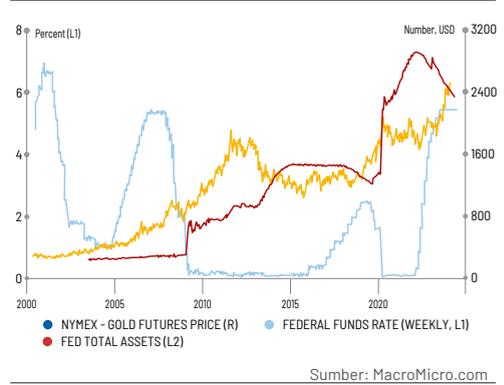
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.8.2 Perkembangan Inflasi Emas Perhiasan Jakarta dan Pertumbuhan Harga Emas Global (yoy)

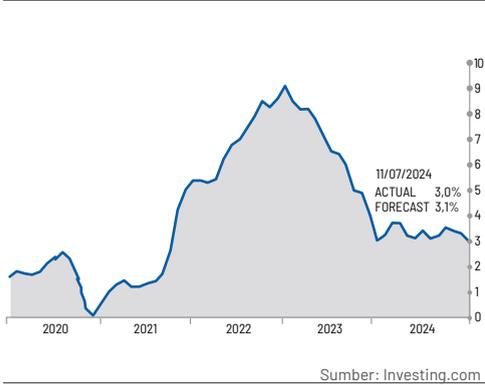
Pergerakan harga emas perhiasan di Jakarta sejalan dengan tren harga emas global. Berdasarkan uji korelasi, inflasi emas perhiasan di Jakarta memiliki hubungan kuat dengan pergerakan harga emas dunia, dengan korelasi sebesar 84,39%. Oleh karena itu, perkembangan harga emas global dan faktor-faktor yang memengaruhinya perlu terus dipantau guna memitigasi dampak potensial terhadap inflasi di Jakarta.



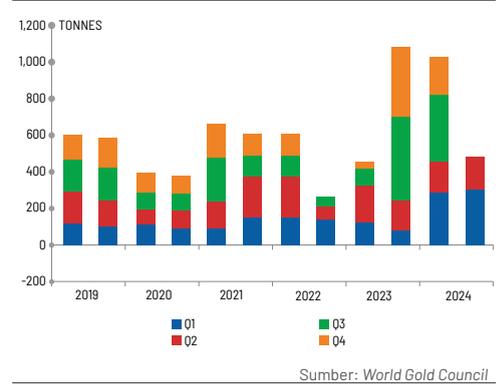
Grafik I.8.3 Perkembangan Harga Emas Global (yoy)



Grafik I.8.4 Perkembangan Harga Emas Global, FFR, dan Fed Total Assets



Grafik I.8.5 Perkembangan US CPI



Grafik I.8.6 Perkembangan Demand Emas oleh Central Bank Dunia

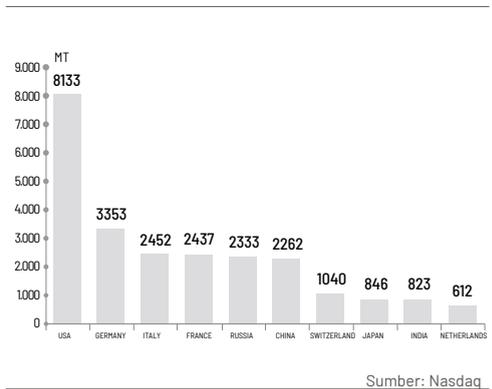
Faktor Penggerak

Sepanjang 2024, harga emas global mencapai level tertinggi baru, terutama dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik dan ekspektasi pemangkasan suku bunga. Pada Juli 2024, harga emas menyentuh USD 2.393/oz dan diproyeksikan mencapai USD 2.500/oz pada akhir tahun (Grafik I.8.4). Ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali sepanjang 2024 memperkuat tren kenaikan ini, meskipun proyeksi terkini menyebutkan bahwa pemangkasan hanya akan terjadi satu kali. Sinyal dari Federal Open Market Committee (FOMC) semakin kuat setelah Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat menurun sebesar 0,1%, berlawanan dengan ekspektasi sebelumnya yang memperkirakan kenaikan (Grafik I.8.5).

Selain faktor suku bunga, ketegangan geopolitik turut berperan dalam lonjakan harga emas global. Contoh terbaru termasuk invasi Rusia ke Ukraina (Maret 2022), serangan Israel ke Gaza (Oktober 2023), hingga eskalasi ketegangan Tiongkok dan Taiwan (Mei 2024) (Grafik 1.8.3). Emas sebagai aset *safe haven* tetap menjadi pilihan utama dalam kondisi ketidakpastian. Selain itu, bank sentral di berbagai negara juga meningkatkan pembelian emas, mendorong kenaikan harga. Pada kuartal kedua 2024, Turki menambah cadangan emas sebesar 12 ton, diikuti oleh Tiongkok dan India dengan masing-masing 10 dan 9 ton.

Peran Emas

Selain memengaruhi inflasi, emas perhiasan juga berperan signifikan dalam ekspor Jakarta. Pada triwulan II 2024, ekspor emas dan perhiasan berkontribusi sebesar 21,90% terhadap total ekspor Jakarta, menjadikannya komoditas unggulan (Tabel I.1.1). Permintaan global yang tinggi berdampak positif pada pertumbuhan ekspor, dengan peningkatan sebesar 135,67% (yoy) pada triwulan II 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 46,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.8.7). Negara seperti Singapura dan India menjadi tujuan utama ekspor perhiasan Jakarta, seiring dengan peningkatan cadangan emas oleh bank sentral kedua negara tersebut.



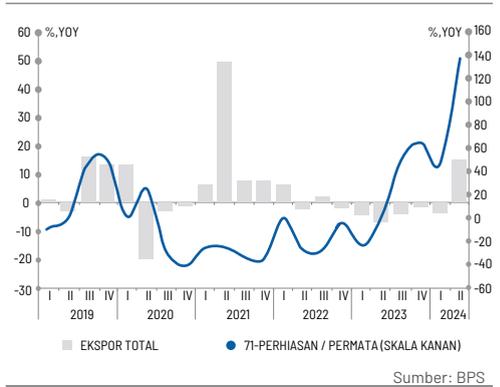
Grafik 1.8.7 Perkembangan Simpanan Cadangan Emas Bank Sentral Dunia

Tabel I.8.1 Pangsa Komoditas Ekspor Unggulan Jakarta Triwulan II 2024

Komoditas	Pangsa
Perhiasan/Permata	21,90%
Kendaraan dan Bagiannya	18,10%
Mesin dan Pesawat Mekanik	7,50%
Ikan dan Udang	7,34%
Lemak & Minyak Hewan/Nabati	5,80%
Berbagai Produk Kimia	3,20%

Sumber: BPS

Dalam ketidakpastian ekonomi global, emas tetap menjadi aset yang andal. Seperti kata Christopher Columbus, *“Gold is a treasure, and he who possesses it does all he wishes to in this world.”* Bagi Jakarta, memahami dinamika harga emas global tidak hanya soal menjaga kestabilan inflasi, tetapi juga memastikan peran kota ini tetap kuat dalam perekonomian nasional dan global.



Grafik I.8.8 Perkembangan Ekspor Perhiasan/Permata di Jakarta





Foto: Lembaran Uang Rupiah

Bab II

Menjaga Stabilitas Harga Demi Kesejahteraan Rakyat

Bab ini mengeksplorasi bagaimana Jakarta berhasil menjaga stabilitas harga di tengah tantangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Pengendalian inflasi menjadi fokus utama, mengingat dampak krisis menyebabkan gangguan rantai pasok dan potensi lonjakan harga pangan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan sektor swasta untuk mengatasi potensi inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi. Bab ini menyoroti berbagai kebijakan inovatif yang diterapkan, termasuk kampanye Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk memastikan suplai bahan pokok tetap stabil.

Selama pandemi, inflasi di Jakarta terkendali meskipun terjadi beberapa fluktuasi pada harga barang dan jasa tertentu. Kinerja inflasi yang stabil didukung oleh koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola stok pangan, memperkuat distribusi, dan memberikan subsidi pada sektor-sektor vital. Selain itu, kebijakan fiskal yang hati-hati dan transparansi informasi terkait harga pangan membantu menjaga ekspektasi inflasi di masyarakat.

Bab ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam pengendalian inflasi serta bagaimana inovasi teknologi, seperti pemantauan harga berbasis digital, berperan dalam mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat. Dalam jangka panjang, Jakarta berupaya meningkatkan kemandirian pangan melalui pengembangan ekosistem pertanian perkotaan dan kemitraan dengan daerah penghasil pangan. Stabilitas inflasi tidak hanya menjaga daya beli masyarakat tetapi juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.



Foto : Penjual Makanan Tradisional, Jakarta

01. Dari Medan Perang ke Pasar

INTISARI

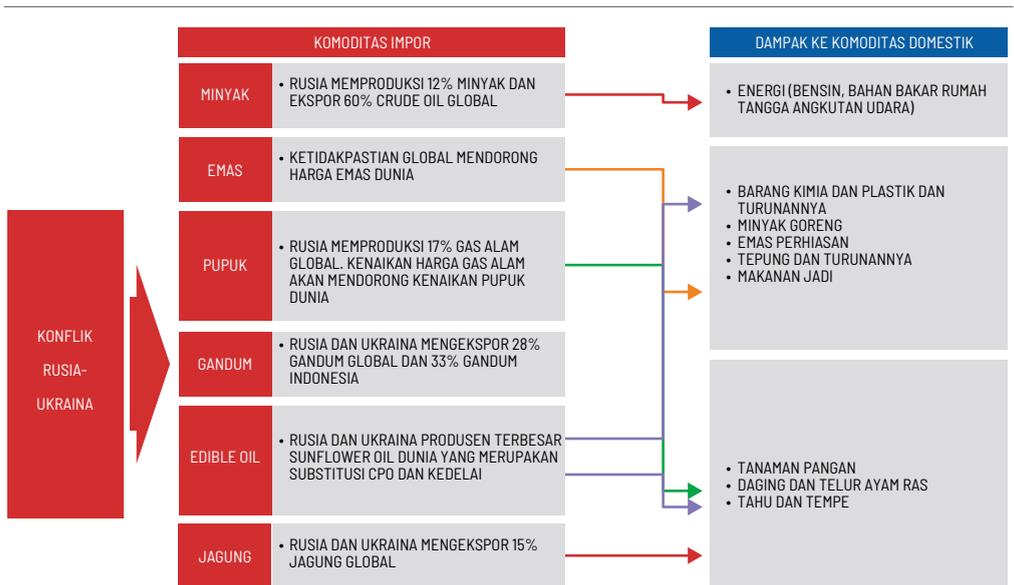
- Bagaimana ketegangan Rusia-Ukraina memengaruhi harga dan inflasi di Jakarta.
- Mengapa harga minyak dan energi global sangat berdampak pada ekonomi Jakarta.
- Bagaimana ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan energi memperumit situasi saat krisis.
- Bagaimana langkah Jakarta dalam menghadapi dampak ekonomi dari ketegangan geopolitik.

“In war, truth is the first casualty. But in economics, uncertainty follows close behind.” – Anonymous

Pada bulan Mei 2022, Angga, pemilik toko bahan pangan di Pasar Induk Kramat Jati, mulai khawatir dengan lonjakan harga sejumlah komoditas. Setiap kali memesan stok minyak goreng dan tepung, ia mendapati harga dari distributor naik lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Pelanggannya, terutama ibu rumah tangga, semakin sering mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok, terutama mie instan dan minyak goreng. Kondisi ini memaksanya untuk menyesuaikan harga jual, meski ia tahu dampaknya terhadap daya beli. “Kalau begini terus, lama-lama pelanggan bisa kabur,” ujarnya dengan nada cemas. Angga pun merasa dampak dari krisis yang jauh di Ukraina kini sangat nyata di Jakarta.

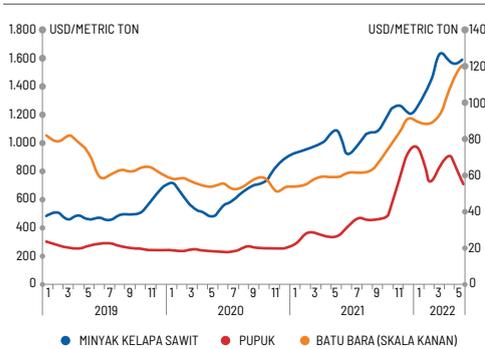
Konflik Rusia-Ukraina telah memicu ketidakpastian global, terutama melalui peningkatan harga komoditas penting seperti minyak, emas, pupuk, gandum, minyak nabati, dan jagung. Kenaikan harga komoditas global ini berdampak langsung pada harga domestik, termasuk minyak goreng, emas perhiasan, tepung dan turunannya, makanan olahan, serta komoditas energi seperti bensin, bahan bakar rumah tangga, dan avtur (Gambar II.1.1).

Rusia, sebagai produsen minyak terbesar ketiga di dunia, memenuhi sekitar 12% kebutuhan minyak global. Selain itu, Rusia merupakan produsen gas terbesar dan pemasok batu bara keenam dunia. Ketegangan geopolitik tersebut turut mendongkrak harga minyak, gas, dan batu bara di pasar internasional (Grafik II.1.1).



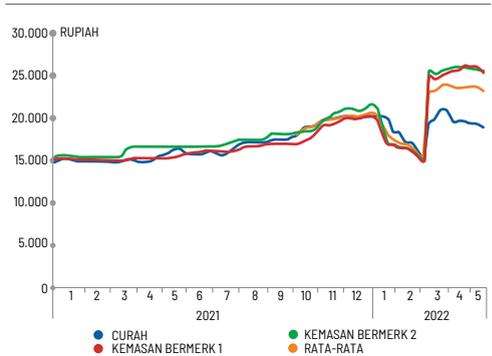
Sumber : Analisis Bank Indonesia

Gambar II.1.1 Alur Dampak Konflik Rusia - Ukraina



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik II.1.1 Perkembangan Harga Global Minyak Kelapa Sawit, Batu Bara, dan Pupuk



Sumber: BI, diolah

Grafik II.1.2 Perkembangan Harga Minyak Goreng Jakarta

Pada Mei 2022, harga minyak global jenis WTI dan minyak kelapa sawit mencatat kenaikan masing-masing sebesar 50% dan 32,21% dibandingkan harga pada Desember 2021, dan tren ini berlanjut dalam beberapa bulan berikutnya (Tabel II.1.1). Sejalan dengan perkembangan ini, harga minyak goreng di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan (Grafik II.1.2).

Pupuk dan Energi

Harga pupuk global mulai naik signifikan sejak akhir 2021, dengan kenaikan sebesar 113,24% (yoy) pada Mei 2022. Meski demikian, harga pupuk pada Mei 2022 lebih rendah 23,84% dibandingkan akhir 2021 (Tabel II.1.1). Indonesia mengimpor 15,75% kebutuhan pupuknya dari Rusia.

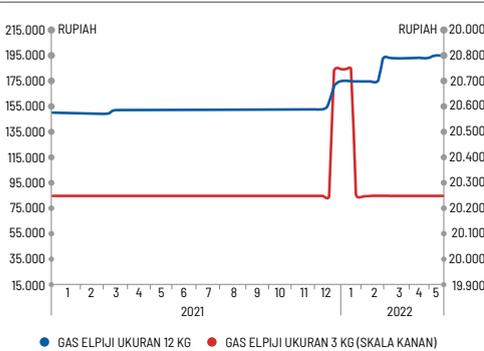
Selain itu, larangan ekspor Amonium Nitrat (AN)—bahan baku utama pupuk—berpotensi mempengaruhi produksi pangan dalam negeri.

Kenaikan harga energi juga berdampak pada harga bahan bakar rumah tangga (BBRT) di Jakarta, terutama untuk komoditas nonsubsidi. Harga gas elpiji 12 kg, misalnya, naik 22,83% pada Mei 2022 dibandingkan Desember 2021 (Grafik II.1.3).

Tabel II.1.1 Perubahan Harga Komoditas Global

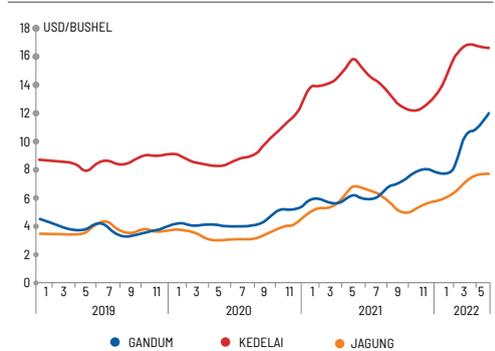
Komoditas	Harga			Perubahan Harga	
	May-21	Dec-21	May-22	%ytd	%yoy
Pupuk (USD/metric ton)	340,00	952,00	725,00	-23,84%	113,24%
Gandum (USD/bushel)	6,28	7,97	11,83	48,54%	88,39%
Kedelai (USD/bushel)	15,90	12,78	16,60	29,83%	4,37%
Jagung (USD/bushel)	6,84	5,78	7,73	33,45%	12,67%
Minyak WTI (USD/barel)	65,18	71,53	107,29	50,00%	64,61%
Minyak kelapa sawit (USD/metric ton)	1.097,27	1.208,35	1.597,60	32,21%	45,60%
Batu Bara (USD/metric ton)	59,70	92,13	120,80	31,13%	102,35%
Emas (USD/OZ)	1.853,01	1.793,02	1.844,51	2,87%	-0,46%

Sumber: Bloomberg, diolah



Sumber: BI, diolah

Grafik II.1.3 Perkembangan Harga Bahan Bakar Rumah Tangga Jakarta



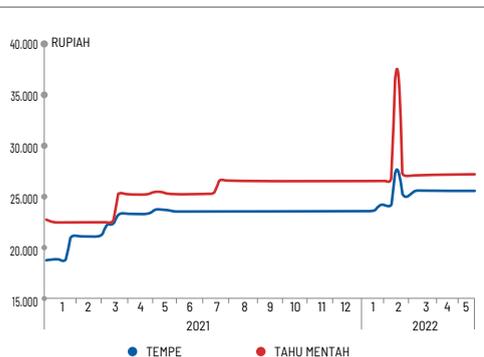
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik II.1.4 Perkembangan Harga Global Gandum, Kedelai dan Jagung

Gandum dan Kedelai

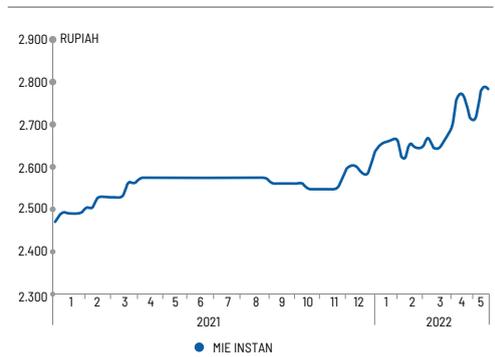
Rusia dan Ukraina memainkan peran vital dalam perdagangan pangan dunia. Keduanya memproduksi 60% minyak bunga matahari global dan menyumbang 28% ekspor gandum dunia. Bahkan, 33% kebutuhan gandum Indonesia dipenuhi dari kedua negara tersebut.

Pada Mei 2022, harga gandum global melonjak 88,39% (yoy), kedelai naik 4,37% (yoy), dan jagung naik 12,67% (yoy) (Grafik II.1.4). Kenaikan harga kedelai berdampak pada harga tahu dan tempe di Jakarta, mengingat 90% kebutuhan kedelai Indonesia berasal dari impor. Harga tahu dan tempe sempat meningkat tajam pada Februari 2022, namun kembali stabil beberapa bulan kemudian (Grafik II.1.5). Sebaliknya, harga mie instan—yang berbahan dasar gandum—terus meningkat sejak akhir 2021, sejalan dengan kenaikan harga gandum global (Grafik II.1.6).



Sumber: BI, diolah

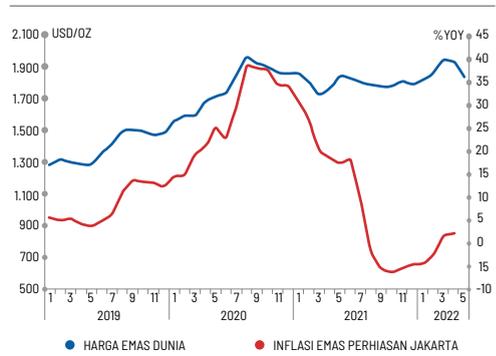
Grafik II.1.5 Perkembangan Harga Tempe dan Tahu Mentah Jakarta



Sumber: BI, diolah

Grafik II.1.6 Perkembangan Harga Mie Instan Jakarta

Emas perhiasan di Jakarta juga mengalami tren peningkatan harga, mengikuti pergerakan harga emas global. Inflasi emas perhiasan yang meningkat pada 2019 dan 2020 kembali menunjukkan tren serupa pada 2022. Pada April 2022, inflasi emas perhiasan tercatat sebesar 1,99% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahunan pada bulan sebelumnya sebesar 1,51% (yoy) (Grafik II.1.7).



Sumber: BPS, Bloomberg, diolah

Grafik II.1.7 Perkembangan Harga Emas Global dan Inflasi Emas Perhiasan Jakarta

Pada akhirnya, ketegangan antara Rusia dan Ukraina tidak hanya menciptakan gejolak di medan perang, tetapi juga memengaruhi ekonomi global dan harga komoditas penting bagi kehidupan sehari-hari. Seperti kata pepatah, *“In war, truth is the first casualty. But in economics, uncertainty follows close behind.”* Dalam ketidakpastian seperti ini, penting bagi Jakarta untuk terus memantau perkembangan global dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat. Dengan kebijakan yang responsif, Jakarta dapat meminimalkan dampak negatif dan menjaga kestabilan ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi di masa mendatang.





Foto: Aktivitas di Pom Bensin Jakarta

02. Mengendalikan Inflasi di Tengah Kenaikan Harga BBM

INTISARI

- Bagaimana kenaikan BBM memengaruhi inflasi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
- Langkah-langkah pemerintah DKI Jakarta dalam memitigasi dampak kenaikan BBM.
- Peran bantuan sosial dalam menjaga kesejahteraan warga berpenghasilan rendah di Jakarta.
- Pentingnya kerja sama antar daerah untuk mengamankan pasokan pangan.
- Strategi pemerintah dalam mengelola ekspektasi inflasi melalui kebijakan transportasi dan pangan.

“Adaptation is not a matter of choice but survival.”

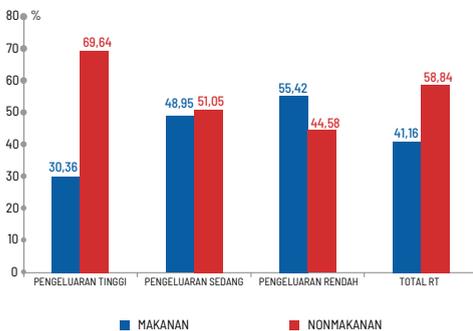
– Andrew Zolli

Pada awal September 2022, Taufik, seorang pengemudi ojek *online* di Jakarta, terkejut ketika harga bensin melonjak tiba-tiba. “Sekarang semakin berat buat narik,” ungkapnya sambil merapikan jaketnya. “Setiap hari, saya harus lebih pintar mengatur rute agar tetap untung.” Kenaikan harga BBM bukan hanya berdampak pada pekerja transportasi seperti Taufik, tetapi juga pada ekonomi Jakarta secara keseluruhan.

Tak heran, inflasi di DKI Jakarta mencapai 4,61% (yoy) pada September 2022, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui target inflasi sebesar 3%±1%. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pemerintah di awal bulan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya berimbas langsung pada kenaikan harga bensin dan solar, tetapi juga memicu inflasi di sektor transportasi, seperti angkutan dalam kota, serta pada komponen pangan bergejolak (*volatile food*) seperti makanan jadi.

Dampak kenaikan BBM terhadap harga pangan terasa karena sebagian besar pasokan pangan di Jakarta didatangkan dari luar kota. Secara langsung, kenaikan harga BBM diperkirakan memengaruhi inflasi sebesar 0,07% hingga 1,27%, sedangkan dampak tidak langsungnya diperkirakan sebesar 0,57% hingga 1,77%.

Selain mendorong inflasi, kenaikan harga BBM berpotensi memperburuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pola pengeluaran rumah tangga, kelompok berpenghasilan rendah di Jakarta memiliki proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk makanan dibandingkan kebutuhan nonmakanan (Grafik II.2.1). Karena itu, kenaikan harga pangan yang dipicu oleh kenaikan harga BBM akan semakin membebani kelompok ini. Setiap kenaikan inflasi sebesar 1% diperkirakan dapat meningkatkan kemiskinan sebesar 0,059%. Dengan kenaikan harga BBM pada September 2022, tingkat kemiskinan di Jakarta diperkirakan bertambah sebesar 0,11%, atau sekitar 11.000 jiwa.



Sumber: Susenas September 2017-2021, diolah

Grafik II.2.1 Pangsa Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS, diolah

Grafik II.2.2 Distribusi Pendapatan

Untuk menekan dampak tersebut dan mendorong pemerataan pendapatan, perlu upaya mengalokasikan pendapatan secara lebih efektif kepada 40% masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya melalui program bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran (Grafik II.2.2). Pemerintah pusat terus menyalurkan bansos untuk kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, dan Bantuan Subsidi Upah.

Program BPNT memberikan bantuan senilai Rp200 ribu per bulan per keluarga. Sementara itu, BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah masing-masing memberikan bantuan tunai sebesar Rp150 ribu dan Rp600 ribu per bulan untuk periode September hingga Desember 2022.

Untuk merespons dampak kenaikan BBM bersubsidi, TPID DKI Jakarta menggelar High-Level Meeting (HLM) pada awal September 2022, dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dan dihadiri anggota TPID serta Forkopimda (termasuk Pangdam Jaya). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menambah alokasi anggaran program pangan subsidi sebesar Rp56,37 miliar yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD. Program ini diharapkan menjangkau 1,1 juta penerima, atau sekitar 10% dari total penduduk DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga meningkatkan anggaran subsidi transportasi untuk menahan kenaikan tarif angkutan umum. Tambahan anggaran sebesar Rp62,1 miliar dialokasikan untuk Public Service Obligation (PSO) Transjakarta, sementara Rp4,25 miliar disalurkan untuk subsidi angkutan laut melalui Dinas Perhubungan. Tambahan subsidi ini juga diambil dari anggaran BTT. Kebijakan ini diproyeksikan dapat menekan inflasi sebesar 0,26% hingga 0,38%, sehingga total dampak kenaikan harga BBM, baik langsung maupun tidak langsung, diperkirakan sebesar 1,46% hingga 1,58%.

Beberapa langkah strategis telah ditempuh TPID DKI Jakarta untuk memitigasi dampak kenaikan harga BBM. Di antaranya adalah memastikan kelancaran pasokan pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta mengamankan distribusi. Pemprov juga aktif berkomunikasi, baik langsung maupun melalui media sosial, untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Pada jangka menengah, upaya mitigasi dapat mencakup perluasan ekosistem Transjakarta, peningkatan jaringan KAD dengan daerah surplus pangan, serta mendorong penggunaan motor listrik oleh ojek online untuk mengurangi ketergantungan pada BBM.

Pada akhirnya, kemampuan beradaptasi menjadi kunci bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM. Jakarta harus tanggap dengan setiap perubahan untuk tetap bertahan di tengah tantangan ekonomi. Seperti kata Andrew Zolli, *“Adaptation is not a matter of choice but survival.”*



Foto : Kawasan Pantai Maju, Jakarta Utara

03. Properti Jakarta Semakin Naik Daun

INTISARI

- Bagaimana kenaikan harga properti berdampak pada inflasi sewa rumah dan kontrak rumah di Jakarta.
- Peran pemulihan ekonomi dalam meningkatkan permintaan properti di Jakarta.
- Faktor-faktor yang memengaruhi harga properti dan sewa di Jakarta.
- Dampak sistem kerja hybrid terhadap sektor properti komersial.
- Keterkaitan antara inflasi bahan bangunan dan harga properti.

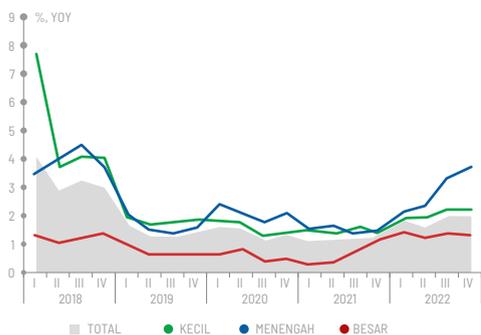
“Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world.” – Franklin D. Roosevelt

Dina, seorang ibu rumah tangga di Jakarta, sempat khawatir dengan rencana perpanjangan kontrak rumahnya di awal tahun 2022. “Setiap tahun, harga kontrakan naik. Mau pindah, tapi di mana-mana sama saja,” keluhnya. Situasi yang dihadapi Dina mencerminkan realitas banyak warga Jakarta, di mana sektor properti terus mengalami pergerakan signifikan, terutama di tengah pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, sektor properti menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Jakarta, berkontribusi sebesar 5,84% terhadap PDRB dan 0,13% terhadap pertumbuhan ekonomi kota ini. Seiring pemulihan, permintaan properti residensial dan komersial diperkirakan terus meningkat, mendorong harga properti semakin tinggi.

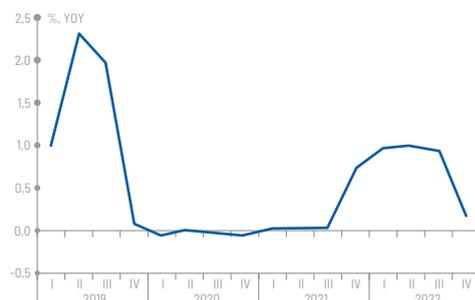
Peningkatan permintaan ini diprediksi turut mendorong kenaikan harga properti. Pada triwulan IV 2022, hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga rumah tapak tumbuh 2,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,98% (yoy). Berdasarkan tipe properti, kenaikan tertinggi terjadi pada rumah tipe menengah, dengan pertumbuhan mencapai 3,72% (yoy) (Grafik II.3.1).

Sementara itu, harga rumah tipe kecil dan besar tumbuh lebih lambat, meskipun nilainya masih cukup tinggi. Tren kenaikan harga properti ini terus berlangsung sejak pertengahan 2021 dan telah melampaui tingkat harga pra-pandemi (2019). Secara keseluruhan, pasar properti residensial menunjukkan pemulihan signifikan setelah sempat tertekan pada masa pandemi 2020-2021.



Sumber: BI, diolah

Grafik II.3.1 Perkembangan Harga Properti Residensial (Rumah Tapak) Jabodetabek-Banten



Sumber: BI, diolah

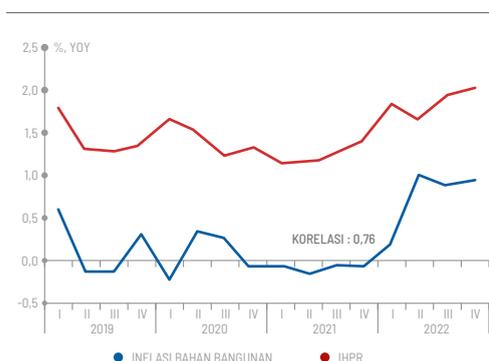
Grafik II.3.2 Perkembangan Harga Properti Komersial (Ruko, Gedung Kantor) Jabodetabek-Banten

Di sisi lain, pasar properti komersial, seperti ruko dan gedung kantor, justru mengalami perlambatan. Pada triwulan IV 2022, harga properti komersial hanya tumbuh 0,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,96% (yoy) (Grafik II.3.2). Penurunan permintaan terhadap properti komersial, terutama gedung perkantoran, disebabkan oleh penerapan sistem kerja hybrid yang mengurangi kebutuhan ruang kantor secara konvensional.

Kenaikan harga properti residensial juga dipengaruhi oleh inflasi bahan bangunan, termasuk komoditas seperti batu bata, pasir, semen, genteng, serta upah tukang. Inflasi bahan bangunan memiliki korelasi kuat dan positif (0,76) dengan kenaikan harga properti residensial. Setelah sempat mengalami deflasi pada tahun sebelumnya, inflasi bahan bangunan meningkat sebesar 0,22% (yoy) sejak awal 2022. Peningkatan ini sejalan dengan pemulihan harga properti yang mulai bangkit di awal tahun 2022.

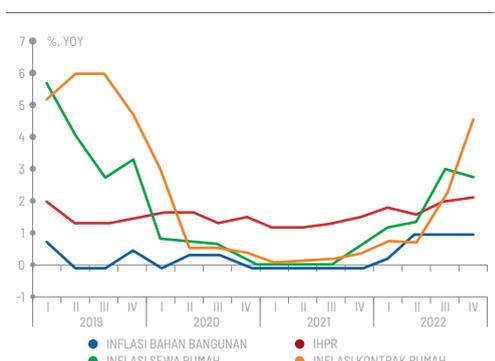
Kendati harga properti residensial meningkat, dampaknya terhadap inflasi sewa dan kontrak rumah di Jakarta relatif kecil. Pada triwulan IV 2022, inflasi sewa rumah tercatat sebesar 2,71% (yoy), sementara inflasi kontrak rumah mencapai 4,55% (yoy). Korelasi antara harga properti residensial dengan inflasi sewa dan kontrak rumah juga terbilang rendah, masing-masing sebesar 0,44 dan 0,24.

Demikian pula, dampak kenaikan harga bahan bangunan terhadap inflasi sewa dan kontrak rumah tidak signifikan. Korelasi antara keduanya berada pada angka rendah, yakni 0,43 untuk inflasi sewa rumah dan 0,13 untuk inflasi kontrak rumah.



Sumber: BPS dan BI, diolah

Grafik II.3.3 Harga Properti Residensial vs Inflasi Bahan Bangunan



Sumber: BI, diolah

Grafik II.3.4 Harga Properti Residensial vs Inflasi Sewa Rumah dan Kontrak Rumah

Kenaikan harga properti dan inflasi sewa rumah di Jakarta menunjukkan bahwa sektor ini terus mengalami dinamika, baik di tingkat residensial maupun komersial. Dalam situasi ini, keputusan bijak menjadi kunci bagi masyarakat dan investor. Seperti yang pernah dikatakan Franklin D. Roosevelt, *“Real estate cannot be lost or stolen, nor can it be carried away. Purchased with common sense, paid for in full, and managed with reasonable care, it is about the safest investment in the world.”*



Foto: Perumahan dengan Model yang Minimalis, Jakarta

04. Ketika Kontrak Rumah Hingga Upah ART Jadi Penentu

INTISARI

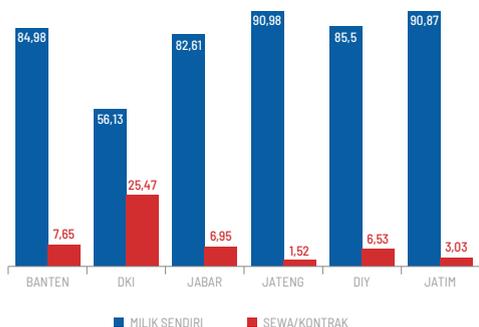
- Dinamika pasar properti di Jakarta dalam mempengaruhi inflasi.
- Bagaimana tren ekspatriat dan pelanggaran mobilitas memengaruhi sektor sewa rumah?
- Peran kebijakan dan ekonomi Jakarta dalam pengendalian inflasi nasional.
- Dampak RUU PPRT terhadap peningkatan upah ART di masa mendatang.
- Hubungan antara inflasi inti dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

“Every challenge contains the seeds of opportunity, but only those willing to nurture them will see them bloom.” – Heraclitus

Kisah seorang pasangan ekspatriat asal Eropa yang kembali ke Jakarta pada 2023 menggambarkan dinamika inflasi di ibu kota. Setelah tinggal di negaranya selama pandemi, mereka memutuskan menetap kembali di Jakarta karena adanya pelanggaran aturan kedatangan internasional. Kini, mereka mencari apartemen dengan fasilitas lengkap di pusat kota, seiring dengan banyak ekspatriat lainnya yang kembali dan memperkuat pasar properti di ibu kota. Peningkatan permintaan seperti ini berperan besar dalam mendorong inflasi, terutama pada kontrak dan sewa rumah.

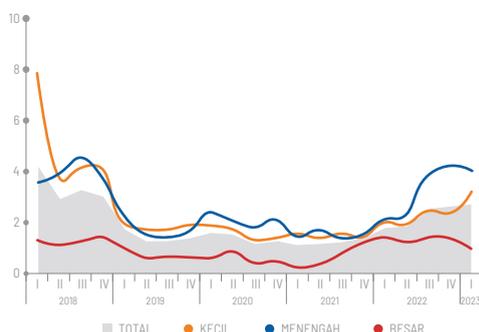
Dengan kontribusi sebesar 27,0% terhadap inflasi nasional, perkembangan inflasi di Jakarta memegang peranan penting dalam memengaruhi inflasi secara keseluruhan di Indonesia. Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi yang diterapkan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta perlu menjadi perhatian khusus. Sasaran inflasi yang ditargetkan semakin rendah pada 2024, yakni 2,5±1%, membutuhkan langkah konkret dan terukur. Selain mengendalikan inflasi pangan atau *volatile food*, setiap daerah juga harus memperhatikan komoditas-komoditas penyumbang inflasi inti dan administered prices.

Komposisi inflasi di Jakarta serupa dengan nasional, di mana inflasi inti menyumbang porsi terbesar, diikuti oleh administered prices dan *volatile food*. Berdasarkan data hingga April 2023, beberapa komoditas yang termasuk dalam inflasi inti menjadi penyumbang terbesar inflasi, yaitu kontrak rumah, sewa rumah, dan upah asisten rumah tangga (ART). Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan akibat pemulihan mobilitas dan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).



Sumber: BPS, diolah

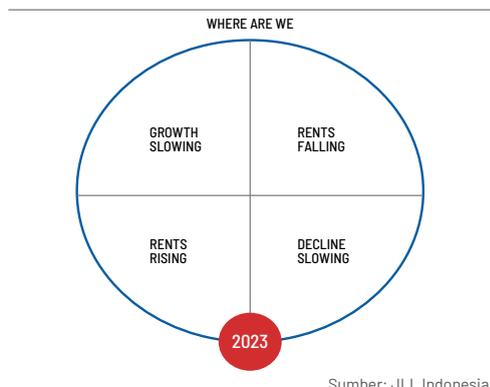
Grafik II.4.1 Status Kepemilikan Rumah Kontrak/Sewa dan Milik Sendiri



Sumber: SHPR Bank Indonesia, diolah

Grafik II.4.2 Perkembangan Harga Properti Residensial

Seiring dengan perbaikan ekonomi, permintaan masyarakat terhadap properti diproyeksikan terus meningkat, yang mendorong kenaikan harga kontrak dan sewa rumah. Inflasi pada kedua komoditas tersebut konsisten terjadi sejak pelonggaran mobilitas di Jakarta. Tingginya permintaan kontrak dan sewa rumah terlihat dari tingginya jumlah masyarakat yang memilih status kontrak dibandingkan wilayah lain di Jawa. Selain itu, kenaikan harga properti residensial di wilayah Jabodetabek dan Banten turut memperkuat tekanan inflasi, khususnya pada segmen kecil dan menengah.



Sumber: JLL Indonesia

Grafik II.4.3 Pasar Properti Kondominium di Wilayah Jakarta melambat

Ke depan, harga kontrak rumah diperkirakan akan terus naik seiring bertambahnya permintaan dari kalangan ekspatriat. Laporan Colliers International Indonesia menyebutkan bahwa pelonggaran aturan kedatangan dari luar negeri serta peningkatan aktivitas masyarakat dalam negeri telah memicu kembalinya ekspatriat sejak triwulan II 2022. Tren ini meningkatkan permintaan sewa apartemen dan rumah, terutama untuk masa sewa jangka panjang.

Selain properti, upah asisten rumah tangga (ART) juga mengalami tren inflasi sejak 2021 hingga April 2023. Namun, kenaikannya belum setinggi elastisitas pada 2019, ketika ada hubungan kuat antara kenaikan upah ART dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Peningkatan upah ART ini turut didorong oleh kebutuhan ART yang meningkat setelah pelonggaran mobilitas dan diberlakukannya kembali kebijakan WFO 100%. Permintaan ART biasanya memuncak pada periode Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri, yang turut menekan upah ke level lebih tinggi.

Tabel II.4.2 Elastisitas Kenaikan UMP dan Upah ART

	2019	2020	2021	2022	2023/Apr23*
Rata-rata kenaikan UMP (%yoy)	8,03	8,51	3,27	5,11	5,60
Inflasi Upah ART (%yoy)	2,21	0,09	0,48	1,97	3,95

Sumber : BPS, diolah

Tabel II.4.1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

No	Pokok Utama
1	Pelindungan terhadap PRT mengedepankan asas kekeluargaan
2	Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung
3	Penyalur PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum
4	Mengatur mengenai bagaimana pelindungan terhadap PRT dari diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan
5	Terkait bagaimana calon PRT mendapatkan pendidikan
6	Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT
7	Pengawasan terhadap penyelenggaraan PRT dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8	Hak antara PRT dan pemberi kerja. Hak yang dimaksud untuk PRT, seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati (hak untuk mendapatkan upah yang layak)

Pada 2023, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masuk dalam daftar prioritas prolegnas. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan upah ART lebih tinggi di masa mendatang. Dengan asumsi upah ART naik selaras dengan UMP, inflasi Jakarta diperkirakan akan terdorong sebesar +0,04% (yoy).

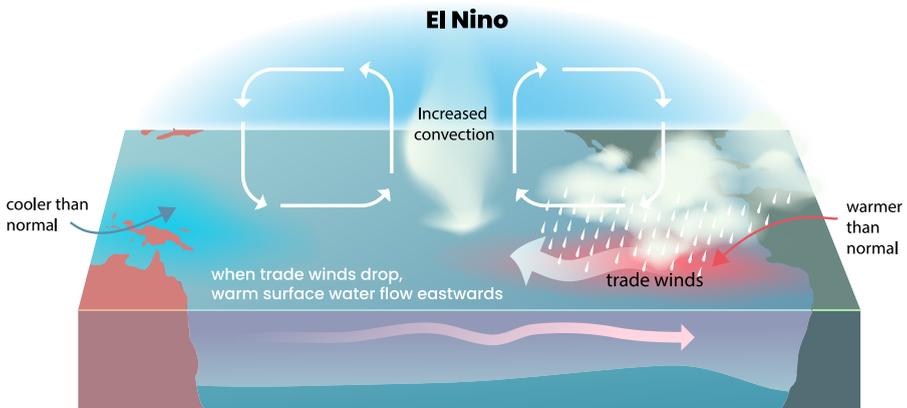


Foto : Petani sedang Mengawasi Padi

05. Saat El-Nino Mengguncang Pasar Pangan

INTISARI

- Dampak El-Nino terhadap sektor pangan dan pertanian di Jakarta.
- Bagaimana kebijakan TPID dan kerja sama antar daerah membantu menjaga kestabilan pasokan?
- Implikasi dari kebijakan proteksionisme India terhadap pasar beras di Jakarta.
- Tantangan yang dihadapi sektor peternakan akibat El-Nino dan upaya mitigasinya.
- Peran PT. Food Station dalam menjaga stabilitas harga pangan di ibu kota.



Gambar II.5.1 Ilustrasi Fenomena El-Nino

Budi, seorang peternak ayam, memandangi termometer di kandang ayamnya yang menunjukkan suhu 31 derajat Celsius. Ia menggelengkan kepala, khawatir akan produktivitas telur yang terus menurun selama beberapa pekan terakhir. Kekeringan berkepanjangan membuat suhu kandang meningkat, memicu *heat stress* pada ayam-ayamnya. Sementara itu, Wati, seorang pedagang beras, mengeluhkan harga yang semakin naik karena minimnya pasokan. Budi dan Wati adalah dua dari sekian banyak warga yang harus berjuang di tengah dampak El-Nino yang memengaruhi berbagai sektor ekonomi.

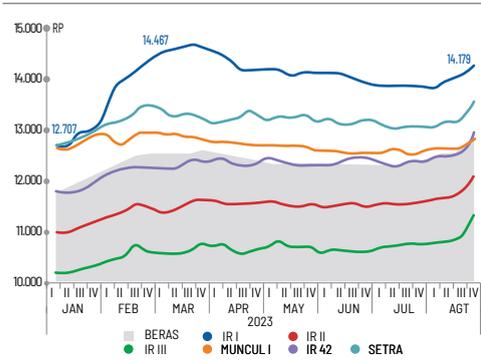
El-Nino merupakan fenomena iklim yang terjadi secara periodik, ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur di sekitar garis khatulistiwa. Fenomena ini dapat membawa dampak signifikan pada pola cuaca global, termasuk di Indonesia. Salah satu pengaruh utamanya adalah perubahan curah hujan yang berpotensi menimbulkan kekeringan di wilayah-wilayah tertentu.

Di Indonesia, terutama di sentra-sentra produksi pangan, berkurangnya curah hujan berdampak langsung pada penurunan hasil panen komoditas utama seperti beras, jagung, dan kedelai. Kondisi ini mengakibatkan penurunan pasokan dan mendorong kenaikan harga, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan inflasi. Saat ini, intensitas El-Nino berada pada level rendah, tetapi risiko lonjakan dampak tetap harus diantisipasi menjelang periode puncak pada Agustus hingga September.

Sejak Maret 2023, perkembangan harga beras mengindikasikan perubahan struktural yang bertahan di level tinggi, terutama untuk jenis IR 42. Kenaikan biaya produksi turut menjadi faktor pemicu lonjakan harga komoditas ini. Selain itu, risiko El-Nino dan Indian Ocean

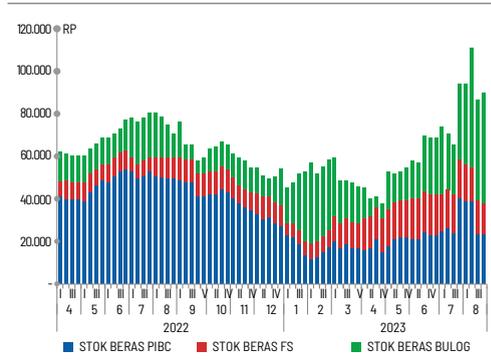
Menjaga Stabilitas Harga Demi Kesejahteraan Rakyat

Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan



Sumber: IPJ, diolah

Grafik II.5.1 Perkembangan Harga Beras



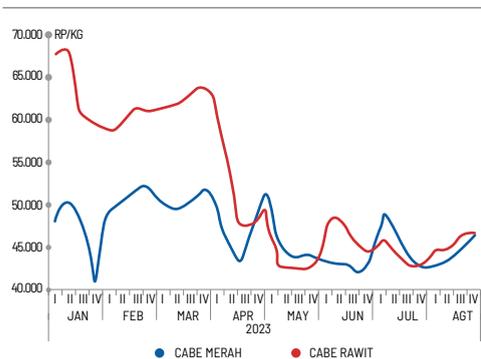
Sumber: Bulog, Food Station/PIBC, diolah

Grafik II.5.2 Perkembangan Stok Beras

Dipole (IOD) positif dapat memperbesar ancaman gagal panen, yang membuat harga Gabah Kering Panen (GKP) melonjak, memperparah tekanan harga beras di pasar.

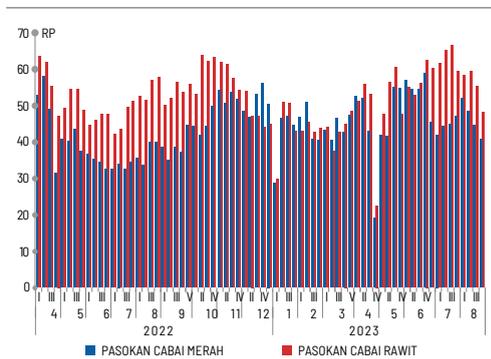
Di tingkat global, kebijakan proteksionisme India menambah tantangan. Pada 20 Juli 2023, India menghentikan ekspor beras non-basmati dan beras patah (*broken rice*) untuk menjaga ketahanan pangan domestik menghadapi El-Nino. Dengan pangsa lebih dari 40% pasar ekspor beras dunia, langkah ini berpotensi memicu kenaikan harga beras secara global, yang dampaknya turut dirasakan di Indonesia.

Tak hanya beras, El-Nino juga meningkatkan risiko serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), khususnya virus kuning yang menyerang tanaman hortikultura seperti cabai. Infeksi ini berpotensi menurunkan produksi hingga 75% selama musim kemarau, sehingga harga komoditas tersebut meroket. Selain itu, produktivitas sektor peternakan juga terpengaruh, sementara permintaan tetap tinggi.



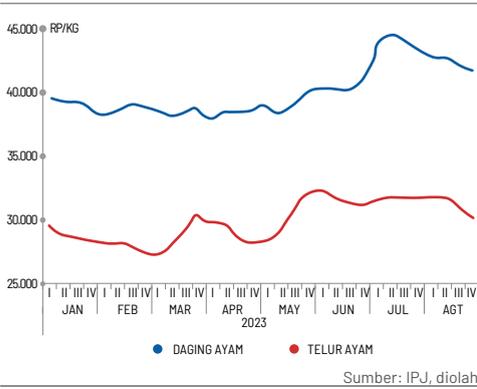
Sumber: IPJ, diolah

Grafik II.5.3 Perkembangan Harga Aneka Cabai



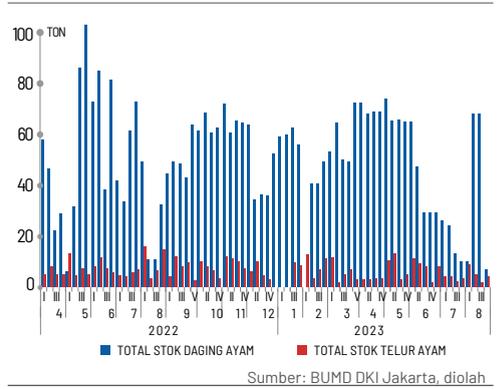
Sumber: BUMD DKI Jakarta, diolah

Grafik II.5.4 Perkembangan Stok Aneka Cabai



Sumber: IPJ, diolah

Grafik II.5.5 Perkembangan Harga Daging dan Telur Ayam Ras



Sumber: BUMD DKI Jakarta, diolah

Grafik II.5.6 Perkembangan Stok Daging dan Telur Ayam Ras

El-Nino berdampak langsung dan tidak langsung pada sektor peternakan. Secara langsung, suhu kandang yang melebihi 28 derajat Celsius memicu *heat stress* pada ayam, menurunkan produktivitas telur. Dampak tidak langsung terlihat dari penurunan produksi jagung, yang memerlukan pengairan konsisten selama siklus tanam. Cuaca kering mengakibatkan stres air pada tanaman jagung, menurunkan hasil panen dan meningkatkan harga pakan, sehingga biaya produksi ternak melonjak.

Mencermati perkembangan terkini dan risikoyang ada, TPIDDKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program strategis untuk memitigasi dampak El-nino. Sebagai upaya mendorong peningkatan produksi pertanian, Bank Indonesia telah menyalurkan bantuan alsintan kepada kelompok tani berupa peralatan aplikasi IoT dan saprotan. Dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, utamanya pada komoditas beras, BUMD Pangan DKI Jakarta memperluas kerjasama antar daerah (KAD) dengan berbagai wilayah sentra.

Sebagai pusat perdagangan beras dan pangan pokok serta sebagai instrumen pemerintah dalam pengendalian inflasi beras di DKI Jakarta, PT. Food Station telah melakukan pengamanan stok beras dengan terus memperbaiki ketersediaan pasokan melalui penambahan kapasitas gudang sd. 23.000 ton yang tersebar di beberapa wilayah dan menambah pengiriman stok beras dari sebelumnya dengan rata-rata 11.000 ton menjadi 18.058 ton.

Dengan sinergi dan kolaborasi TPID dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi tersebut, dampak El-nino diprakirakan dapat diminimalisir sehingga berkontribusi terhadap pencapaian inflasi sesuai sasaran $3\pm 1\%$ (yoy).



Foto: Bawang Merah

06. Pola Konsumsi, Inflasi, dan Strategi Menghadapi Tantangan ke Depan

INTISARI

- Bagaimana pola konsumsi baru memengaruhi inflasi di 2024.
- Tantangan dan peluang pengendalian inflasi di Jakarta melalui kerja sama lintas daerah.
- Dampak perubahan komoditas dalam SBH 2022 pada tren konsumsi di Jakarta.
- Strategi pemerintah dalam menjaga inflasi pangan di tengah gejala global.
- Dinamika konsumsi di Indonesia dengan munculnya komoditas-komoditas baru.

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” – Albert Einstein

Pada awal tahun 2024, Fauzi, seorang pedagang grosir di pasar induk Kramat Jati, Jakarta, mengeluhkan pasokan beras yang terganggu. “Biasanya awal tahun kami sudah siap untuk panen, tapi sekarang harus menunggu sampai April,” ujarnya sambil menunjukkan gudangnya yang setengah kosong. Dampak El-Nino menyebabkan mundurnya masa panen, mempengaruhi harga pangan dan daya beli masyarakat, terutama di kota besar seperti Jakarta. Perubahan ini mencerminkan bahwa inflasi bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Target inflasi pada 2024 ditetapkan lebih rendah, yaitu $2,5\pm 1\%$. Namun, ketegangan geopolitik, termasuk konflik di Laut Merah, mengancam kelancaran alur perdagangan global dan meningkatkan biaya distribusi. Pada saat yang sama, perubahan cuaca menunda panen raya, memberikan tantangan tambahan bagi sektor pangan.

Mulai Januari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 sebagai dasar perhitungan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), menggantikan SBH 2018. Pembaruan ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perkembangan teknologi, perubahan perilaku, dan peningkatan pendapatan, serta dinamika jenis barang dan jasa. Perubahan ini juga berdampak pada cakupan wilayah, sampel, dan komoditas yang digunakan dalam perhitungan.

SBH 2022 memperluas cakupan wilayah ke area pedesaan (rural area) untuk mengurangi bias perkotaan dalam penghitungan konsumsi rumah tangga. Pada tingkat nasional, jumlah kota yang terlibat dalam penghitungan inflasi bertambah sebanyak 60 kabupaten/kota, terutama di wilayah timur Indonesia. Selain itu, jumlah komoditas meningkat dari 835 menjadi 847 jenis. Berdasarkan hasil SBH 2022, DKI Jakarta tetap menempati peringkat pertama dengan nilai konsumsi tinggi, yaitu Rp14.884.110 per bulan.

Di Jakarta, pembaruan SBH 2022 mengubah paket komoditas dari 473 menjadi 479 jenis. Dari jumlah ini, 452 komoditas tetap dipertahankan, sementara 27 komoditas baru ditambahkan dan 21 komoditas lama dihapus. Komoditas yang dihilangkan meliputi beberapa jenis kerupuk, ikan asin, majalah berkala, surat kabar harian, dan VCD/DVD player.

Sementara itu, beberapa komoditas baru yang masuk dalam paket, seperti tarif LRT/MRT (kelompok administered price/AP), serta CCTV, masker, hand sanitizer, dan receiver TV (kelompok inti), mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pergeseran



Sumber : BPS, sesuai Materi Sosialisasi Hasil SBH Tahun 2022

Gambar II.6.1 Bobot Nilai Konsumsi Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan

ini terlihat dalam pangsa konsumsi kelompok makanan yang turun menjadi 18,66%, sedangkan konsumsi restoran naik menjadi 9,90% (Gambar II.6.1).

Perubahan juga terjadi pada komoditas dengan bobot terbesar dalam SBH 2022. Sepuluh komoditas utama meliputi: Tarif Listrik, Kontrak Rumah, Bensin, Sewa Rumah, Nasi dengan Lauk, Biaya Langganan Internet, Akademi/Perguruan Tinggi, Upah ART, Tarif Pulsa Ponsel, dan Tarif PAM.

Selain komoditas pangan, inflasi pada komoditas nonmakanan juga menjadi fokus penting, terutama selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), tahun ajaran baru, dan dinamika harga energi global. Kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah harus terus dipantau untuk menjaga kestabilan.

Untuk mengatasi tantangan ini, sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diperkuat guna mengantisipasi dampak eksternal dan mengelola dinamika inflasi nonmakanan. Pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan juga penting agar tidak terjadi dampak lanjutan pada harga makanan jadi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta berhasil meraih penghargaan TPID Award 2022 sebagai TPID tingkat provinsi terbaik dalam menjaga laju inflasi di wilayah Jawa-Bali sepanjang 2022. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada 31 Agustus 2023.

Keberhasilan pengendalian inflasi DKI Jakarta tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemprov DKI Jakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya. Dukungan para pemangku kepentingan lainnya juga turut berperan dalam menjaga kestabilan harga di ibu kota.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi, TPID Jakarta mengimplementasikan sejumlah program unggulan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan melalui Reaktivasi Program Pangan Bersubsidi. Program ini dipilih karena memiliki fondasi kuat dan telah dilaksanakan sejak akhir 2016 hingga April 2020.

Selama pandemi, program pangan bersubsidi diubah menjadi bantuan sosial dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai hingga pertengahan 2021. Ketika pandemi mulai terkendali dan level PPKM menurun, program pangan bersubsidi kembali diaktifkan pada akhir 2021. Pada 2022, program ini diperkuat dengan penambahan jumlah penerima manfaat untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kenaikan BBM yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Penguatan Kerja Sama

Reaktivasi program pangan bersubsidi membutuhkan dukungan pasokan pangan dari daerah sentra produksi. Jakarta, yang merupakan kota konsumen dengan 98% kebutuhan pangannya bergantung pada pasokan dari luar, harus menjalin kerja sama antardaerah (KAD) untuk memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga. Pada 2022, program pangan bersubsidi berhasil menjangkau sekitar 1,13 juta penerima manfaat, membantu mengurangi tekanan permintaan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi konsumen, kerja sama dengan daerah produsen memberikan efek berganda pada perekonomian daerah. Petani dan pelaku usaha di sentra produksi mendapat kepastian permintaan, pemasaran yang lebih luas, serta stabilitas harga yang mengurangi risiko fluktuasi pasar. Program ini juga memicu pergerakan ekonomi, mulai dari distribusi hingga aktivitas pedagang eceran.

BUMD seperti Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya berperan aktif dalam program ini. Dharma Jaya dan Food Station menyediakan komoditas bersubsidi, sementara Pasar Jaya mengelola 311 lokasi distribusi yang tersebar di seluruh Jakarta, termasuk pasar, rumah susun, dan RPTRA. Bank DKI turut mendukung dengan menyediakan sistem pembayaran nontunai bagi penerima manfaat.

Program pangan bersubsidi mencakup enam komoditas utama: beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung, dan susu UHT. Pemilihan komoditas ini mempertimbangkan kontribusinya terhadap inflasi dan Garis Kemiskinan. Pada Januari 2022, beras menjadi komoditas dengan kontribusi tertinggi terhadap inflasi (2,12%), diikuti daging ayam (1,37%), dan telur ayam (0,59%). Sementara itu, data BPS menunjukkan beras menyumbang 12,28% terhadap Garis Kemiskinan, diikuti daging ayam (5,99%) dan telur ayam (4,24%).

Dengan menekan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat, program pangan bersubsidi berkontribusi pada inflasi Jakarta yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga tetap kuat, menjadi penopang utama stabilitas ekonomi ibu kota.

Penguatan dan Inovasi

Pemprov DKI Jakarta dan BUMD Pangan terus memperluas cakupan kerja sama melalui skema *contract farming*, *on-farm*, dan maklon untuk menjaga pasokan pangan strategis. Kerja sama ini tidak hanya memastikan pemenuhan kebutuhan Jakarta, tetapi juga memberikan manfaat bagi daerah produsen, seperti transfer teknologi, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Program pangan bersubsidi juga akan diperkuat melalui perbaikan pendataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, penambahan titik distribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memangkas rantai distribusi, menjaga kestabilan harga, dan mengurangi tekanan dari sisi permintaan.

Atas kinerja pengendalian inflasi yang konsisten, TPID Jakarta tidak hanya meraih TPID Award 2022, tetapi juga menerima insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri untuk periode I dan II tahun 2023. Pemberian insentif ini berdasarkan penilaian atas pelaksanaan pengendalian inflasi, kepatuhan penyampaian laporan harian, serta stabilitas harga pangan. Dana insentif ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi risiko inflasi dan ketidakpastian global pada akhir 2023 dan 2024.

Seperti kata Vincent van Gogh, pencapaian besar berasal dari hal-hal kecil yang dijalankan bersama. Program pangan bersubsidi Jakarta adalah bukti bahwa kerja sama dan sinergi

yang kuat dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan ekonomi. Melalui inovasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Jakarta optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di masa depan.

Sinergi antardaerah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan, khususnya menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2024, perlu diperkuat. Peran BUMD dan kerja sama antar daerah dengan wilayah surplus harus terus diekstensifikasi untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan.

Seperti kata Einstein, *"Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving."* Di tengah ketidakpastian global dan perubahan pola konsumsi, strategi pengendalian inflasi harus terus bergerak dan beradaptasi. Melalui sinergi TPID, kerja sama antar daerah, dan kebijakan yang responsif terhadap tren konsumsi baru, Jakarta dapat menjaga stabilitas dan menemukan peluang bahkan di tengah tantangan yang ada.



Bab III

Digitalisasi Fondasi Keuangan yang Inklusif

Bab ini menyoroti bagaimana digitalisasi sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan menjadi katalisator pemulihan ekonomi Jakarta. Transformasi digital menjadi agenda utama selama pandemi, ketika interaksi fisik terbatas dan kebutuhan akan transaksi nontunai meningkat drastis. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan mempercepat adopsi layanan digital, termasuk *e-wallet* dan sistem pembayaran berbasis QRIS, untuk mendukung transaksi yang aman dan efisien.

Selain itu, bab ini menggambarkan bagaimana stabilitas sistem keuangan dipertahankan melalui kebijakan makroprudensial yang tepat, termasuk pengawasan ketat terhadap perbankan dan akselerasi pinjaman kepada UMKM. Program inklusi keuangan juga menjadi sorotan, dengan fokus pada perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil. Upaya ini dilakukan melalui inisiatif seperti kredit mikro dan pembinaan UMKM agar lebih terintegrasi dalam ekosistem digital.

Bab ini juga membahas risiko yang dihadapi sektor keuangan selama pandemi, seperti peningkatan kredit bermasalah dan potensi likuiditas yang ketat. Namun, melalui sinergi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah, sistem keuangan Jakarta tetap tangguh. Digitalisasi dan inklusi keuangan terbukti meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Di masa depan, penguatan ekosistem digital dan inovasi layanan keuangan akan terus didorong untuk memastikan inklusi yang lebih luas. Bab ini menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dan adaptabilitas sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh warga Jakarta.



Foto : Pembayaran digital pengguna MRT, Jakarta

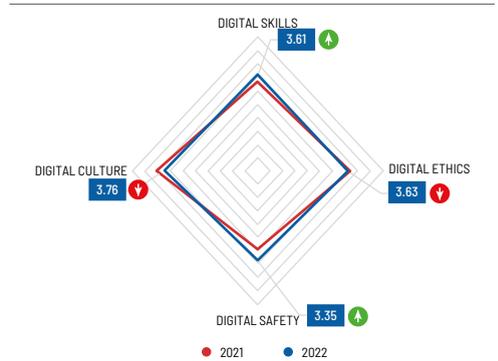
01. Jakarta Menari di Era Digital

INTISARI

- Bagaimana Jakarta memanfaatkan transformasi digital untuk mendukung pembangunan kota.
- Kolaborasi lintas instansi mempercepat digitalisasi layanan publik di Jakarta.
- Pelajaran penting dari proses digitalisasi yang bisa diterapkan di kota lain.
- Inovasi pembayaran digital memperkuat ekosistem transportasi dan pasar di Jakarta.
- Tantangan dan strategi ke depan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat.

“The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance” – Alan Watts

Pada suatu pagi di salah satu pasar tradisional di Jakarta, Ibu Ani, seorang pedagang sayur, dengan bangga menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran dari pelanggannya. “Sekarang lebih mudah, nggak perlu ribet sama uang kembalian,” ujarnya. Transformasi kecil ini mencerminkan perubahan besar yang sedang berlangsung di Jakarta—kota yang bergerak menuju masa depan digital, memadukan inovasi teknologi dengan budaya setempat. Dari transaksi harian hingga integrasi layanan publik, Jakarta terus berbenah untuk menjadi kota global yang modern dan inklusif.



Sumber: Kominfo :<https://survei.literasidigital.id>
 Grafik III.1.1 Indeks Literasi Digital

Perekonomian Jakarta terus tumbuh tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah transformasi digital, yang didukung oleh peningkatan sektor Informasi dan Komunikasi. Digitalisasi berperan sebagai katalis pemulihan ekonomi dengan mendorong produktivitas, menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi biaya produksi, dan memperluas perdagangan lintas negara.

DKI Jakarta berkomitmen untuk bertransformasi menjadi Kota Global dengan semangat “Sukses Jakarta untuk Indonesia.” Upaya ini diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang efektif dan efisien, dukungan terhadap pemerataan pembangunan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan misi tersebut.

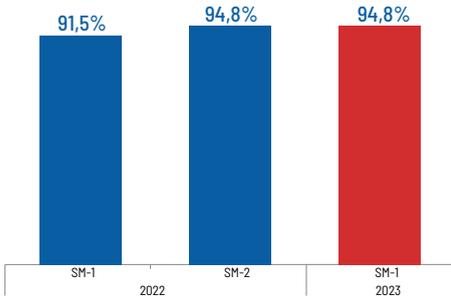
Sebagai bagian dari strategi digitalisasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Beberapa indikator kesiapan digital Pemda DKI Jakarta menunjukkan ruang pengembangan, antara lain:

Tabel III.1.1 Digital Maturity Level (DML)

Connect Penyediaan website Pemda Jakarta telah mampu merubah pola interaksi dua-arah menjadi lebih interaktif dan citizen-centric

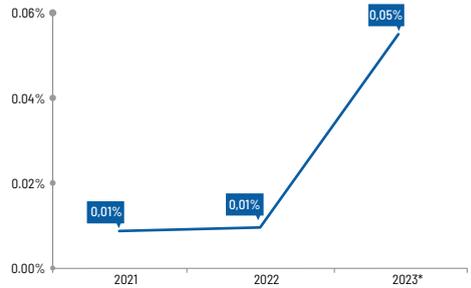
Pemerintah Provinsi	(DML)
DKI Jakarta	Connected

Ket: Terdapat 5 tahap digital maturity a.l. Not Ready, Emerging, Enhanced, Transaction, dan Connected



Sumber: IETPD - DPSP (diolah)

Grafik III.1.2 Indeks ETPD



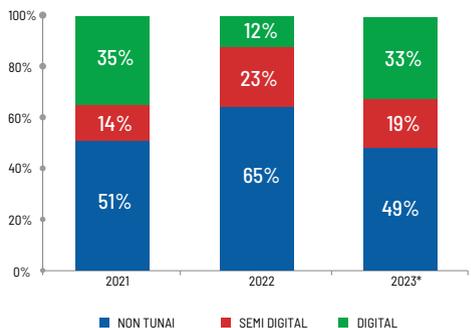
*Data sampai dengan Mei 2023 Sumber: DPSP, diolah

Grafik III.1.3 Penerimaan QRIS Pajak dan Retribusi terhadap PAD

1. Kesiapan Pemerintah Daerah diukur dengan *Digital Maturity Level* yang sudah mencapai tahap *Connected* (skor 5 atau 100%). Hal ini menunjukkan bahwa pola interaksi Pemda telah menjadi lebih interaktif dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
2. Kesiapan masyarakat tercermin dalam Indeks Literasi Digital dengan skor 3,59, sedikit di atas rata-rata nasional (3,54). Namun, aspek keterampilan, budaya, etika, dan keamanan digital masih perlu diperkuat.
3. Ekosistem digitalisasi Pemda DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan. Hingga Semester-II 2023, Indeks ETPD telah mencapai tahap digital (skor 94,8%), namun masih ada ruang untuk mencapai skor maksimal 100%.

Penerimaan pajak dan retribusi DKI Jakarta kini sepenuhnya menggunakan kanal non-tunai, didukung infrastruktur digital yang memadai. Pemda juga fokus pada peningkatan literasi digital dengan komunikasi yang masif, inovatif, dan inklusif di berbagai kanal media.

Realisasi IETPD telah mencapai 48%, menunjukkan peluang peningkatan penerimaan pajak melalui kanal QRIS masih terbuka lebar. Pada Semester-II 2023, rasio penerimaan pajak dan retribusi melalui



*Data sampai dengan Mei 2023 Non Tunai: Teller dan Agen Bank Semi Digital: ATM, EDC dan Uang Elektronik Digital: Internet/Mobile/SMS Banking, QRIS dan E-Commerce Sumber: DPSP, diolah

Grafik III.1.4 Sebaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Jakarta

QRIS mencapai 0,05%, naik dari 0,01% di Semester-I 2023. Secara keseluruhan, penerimaan pajak dan retribusi masih didominasi oleh kanal non-tunai (teller dan agen bank) sementara kanal semi-digital dan digital masing-masing berkontribusi 19% dan 33%.

Tabel III.1.2 IETPD berdasarkan aspek

Aspek	2022		2023*
	SM-1	SM-2	SM-1
Implementasi	100%	100%	100%
Realisasi	15%	48%	48%
Lingstra	100%	100%	100%

*Data sampai dengan Mei 2023
Sumber: DPSP, diolah

Program-program sepanjang tahun 2023 mendukung implementasi pembayaran non-tunai dan transformasi penerimaan daerah menuju digital. Salah satu inovasi unggulan adalah fitur *Pay As You Go Account-Based Ticketing* (ABT) oleh PT JakLingko Indonesia. Fitur ini mendorong penggunaan QRIS pada moda transportasi dan meningkatkan volume transaksi digital.

Dari aspek tata kelola, fitur ini mendukung transparansi dan efektivitas penyaluran subsidi transportasi dalam APBD DKI Jakarta. Aplikasi JakLingko mengintegrasikan pembayaran berbagai moda transportasi, termasuk MRT, LRT, TransJakarta, dan Commuter Line.

Transformasi digital DKI Jakarta mendapat apresiasi dengan meraih penghargaan Champion TP2DD Jawa-Bali dalam Rakornas P2DD 2023. Pencapaian ini didukung oleh optimalisasi aspek proses, *output*, dan *outcomes* pada ETPD, di mana seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah terhubung ke kanal non-tunai, semi-digital, dan digital.

Untuk memperkuat ekosistem digital, TP2DD DKI Jakarta melakukan:

1. Penguatan Indeks ETPD:

- Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal non-tunai dan percepatan implementasi kartu kredit pemerintah daerah.
- Memperluas akses digitalisasi pada layanan kesehatan, transportasi, dan pariwisata melalui pengembangan aplikasi seperti Jaket Boat dan Jaket Bus, serta penerapan *e-ticketing* di Monumen Nasional, museum, dan Pulau Seribu.
- Meningkatkan engagement di media sosial melalui edukasi inovatif terkait keamanan transaksi digital dan pembayaran pajak.

2. Penguatan Literasi Digital:

Sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mencakup keterampilan digital, budaya digital, etika, dan keamanan digital.

3. Peningkatan Digital Maturity Level:

Pengembangan kanal komunikasi digital Pemda yang lebih interaktif dan berorientasi pada masyarakat.

4. Penguatan Koordinasi Antar-Instansi:

Sinkronisasi program dalam TP2DD untuk memastikan kesiapan ekosistem, masyarakat, dan Pemda dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

Ekspansi penggunaan QRIS di 13 pasar tradisional dan 8 pusat perbelanjaan menambah pengalaman positif bagi pengguna. Ke depan, sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terus diperkuat untuk mengatasi kendala dan meningkatkan literasi digital masyarakat Jakarta.

Perubahan adalah satu-satunya yang pasti, dan Jakarta memilih untuk menari bersama arus transformasi digital. Dalam proses ini, bukan hanya teknologi yang berubah, tetapi juga cara hidup dan pola pikir masyarakat. Seperti kata Alan Watts, “*The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.*” Dengan bergabung dalam tarian ini, Jakarta membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan inklusif—untuk kota, bangsa, dan generasi mendatang.





Foto : Uang Rupiah

02. Memperkuat Reputasi Keuangan

INTISARI

- Bagaimana Jakarta berperan dalam proses evaluasi keuangan FATF.
 - Langkah strategis KPwBI untuk menertibkan sektor KUPVA dan PTD.
 - Koordinasi lintas lembaga semakin penting di era ekonomi digital.
 - Usaha Indonesia dalam meraih keanggotaan penuh FATF.
 - Bagaimana industri keuangan di Jakarta merespons tantangan pengawasan pasca pandemi.
-

Keanggotaan pada FATF mendorong persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia melalui pengakuan atas standar efektivitas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Hal ini diharapkan memperkuat keyakinan dan kepercayaan investor global, mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa endemi.

Pada 18 Juli hingga 4 Agustus 2022, Indonesia mengikuti proses MER FATF sebagai langkah untuk memperoleh keanggotaan penuh. Dalam proses ini, Bank Indonesia bersama lembaga terkait dan industri memaparkan bisnis proses serta bukti penerapan rezim anti-TPPU dan TPPT di dalam sistem keuangan. Salah satu fokus review adalah pada industri Sistem Pembayaran (SP), terutama Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD BB).

KPwBI Provinsi DKI Jakarta memiliki cakupan pengawasan terbesar di Indonesia dalam sektor KUPVA BB dan PTD BB, mencakup jumlah penyelenggara, volume transaksi, serta distribusi yang luas. Kompleksitas pengawasan ini membuat KPwBI DKI Jakarta aktif berperan dalam proses asesmen MER FATF.

Untuk mendukung Indonesia menjadi anggota penuh FATF, KPwBI DKI Jakarta telah melakukan beberapa langkah penting:

1. Penertiban KUPVA yang tidak berizin.
2. Penyegaran aturan TPPU dan TPPT bagi industri terkait.
3. Persiapan data dan materi pendukung untuk proses asesmen.

Langkah-langkah ini mendapat respons positif dari para pelaku usaha dan diharapkan turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam industri Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SP PUR).

Memasuki masa endemi, Tim Pengawas KPwBI terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna meningkatkan pengawasan industri serta kesadaran penerapan TPPU dan TPPT. Fokus khusus diberikan pada industri KUPVA mengingat tingginya turnover karyawan selama pandemi. Seiring berkembangnya layanan sistem pembayaran di era ekonomi digital, penguatan koordinasi lintas K/L menjadi semakin krusial untuk mempertahankan rezim anti-TPPU dan TPPT. KPwBI bekerja erat dengan PPATK, OJK, BNN, Bareskrim (TPPU), dan Densus 88 (TPPT) demi memastikan efektivitas pengawasan.

Keanggotaan Indonesia di FATF bukan sekadar pencapaian formal, melainkan bagian dari komitmen besar untuk membangun kepercayaan global yang berkelanjutan. Upaya kolaboratif antara Bank Indonesia, industri keuangan, dan lembaga terkait mencerminkan kesungguhan Indonesia dalam memperkuat reputasi dan stabilitas sistem keuangan. Dengan landasan kepercayaan yang kuat, Indonesia tak hanya bergerak menuju pemulihan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga hubungan yang harmonis dan kredibel dengan komunitas global.





Foto: Makanan Kerak Telor Khas Betawi

03. Dari Kampung ke Mancanegara

INTISARI

- Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta mendorong UMKM untuk berkembang.
- Program pembinaan dan pelatihan di Jakarta membantu UMKM siap memasuki pasar global.
- Peran penting Jakarta sebagai pusat bisnis nasional dalam mendukung UMKM.
- Kolaborasi UMKM dengan industri manufaktur membuka peluang ekspor.
- Pelatihan dan promosi perdagangan internasional memperluas cakupan pasar UMKM.

“The strength of a nation lies in the strength of its small businesses” – Abraham Lincoln

Pada suatu siang di kawasan Jakarta Barat, Adi, seorang pelaku UMKM makanan ringan, tengah bersiap mengirimkan produk olahannya ke salah satu aggregator ekspor. Meski awalnya ragu, bimbingan dari berbagai program pemerintah membuat Adi berani menembus pasar internasional. “Dulu saya merasa ekspor itu hanya untuk pemain besar. Tapi setelah ikut pelatihan, saya jadi paham bahwa kami juga bisa masuk ke pasar luar negeri,” ujarnya dengan mata berbinar. Cerita Adi adalah salah satu bukti bahwa dukungan sinergis dari berbagai pihak mampu membuka jalan bagi UMKM untuk berkembang hingga ke mancanegara.

UMKM merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru yang signifikan dalam mendorong ekonomi DKI Jakarta, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS (2021), terdapat lebih dari 1 juta UMKM di DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak lebih dari 289.000 UMKM terdaftar dalam program pembinaan Jakpreneur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga akhir tahun 2021. Beberapa UMKM ini menghasilkan produk berkualitas premium dengan potensi tinggi untuk ekspor. Namun, banyak di antara mereka menghadapi kendala yang menghalangi akses ke pasar internasional.

Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan bahan baku serta tingginya biaya tenaga kerja. Bank Indonesia merespons tantangan ini dengan memperkenalkan konsep korporatisasi UMKM, yang mendorong kemitraan antara UMKM, baik dengan sesama UMKM di daerah lain maupun dengan lembaga pendukung. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi kendala secara kolektif. Selain itu, banyak UMKM belum memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam ekspor, sehingga mereka ragu dan enggan untuk mencoba memasuki pasar internasional.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, UMKM di DKI Jakarta memiliki berbagai peluang untuk berkembang. Pertama, posisi Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis nasional memberi ruang bagi UMKM untuk berinovasi. Kedua, banyak program asistensi

Tabel III.3.1 Kolaborasi dan Sinergi Pengembangan UMKM Potensial Ekspor

Kolaborasi dan Sinergi dalam Upaya Pengembangan UMKM Potensial Ekspor

Penguatan Ekspor Online	Pengembangan dan Pelatihan Kapasitas	Penguatan Pembiayaan UMKM Potensial Ekspor	Penguatan Promosi Perdagangan Luar Negeri
PPEJP Kementerian Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar Negeri
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta		<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Pembiayaan (Perbankan dan non-perbankan) 	<ul style="list-style-type: none"> Kedutaan Besar Republik Indonesia
E-Commerce Marketplace			<ul style="list-style-type: none"> Indonesia Trade Promotion Center
Sarinah			<ul style="list-style-type: none"> Agregator ekspor

tersedia, seperti Jakpreneur, berbagai program kementerian, serta dukungan dari sektor swasta dan organisasi non-profit. Ketiga, UMKM dapat memanfaatkan keterlibatan dalam rantai pasok industri manufaktur di kawasan industri Jakarta, yang membuka kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan produk dan memperluas jangkauan hingga ke pasar ekspor.

Dalam mengatasi kendala dan mengoptimalkan peluang tersebut, KPwBI DKI Jakarta memperkuat koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, asosiasi, dan calon agregator atau pembeli (Tabel III.3.1). Salah satu langkah strategis adalah penyelenggaraan *export coaching program* (ECP) bekerja sama dengan PPEJP Kementerian Perdagangan pada 2021 dan 2022.

Pada 2021, program ECP melibatkan 30 UMKM potensial ekspor, yang dipilih dari mitra KPwBI DKI Jakarta dan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi serta *stakeholders* lainnya. Program ini berlangsung selama tujuh bulan (April–November 2021) dengan kegiatan seperti verifikasi lokasi produksi, pelatihan kelas, pengembangan pasar, dan *business matching* dengan atase perdagangan di Kuala Lumpur, Sydney, Chennai, dan Jeddah.

Program ECP dilanjutkan pada 2022 dengan pelatihan yang lebih spesifik. Pada 6-8 September 2022, peserta belajar tentang “bisnis online ekspor,” termasuk cara memilih *platform e-commerce* global, membuat akun, dan memasarkan produk secara efektif. Pada sesi berikutnya, 13-15 September 2022, peserta mendapat materi tentang “Negosiasi dan Kontrak Dagang Ekspor,” yang relevan dengan tantangan dalam menyusun kontrak dagang yang menguntungkan.

Hasilnya, 12 UMKM berhasil menembus pasar internasional, dengan ekspor ke Kanada, Jerman, UAE, Singapura, dan negara lain. Produk yang diekspor mencakup makanan olahan, kerajinan kain dan batik, hasil industri, serta dekorasi rumah.

Selain ECP, KPwBI DKI Jakarta berkolaborasi dengan Sarinah melalui program UMKM SEMARAK (UMKM Semangat Juara dan Naik Kelas). Program ini melibatkan praktisi dan ahli ekspor sebagai narasumber, dan mencakup kunjungan studi ke LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Beberapa UMKM juga berpartisipasi dalam pelatihan Onboarding Shopee Ekspor untuk memanfaatkan e-commerce dalam menjangkau pasar global.

KPwBI DKI Jakarta juga mengikutsertakan UMKM dalam berbagai kegiatan promosi perdagangan internasional. Pada 2022, sebanyak 18 UMKM terpilih melalui proses seleksi ketat terlibat dalam acara seperti 93rd Tokyo International Gift Show (TIGS) Spring 2022, Indonesia Australia SME Promotion, Expo 2020 Dubai, 106th China Food and Drink Fair di Chengdu, hingga Paris Fashion Week dan Singapore International Jewelry Expo.

Ke depan, pengembangan UMKM ekspor memerlukan beberapa langkah penting. Pertama, kolaborasi antar-stakeholders harus terus ditingkatkan untuk mendukung UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor dan memfasilitasi promosi perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama yang telah terjalin antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perdagangan, dan mitra lainnya perlu diperluas dan diperkuat. Kedua, UMKM harus lebih aktif terlibat dalam rantai pasok sektor manufaktur di Jakarta. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara sektor manufaktur dan UMKM agar terbuka peluang bagi UMKM dalam ekosistem tersebut. Di sisi lain, UMKM perlu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan keberlanjutan usaha agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan berkontribusi dalam rantai pasok secara optimal.

Membangun UMKM hingga sukses berkontribusi dalam rantai pasok global memerlukan kerja keras dan kolaborasi yang terus diperkuat. Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah, swasta, dan UMKM, Jakarta dapat menjadi pusat inovasi yang mendorong lahirnya wirausahawan tangguh berorientasi ekspor. Seperti kata Abraham Lincoln, kekuatan sebuah bangsa terletak pada kekuatan bisnis kecilnya. Melalui langkah-langkah ini, semoga UMKM di Jakarta dan seluruh Indonesia dapat tumbuh semakin kuat, membawa nama bangsa ke pentas global.



Foto : Cyber Crime

04. Menggempur Kejahatan Keuangan

INTISARI

- Jakarta memimpin inisiatif pengawasan industri sistem pembayaran dengan langkah-langkah konkret.
- Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan penegakan APU PPT.
- Tantangan dalam adopsi sistem terpadu di kalangan penyelenggara layanan.
- Penguatan sistem pembayaran tidak hanya soal keamanan, tetapi juga kenyamanan pengguna di Jakarta.
- Langkah progresif Bank Indonesia membuka jalan bagi industri yang lebih transparan dan akuntabel.

“Security is not the absence of danger, but the presence of vigilance” – Winston Churchill

Pada suatu siang di Jakarta, seorang pemilik usaha penukaran valuta asing berbincang tentang tantangan yang dihadapinya. “Selain mengikuti aturan Bank Indonesia, kami harus memahami mekanisme pencegahan pencucian uang yang semakin kompleks. Bukan hanya tentang transaksi, tapi juga memastikan data nasabah kami benar-benar valid.”

Industri sistem pembayaran memegang peranan strategis dalam memfasilitasi transaksi bisnis, baik tunai maupun nontunai. Akselerasi ekonomi digital membawa tantangan baru bagi regulator untuk memastikan layanan sistem pembayaran tetap inovatif, sekaligus menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna.

Saat ini, KPwBI DKI Jakarta mengawasi dua sektor utama, yakni Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR). Kedua sektor ini turut menjadi fokus supervisi Tim Financial Action Task Force (FATF) dalam review pelaksanaan APU PPT pada tahun 2022.

Sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pendanaan Terorisme (TPPT), KPwBI DKI Jakarta telah menjalankan 14 Rencana Aksi (Renaksi) pada tahun 2022. Langkah tersebut mencakup penertiban, peningkatan kapasitas APU PPT, self-assessment, serta statistik pertukaran informasi dengan K/L atau negara lain. Upaya ini diperkuat dengan pemeriksaan tematik dan pengukuran pemanfaatan database identitas nasabah, demi meningkatkan kepatuhan dalam penerapan APU PPT. Kedua industri tersebut berisiko tinggi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan lintas negara, sehingga kepatuhan terhadap APU PPT menjadi krusial.

Meski demikian, tingkat kepatuhan penyelenggara layanan sistem pembayaran di Jakarta terhadap APU PPT masih rendah. Hasil survei mengungkapkan bahwa pemanfaatan data online kependudukan (DUKCAPIL) dan data Administrasi Hukum Umum (AHU) masih di bawah 15%. Dari 375 penyelenggara, hanya 4,3% yang menggunakan akses database DUKCAPIL, 10,1% mengakses AHU Online, dan 6,1% memanfaatkan database lainnya. Beberapa kendala yang teridentifikasi mencakup biaya fasilitas dan prosedur perizinan akses yang rumit.

Dalam rangka memperkuat penegakan rezim APU PPT bagi KUPVA BB dan PJP LR, penguatan koordinasi antar K/L menjadi langkah penting. KPwBI DKI Jakarta telah mengambil beberapa inisiatif pada tahun 2022, di antaranya:

- I. Diskusi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terkait pertukaran informasi regulasi, mekanisme pengawasan, serta komitmen memberikan imbauan kepada PJP LR agar tidak memfasilitasi perdagangan aset kripto. Koordinasi ini juga menegaskan pentingnya larangan transaksi setor dan tarik tunai di lokasi usaha tanpa identifikasi end-to-end pengguna jasa.
- II. Kerjasama dengan Dirjen Bea dan Cukai, Densus 88 Anti Teror, Bareskrim, BNN, BNPT, dan PPATK untuk memperkuat penegakan APU PPT. Kerjasama ini meliputi beberapa aspek penting:
 - 1) Pertukaran data sesuai kewenangan untuk memperkuat identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), termasuk daftar terduga pelaku narkoba dari BNN.
 - 2) Sharing modus operandi dan hasil pemeriksaan di lapangan sebagai dasar pertimbangan pemberian atau pencabutan izin penyelenggara.
 - 3) Pemeriksaan mendetail terhadap tujuan transfer, terutama untuk donasi atau bantuan, guna mencegah potensi TPPT.
 - 4) Keterbatasan akses data dan kewenangan lembaga membutuhkan analisis bersama untuk memastikan efektivitas upaya pencegahan TPPT dan TPPU.

Ke depan, koordinasi antar K/L harus terus diperkuat untuk mendukung penegakan rezim APU PPT, terutama pada industri sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Seperti kata Winston Churchill, keamanan bukan berarti ketiadaan ancaman, melainkan hadirnya kewaspadaan. Untuk itu, penguatan koordinasi dan penerapan APU PPT tidak boleh sekadar memenuhi regulasi, tetapi juga harus menjadi budaya yang melekat pada setiap aspek operasional industri. Dengan begitu, sektor pembayaran di Indonesia dapat berkembang secara aman dan berkelanjutan.





Foto: Perumahan Tipe Cluster

05. Saatnya Generasi Muda Miliki Hunian

INTISARI

- Bagaimana keterbatasan lahan di Jakarta memengaruhi ketersediaan hunian terjangkau.
- Solusi yang ditawarkan pemerintah melalui skema pembiayaan dan program khusus perumahan di Jakarta.
- Pentingnya peran program TOD dalam memberikan akses hunian bagi pekerja di Jakarta.
- Upaya memperluas skema kredit dan insentif untuk kelas menengah.
- Optimalisasi skema pembiayaan agar lebih efektif dan inklusif di seluruh segmen masyarakat.

“The ache for home lives in all of us, the safe place where we can go as we are and not be questioned.” - Maya Angelou

Pada suatu sore di kawasan Jakarta Timur, Adi, seorang pekerja dengan gaji pas-pasan, baru saja pulang dari kantor dan menatap brosur perumahan di tangannya. Ia bermimpi untuk memiliki rumah sendiri, tetapi harga hunian yang selangit dan suku bunga KPR yang tinggi terus menjadi kendala. Seperti banyak pekerja muda lainnya, Adi terjebak dalam dilema antara terus menyewa atau berharap suatu hari bisa memiliki rumah di kota ini. Keterbatasan lahan dan mahalnya harga hunian telah membuat kepemilikan rumah semakin jauh dari jangkauan.

Keterbatasan lahan di DKI Jakarta berdampak langsung pada melonjaknya harga hunian. Berdasarkan Survei Harga Properti Residensial, indeks harga properti untuk berbagai tipe residensial—baik kecil, menengah, maupun besar—masih berada di tingkat tinggi, meski menunjukkan penurunan (Grafik III.5.1). Tingginya harga membuat hunian menjadi tidak terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah, khususnya generasi milenial. Selain itu, kesulitan memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga tinggi turut menjadi tantangan bagi masyarakat dalam memiliki hunian.

Terbatasnya ketersediaan lahan juga memengaruhi suplai hunian, sehingga memicu kenaikan inflasi sewa dan kontrak rumah. Profil kepemilikan hunian di Jakarta mencerminkan situasi ini, dengan proporsi rumah yang berstatus sewa mencapai 25%, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa yang rata-rata di bawah 8%. Untuk itu, program penyediaan hunian terjangkau dengan skema pembiayaan yang menarik bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk memiliki rumah di Jakarta.

Tabel III.5.1 Skema Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah

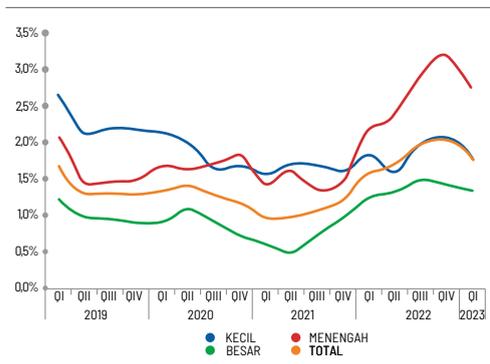
Program	Target	Sumber Dana Utama	Pemanfaatan untuk Perumahan
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	MBR dengan penghasilan maksimal 4 juta/bulan untuk rumah tapak dan 7 juta/bulan untuk rumah susun	APBN (Dana Bergulir) dan Bank Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan perumahan dengan suku bunga tetap 5% Harga rumah dibatasi untuk setiap daerah
Subsidi Selisih Bunga (SSB)	MBR dengan penghasilan maksimal 4 juta/bulan untuk rumah tapak dan 7 juta/bulan untuk rumah susun	APBN dan Bank Pelaksana. APBN hanya mensubsidi selisih bunganya saja	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan perumahan dengan suku bunga tetap 5% Harga rumah dibatasi untuk setiap daerah
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	MBR dengan penghasilan maksimal 4 juta/bulan untuk rumah tapak dan 7 juta/bulan untuk rumah susun	APBN	<ul style="list-style-type: none"> Mendapatkan bantuan uang muka
Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum – PNS)	Pegawai Negeri Sipil	Iuran Peserta (Pemberi Kerja dan Pekerja)	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan uang muka rumah, pembelian atau membuat rumah, dan renovasi
Program Pekerja Kerja Sama Bank (PPKSB)	Peserta BPJS baik MBR maupun non MBR	Iuran Peserta	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan uang muka rumah, pembelian atau membuat rumah dan renovasi rumah Untuk KPR MBR suku bunga tetap 5% dengan harga rumah

Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah merintis program Alaspadu (hunian terjangkau sewa) dan Rumapadu (hunian terjangkau milik) di kawasan Transit-Oriented Development (TOD). Harga jual Rumapadu dirancang lebih rendah dari harga pasar agar terjangkau bagi pekerja dengan penghasilan Rp7 juta hingga Rp20 juta per bulan. Namun, kepemilikan hunian bersifat closed loop, yang artinya hanya bisa dijual kembali kepada PT MRT Jakarta selaku pemilik proyek. Skema ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga dan mencegah spekulasi. Program ini juga memberikan manfaat multidimensi, seperti mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, serta meredam inflasi perumahan.

Pemerintah telah menyediakan berbagai skema kredit untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR. Sayangnya, skema pembiayaan ini masih terbatas untuk MBR dan belum menjangkau kelas menengah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan Program Hunian Terjangkau Milik, yang memungkinkan masyarakat memiliki rumah dengan memanfaatkan fasilitas KPR melalui Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Program ini diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2018 dan menawarkan dua opsi pembiayaan: kredit uang muka sebesar 20% atau kredit penuh 100%. Skema ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hunian tanpa harus mencari pinjaman tambahan dari pihak lain.

Berbagai skema pembiayaan ini telah berhasil mendorong penyaluran kredit perumahan di Jakarta. Pada Juli 2023, Kredit Perumahan tercatat tumbuh 4,81% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (4,67%) dan lebih tinggi dibandingkan awal tahun 2023 (Grafik III.5.2). Tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) juga masih terkendali di level 2,92%.



Grafik III.5.1 Perkembangan Indeks Harga Properti Residensial



Grafik III.5.2 Perkembangan KPR

Ke depan, dukungan skema insentif pembiayaan yang lebih inklusif diperlukan, khususnya bagi masyarakat kelas menengah, mengingat saat ini kebijakan masih fokus pada MBR. Pemerintah diharapkan memperluas program FLPP dengan menyertakan pekerja berpenghasilan menengah, serta menyesuaikan besaran insentif atau talangan uang muka. Selain itu, kebijakan yang memudahkan pembayaran uang muka atau suku bunga rendah melalui penjaminan kredit akan sangat membantu. Kerja sama dengan bank swasta dalam memberikan potongan harga, cashback, atau subsidi bunga KPR juga bisa menjadi opsi menarik bagi masyarakat.

Optimalisasi program pembiayaan perumahan eksisting seperti FLPP, SSB, dan SBUM juga dibutuhkan agar lebih efektif dan inklusif. Penyelerasan antara program eksisting harus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih peserta. Selain itu, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerja formal dan mandiri, agar setiap segmen dapat terakomodasi dengan baik.

Mimpi memiliki rumah adalah kebutuhan yang hidup di dalam diri setiap individu, seperti yang diungkapkan Maya Angelou: *“The ache for home lives in all of us, the safe place where we can go as we are and not be questioned.”* Di Jakarta, tantangan mendapatkan hunian bukan hanya soal keterjangkauan harga, tetapi juga solusi kreatif dalam pembiayaan. Dengan skema yang lebih inklusif dan inovatif, harapan seperti yang dimiliki Adi dan jutaan warga lainnya mungkin segera menjadi kenyataan. Pemerintah, bank, dan masyarakat harus bekerja bersama agar setiap individu dapat menemukan rumah yang menjadi tempat aman mereka.



Foto: Pelindungan Konsumen

06. Pelindungan Konsumen di Era Digital

INTISARI

- Bagaimana konsumen di Jakarta mengalami kendala dan solusi melalui pengaduan di Bank Indonesia.
- Peran penting edukasi digital bagi konsumen dalam meningkatkan literasi keuangan.
- Dampak digitalisasi terhadap perubahan perilaku konsumen di Jakarta.
- Upaya kolaboratif untuk memperkuat pelindungan konsumen dan menjaga kepercayaan.
- Strategi lembaga keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan layanan di Jakarta.

“Trust is the glue of life. It’s the most essential ingredient in effective communication. It’s the foundational principle that holds all relationships” – Stephen R. Covey

Ketika pandemi COVID-19 melanda, Rina (36), seorang pekerja di Jakarta, bercerita bagaimana pengalamannya saat mencoba menyelesaikan sengketa transaksi pinjaman online. Dengan keterbatasan akses langsung dan prosedur daring yang tidak selalu responsif, Rina mengalami kendala dalam mendapatkan solusi cepat. Pengalaman ini mengajarkannya pentingnya literasi keuangan dan memilih penyelenggara yang memiliki izin resmi. Kisah serupa dialami banyak konsumen, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, ketika mereka bergantung pada layanan digital selama masa pandemi.

Pelindungan konsumen berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan dan jasa lainnya. Keberadaan lembaga pengawas menjadi krusial untuk memastikan keamanan layanan bagi konsumen. Penyelenggara yang berizin dari otoritas terkait memberikan rasa aman bagi pengguna layanan. Apabila terjadi ketidakpuasan dalam penanganan pengaduan oleh penyelenggara, konsumen dapat mengajukan aduan kepada lembaga penyelesaian sengketa atau otoritas berwenang.

Secara nasional, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021, dengan kontribusi sebesar 54,42% terhadap PDB. Hal ini selaras dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270,2 juta jiwa. Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, pelindungan konsumen menjadi elemen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut survei Kementerian Perdagangan 2021, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) baru mencapai 50,39%, yang menempatkannya pada level “Mampu”. Masih terdapat dua level di atasnya, yaitu “Kritis” dan “Berdaya”. Di sisi lain, tingkat pengaduan konsumen terbilang rendah, dengan hanya 4,1 pengaduan per satu juta penduduk.

Bank Indonesia, sebagai regulator, memiliki peran signifikan dalam melindungi konsumen. Pelindungan ini diwujudkan melalui pengaturan, pengawasan, penanganan pengaduan, dan edukasi konsumen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Pelindungan Konsumen, yang diterbitkan pada 20 Desember 2020, memperkuat komitmen ini. Implementasinya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/17/PADG/2021.

Kebijakan pelindungan konsumen di sektor ekonomi bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, stabilitas sistem keuangan, inklusi keuangan, dan literasi keuangan yang baik. Indikator kebijakan yang efektif mencakup regulasi yang mengikuti praktik terbaik (best practice), tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi,

kepatuhan penyelenggara, penanganan pengaduan yang responsif, serta edukasi masyarakat yang efektif.

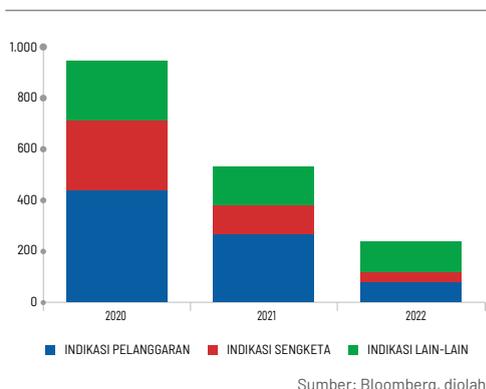
Prinsip dasar perlindungan konsumen meliputi kesetaraan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, edukasi dan literasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen dari penyalahgunaan, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian pengaduan secara efektif. Kerja sama dengan berbagai

pemangku kepentingan, seperti kementerian, lembaga, industri, dan asosiasi, turut memperkuat perlindungan ini. Kolaborasi ini mendorong efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar, sekaligus meningkatkan keberdayaan konsumen.

Selama periode 2020 hingga Mei 2022, terdapat 4.400 pengaduan konsumen yang diterima Bank Indonesia secara nasional. Dari jumlah tersebut, 39,11% atau 1.721 pengaduan berasal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi, baik bagi konsumen maupun perusahaan. Pada tahun 2020, jumlah pengaduan konsumen melonjak, namun tren ini mulai menurun pada 2021. Di DKI Jakarta, pengaduan pada tahun 2020 didominasi oleh indikasi pelanggaran (440 pengaduan), diikuti oleh sengketa (264 pengaduan) dan kasus lain-lain (232 pengaduan). Pada 2021, komposisi pengaduan berubah, dengan penurunan pada sengketa dan peningkatan kasus lain-lain. Sementara itu, pada 2022, pengaduan didominasi oleh kategori lain-lain, diikuti oleh indikasi pelanggaran dan sengketa. Kondisi ini mencerminkan dampak keterbatasan akses komunikasi langsung serta keterbatasan ekonomi selama pandemi.

Bank Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan kondisi tersebut. Fokus pengawasan mencakup penyelenggara sistem pembayaran, layanan uang, pelaku pasar uang dan valuta asing, serta pihak terkait lainnya. Edukasi yang masif dan mudah diakses oleh konsumen diperlukan agar kesadaran konsumen meningkat dan potensi pelanggaran dapat diminimalisir.



Grafik III.6.1 Jenis Pengaduan di Jakarta

KPwBI Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan literasi keuangan konsumen dengan strategi edukasi berbasis digital. Beragam konten edukatif disajikan melalui media sosial, termasuk podcast dan konten digital interaktif. Selain itu, chatbot melalui aplikasi pesan instan turut disediakan untuk mempermudah akses informasi dan layanan bagi konsumen.

Pada akhirnya, perlindungan konsumen tidak hanya soal regulasi atau pengawasan. Di era digital, di mana transaksi semakin kompleks dan interaksi lebih banyak terjadi secara daring, kepercayaan menjadi hal yang paling fundamental. Seperti kata Stephen R. Covey, kepercayaan adalah perekat yang menyatukan hubungan dan komunikasi yang efektif. Dengan memperkuat edukasi konsumen dan meningkatkan transparansi, lembaga seperti Bank Indonesia dapat membantu masyarakat merasa lebih aman dan percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan.

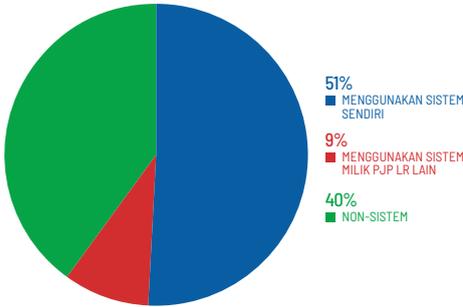


Foto: Digitalisasi dan Konektivitas

07. Jakarta Menghubungkan Dunia Digital

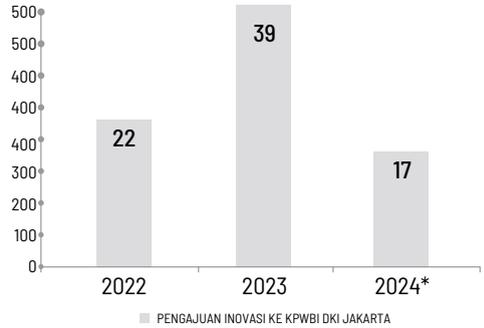
INTISARI

- Jakarta menjadi pusat inovasi layanan remitansi dengan adopsi teknologi digital.
 - Upaya kolaboratif antara regulator dan industri di Jakarta memperkuat keamanan sistem pembayaran.
 - Teknologi dan risiko digital mendorong industri untuk terus beradaptasi.
 - Perubahan regulasi mempertegas peran penyelenggara layanan remitansi di era digital.
 - Industri remitansi memerlukan inovasi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan kejahatan siber.
-



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.7.1 Persentase Kepemilikan Sistem PJP LR di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.7.2 Jumlah pengajuan inovasi PJP LR kepada KPwBI DKI Jakarta

Perkembangan teknologi serta beragam instrumen dan kanal dalam industri sistem pembayaran (SP) telah mendorong inovasi yang mengubah bisnis konvensional menjadi layanan digital dan otomatis. Salah satunya adalah layanan transfer dana di industri Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR). Inovasi ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa 51% atau 46 dari 77 PJP LR di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta sudah mengintegrasikan sistem dalam operasional mereka, baik melalui sistem internal maupun sistem pihak ketiga (Grafik III.7.1).

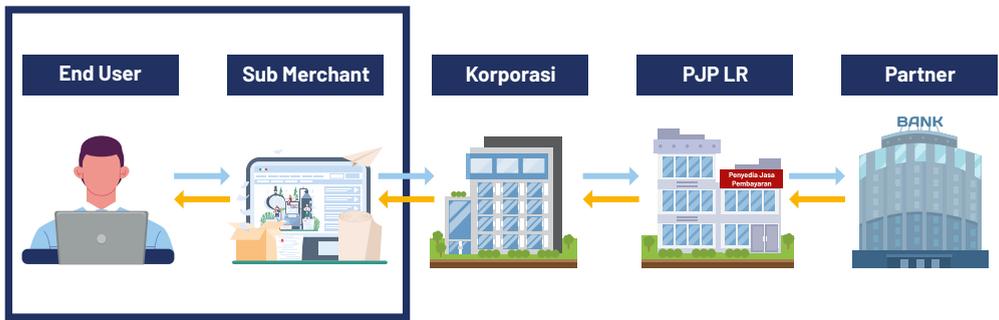
Selain itu, PJP LR juga telah membangun konektivitas dengan perbankan dan lembaga penunjang lain, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat produk dan layanan bagi pengguna. Namun, di balik perkembangan positif tersebut, inovasi juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal keamanan digital. Tantangan ini mencakup ancaman kejahatan siber, rendahnya literasi konsumen, perlindungan data pribadi, serta risiko penyalahgunaan layanan oleh pelaku kejahatan.

Selain risiko operasional, industri SP juga rentan disalahgunakan oleh aktivitas ilegal seperti pinjaman online ilegal, judi online, dan pencurian data pribadi. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online di Indonesia mencapai lebih dari Rp600 triliun pada Triwulan I-2024. Nilai ini naik 83,5% dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp327 triliun (Grafik III.7.3).



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240620063812-128-547656/uang-pinjol-diduga-banyak-dipakai-untuk-judi-awas-kredit-macet>, diolah, diakses pada 23 Agustus 2024.

Grafik III.7.3 Tren nilai transaksi judi online di Indonesia



Gambar III.7.1 Alur transaksi dalam mekanisme kerja sama berjenjang

Inovasi bisnis tanpa disertai penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dapat membuka celah bagi aktivitas ilegal, baik oleh individu maupun korporasi. Perkembangan model bisnis, seperti *Merchant Aggregator* dan kemitraan berjenjang, juga meningkatkan risiko ini. Dalam beberapa kasus, pemantauan transaksi sulit dilakukan karena lemahnya proses *Know Your Customer* (KYC) atau *Know Your Business* (KYB) dan terbatasnya sistem deteksi kecurangan.

Untuk memperkuat industri remitansi di Jakarta, KPwBI DKI Jakarta telah menerapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Rekomendasi Regulasi dan Kebijakan yang lebih kuat;
2. Pengawasan langsung dan tidak langsung dengan pendekatan berbasis risiko;
3. Kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan PPATK;
4. Pemanfaatan teknologi dan standarisasi API dalam kemitraan antara bank dan PJP Non-Bank;
5. Penerapan sanksi dan tindakan hukum bagi pelanggaran aturan dan ketentuan PBI;
6. Peningkatan kapasitas SDM di Bank Indonesia dan PJP LR melalui pelatihan APU PPT dan pencegahan kecurangan.

Dengan strategi pengawasan yang menyeluruh, diharapkan risiko yang muncul dapat dikelola dengan baik sehingga stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga. Dalam mendukung pertukaran informasi, KPwBI DKI Jakarta juga berperan aktif sebagai focal point Bank Indonesia untuk berkoordinasi dengan PPATK, Kementerian/Lembaga, aparat penegak hukum (APGAKUM), dan lembaga internasional. Kolaborasi ini bertujuan memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memitigasi risiko dalam sistem pembayaran.



Gambar III.7.2 Kerja Sama antar Kementerian dan Lembaga

Bagi industri, penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian menjadi langkah krusial untuk mencegah aktivitas ilegal. Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. Memperkuat proses KYC, CDD, dan EDD secara menyeluruh, termasuk pemutakhiran profil nasabah secara berkelanjutan;
2. Memperketat monitoring melalui *Fraud Detection System* (FDS) pada level akun dan transaksi untuk mendeteksi indikasi transaksi mencurigakan secara tepat waktu;
3. Mengedukasi nasabah mengenai risiko dan konsekuensi hukum terkait transaksi ilegal, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat;
4. Memastikan kerja sama hanya dilakukan dengan lembaga berizin untuk menjaga integritas layanan;
5. Melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK serta melakukan investigasi lanjutan terhadap transaksi yang terindikasi melanggar hukum.

Industri remitansi di Jakarta dan Indonesia, meski dihadapkan pada tantangan siber dan kebutuhan regulasi yang ketat, harus terus bertransformasi. Langkah-langkah strategis yang diterapkan akan menentukan apakah inovasi ini dapat memperkuat stabilitas keuangan atau justru menciptakan celah baru bagi risiko. Dengan komitmen kuat dari regulator dan industri, perubahan ini diharapkan tak hanya membawa manfaat jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan keuangan yang aman dan inklusif.

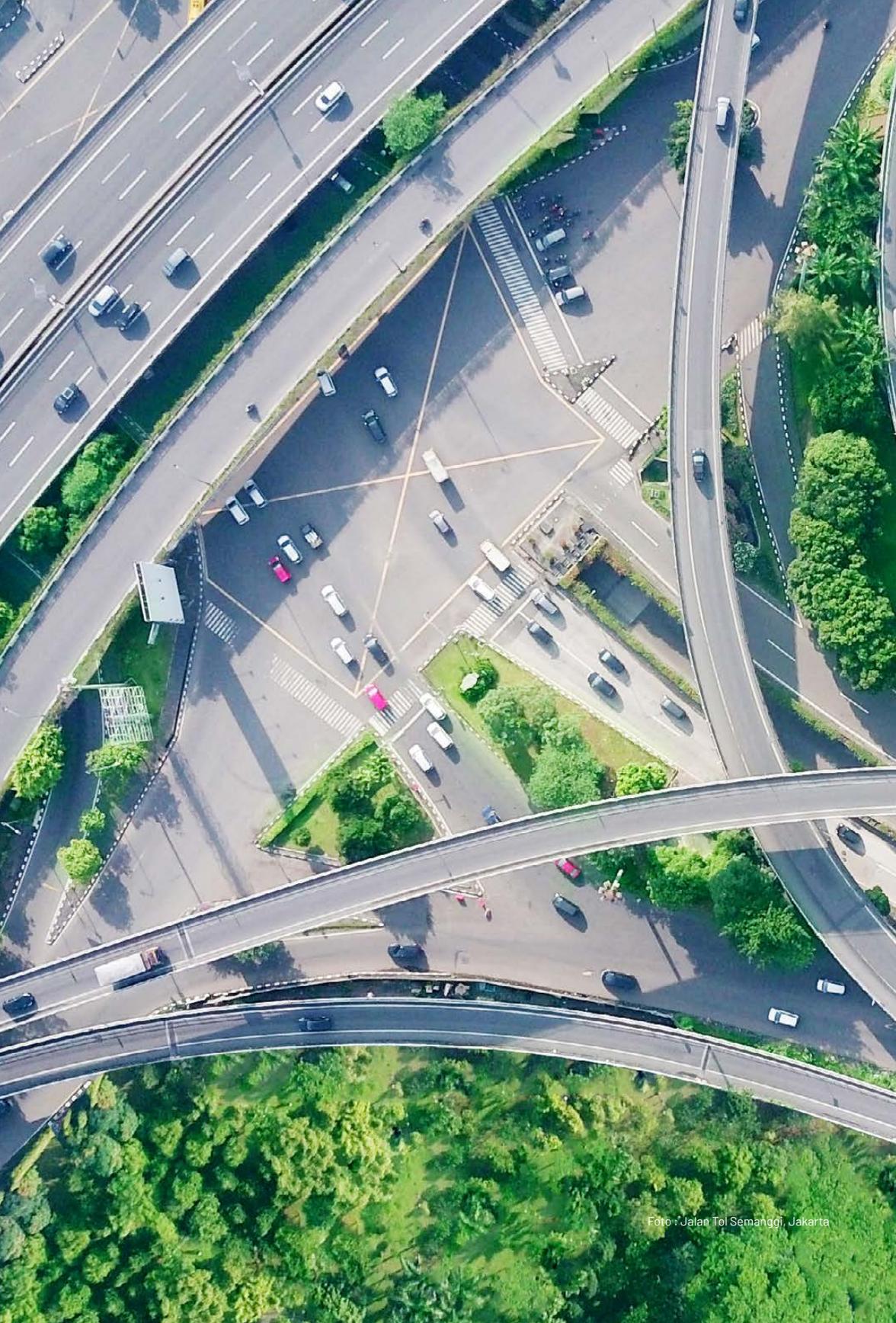


Foto : Jalan Tol Semanggi, Jakarta

Bab IV

Kota Global dan Sinergi Aglomerasi

Bab ini membahas peran strategis Jakarta dalam membangun sinergi aglomerasi di Jabodetabekjur. Diskusi ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan bagaimana Jakarta menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan kawasan metropolitan.

Kemacetan di Jakarta menjadi salah satu tantangan paling signifikan. Tingkat penggunaan transportasi umum yang masih rendah menjadi penyebab utamanya. Namun, berbagai upaya mulai menunjukkan hasil positif, seperti penerapan platform JakLingko, pola kerja hybrid, dan jam kerja fleksibel yang efektif dalam mengurangi beban lalu lintas. Selain itu, pembelajaran dari kota-kota seperti London dan New Delhi memberikan inspirasi berharga untuk mengembangkan kebijakan transportasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Tidak hanya dalam transportasi, sektor properti juga menghadapi tantangan besar. Jakarta mengalami keterbatasan pasokan hunian terjangkau yang memaksa banyak warga mencari alternatif di Bodetabek. Meski demikian, sektor properti komersial menunjukkan pemulihan yang menjanjikan, didukung oleh kebijakan pemerintah seperti insentif pajak dan KPR bersubsidi. Langkah-langkah ini memberikan harapan akan stabilitas sektor properti di masa depan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mempertegas peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kawasan aglomerasi. Kolaborasi antar daerah di Jabodetabekjur menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama dengan memanfaatkan urban farming sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah perkotaan. Sinergi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi regional.

Transformasi digital juga menjadi pilar penting dalam memperkuat sistem transportasi Jakarta. Melalui platform JakLingko, moda transportasi seperti MRT, TransJakarta, dan LRT diintegrasikan dalam satu sistem pembayaran digital.

Dengan sinergi aglomerasi, kebijakan inovatif, dan transformasi digital, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global yang inklusif serta berkelanjutan. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana Jakarta mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan kota yang lebih baik bagi semua warganya.



01. Optimisme Ekspor Impor Jakarta Pasca *Reopening* Tiongkok

INTISARI

- Dampak pembukaan kembali Tiongkok terhadap kinerja ekspor dan impor di Jakarta.
- Jakarta menjadi pemain kunci dalam perdagangan internasional
- Produk-produk unggulan dari DKI Jakarta semakin diminati di pasar Tiongkok.
- Sinergi antara sektor jasa dan industri meningkatkan daya saing Jakarta di pasar global.
- Perbaikan perdagangan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional.

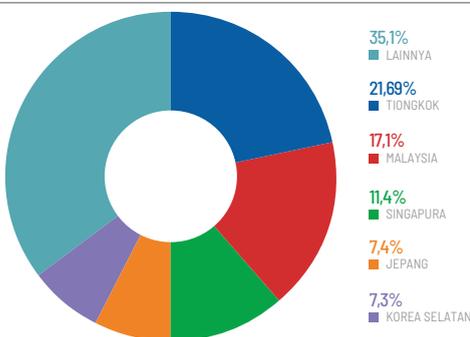
“When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.” – Alexander Graham Bell

Suasana optimisme terasa di sebuah kantor di Jakarta saat Tiongkok mencabut kebijakan Nol Covid. Rizal, seorang pelaku usaha ekspor produk kimia, berbagi pengalamannya tentang lonjakan pesanan pascapembukaan kembali Tiongkok. "Sebelumnya kami was-was karena pasar stagnan, tapi begitu Tiongkok buka, pesanan langsung naik. Ini momen yang sudah kami tunggu," ujarnya. Harapan pun tumbuh di kalangan eksportir, yang memandang *reopening* ini sebagai peluang untuk mendongkrak kinerja ekspor di tengah tekanan ekonomi global.

Ekspor memiliki peran vital dalam perekonomian DKI Jakarta, dengan pangsa sebesar 58,10%. Di tengah perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor DKI Jakarta tetap tumbuh kuat pada triwulan I 2023 sebesar 11,89% (yoy). Meningkatnya kinerja ekspor tidak hanya bersumber dari ekspor barang, namun juga ekspor jasa terutama yang berasal dari Tiongkok setelah kebijakan Nol Covid dicabut pada 7 Desember 2022.

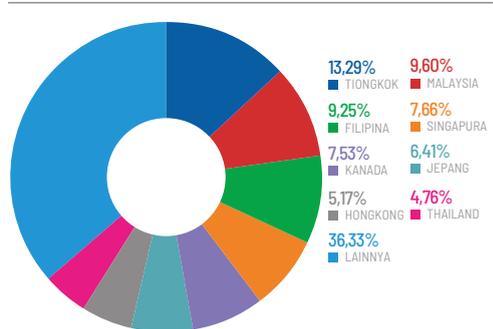
Pembukaan kembali (*reopening*) Tiongkok membawa dampak positif bagi perekonomian Jakarta. Tiongkok merupakan negara asal wisatawan terbesar dengan pangsa 21,69% (Grafik IV.1.1). Pada triwulan I 2023, jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke DKI Jakarta mencapai 63.165 orang, atau tumbuh pesat sebesar 651,34% (yoy). Angka ini meningkat signifikan dari triwulan IV 2022, saat jumlah wisatawan tercatat sebanyak 30.816 orang dengan pertumbuhan 248,40% (yoy).

Selain sektor jasa, Tiongkok juga berperan besar sebagai negara tujuan ekspor barang DKI Jakarta, dengan pangsa 13,29% (Grafik IV.1.3). Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok mencakup lemak dan minyak hewan/nabati (27,41%), ikan dan krustasea (18,60%), serta produk kimia (12,85%). Pada triwulan I 2023, kinerja ekspor barang dari Jakarta ke Tiongkok meningkat sebesar 1,76% (yoy), berbalik dari kontraksi 7,10% (yoy) pada triwulan



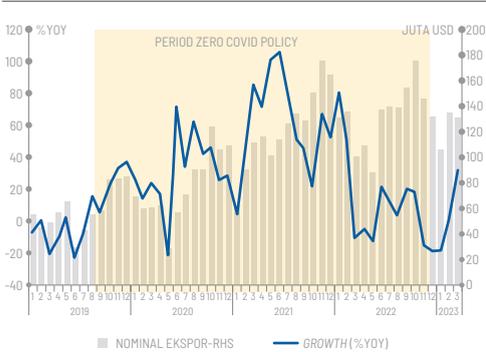
Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.1.1 Negara Asal Wisman DKI Jakarta



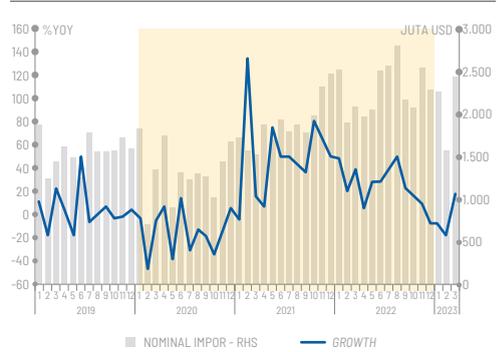
Sumber: BI dan BPS, diolah

Grafik IV.1.2 Negara Tujuan Ekspor Utama DKI Jakarta



Sumber: BI, diolah

Grafik IV.1.3 Perkembangan Ekspor Jakarta Ke Tiongkok



Sumber: BI, diolah

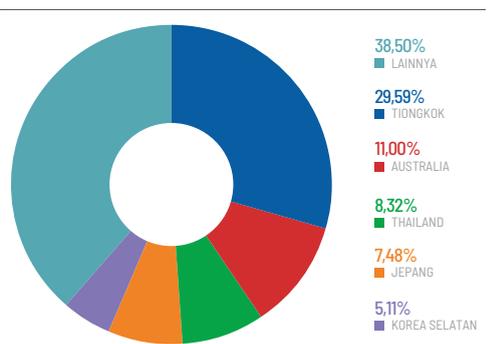
Grafik IV.1.5 Perkembangan Impor Jakarta dari Tiongkok

sebelumnya. Peningkatan ini juga terlihat dari pertumbuhan komoditas unggulan seperti lemak dan minyak hewan/nabati (32,15% yoy), ikan dan udang (12,04% yoy), serta produk kimia (38,66% yoy).

Kinerja Impor dan Prospek ke Depan

Reopening Tiongkok juga diharapkan mendorong impor DKI Jakarta, mengingat Tiongkok adalah negara asal impor terbesar dengan pangsa 29,59% (Grafik IV.1.4). Komoditas utama yang diimpor dari Tiongkok meliputi mesin dan peralatan mekanis (7,81%), mesin dan perlengkapan elektrik (6,79%), plastik dan barang dari plastik (2,20%), serta besi dan baja (1,92%).

Pada triwulan I 2023, kinerja impor dari Tiongkok mengalami kontraksi sebesar 3,86% (yoy) disebabkan oleh penurunan aktivitas industri pengolahan dan normalisasi permintaan domestik di awal tahun. Ke depan, impor dari Tiongkok diperkirakan meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk keperluan konstruksi dan manufaktur. Permintaan besi, baja, mesin, dan plastik akan meningkat seiring akselerasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan bertahap permintaan domestik.



Sumber: BI dan BPS, diolah

Grafik IV.1.4 Negara Asal Impor Utama DKI Jakarta

Seperti yang dikatakan Alexander Graham Bell, *“When one door closes, another opens.”* Reopening Tiongkok bukan hanya sekadar pemulihan, tetapi kesempatan untuk memperkuat perdagangan dan memperluas pasar. Dengan peningkatan ekspor dan potensi impor yang semakin besar, Jakarta memiliki peluang emas untuk mengukuhkan perannya dalam perdagangan internasional. Kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang ini.



Foto : Jalan Sudirman, Jakarta

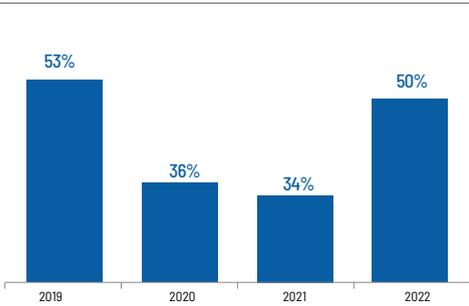
02. Kelancaran Mobilitas untuk Kota yang Lebih Layak Huni dan Efisien

INTISARI

- Transportasi terintegrasi menjadi kunci mengurangi kemacetan di Jakarta.
- Kebijakan jam kerja fleksibel dan pola kerja hybrid memperbaiki mobilitas warga Jakarta.
- Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan kemacetan Jakarta.
- Jakarta memerlukan inovasi dalam kebijakan transportasi.
- Meningkatkan kualitas layanan publik menjadi langkah penting bagi Jakarta untuk menjadi kota global.

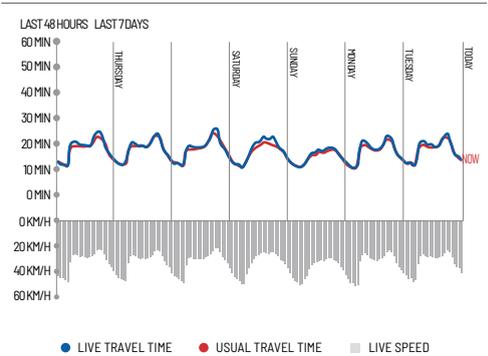
“The road to success is always under construction.”

– Lily Tomlin



Sumber: TomTom Traffic Index, 2022

Grafik IV.2.1 Tingkat Kemacetan DKI Jakarta 2022

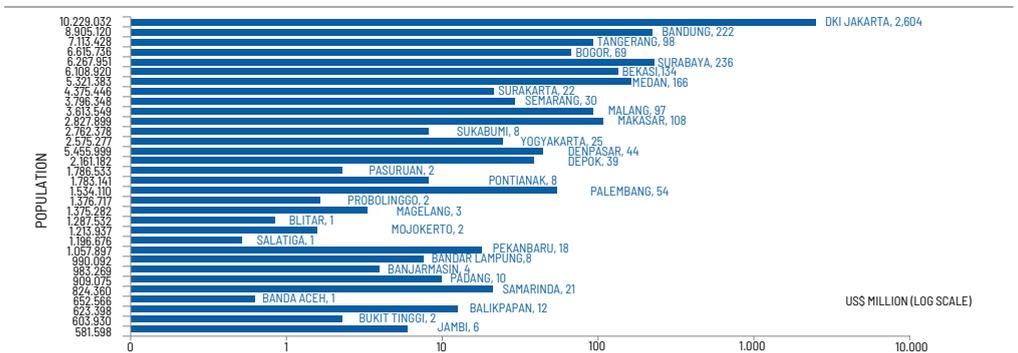


Sumber: TomTom Traffic Index, 2022

Grafik IV.2.2 Pola Waktu Perjalanan DKI Jakarta

Seperti banyak warga Jakarta lainnya, Andi, seorang pekerja kantor di Sudirman, sering menghadapi dilema antara berangkat lebih awal atau terjebak dalam kemacetan. “Meski sudah berangkat jam 6 pagi, jalanan tetap padat,” keluhnya. Pola mobilitas seperti ini telah menjadi rutinitas harian bagi banyak warga Jakarta. Harapan akan transportasi yang lebih efisien kini tumbuh dengan semakin banyaknya inisiatif baru, seperti JakLingko dan kebijakan jam kerja fleksibel, yang diharapkan dapat mengurai kemacetan dan membuat perjalanan lebih lancar.

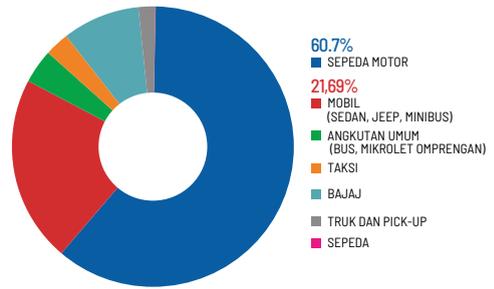
Tingkat kemacetan di DKI Jakarta meningkat menjadi 50% pada tahun 2022, setelah sebelumnya turun menjadi 34% selama pembatasan aktivitas pada masa PPKM. Seiring dengan meningkatnya mobilitas pascapelonggaran kebijakan tersebut, Jakarta kini menduduki peringkat ke-29 dari 320 kota paling macet di dunia (TomTom Traffic Index, 2022). Kemacetan paling parah terjadi pada jam sibuk, dengan tingkat kemacetan 43% pada pagi hari (8-9 pagi) dan 41% pada sore hari (5-6 sore).



Sumber: World Bank, 2019

Grafik IV.2.3 Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan

Penggunaan transportasi umum yang masih rendah, hanya 9,8% dari total perjalanan, menjadi salah satu penyebab kemacetan. Angka ini jauh dari target 60% yang ditetapkan dalam Perda 1/2012 tentang RTRW 2023 (ITDP, 2021). Selain itu, pertumbuhan pesat kendaraan bermotor memperburuk situasi, mengingat Jakarta sebagai magnet urbanisasi menarik banyak pekerja menuju pusat bisnis dan industri. Kemacetan di Jakarta juga membawa dampak ekonomi signifikan, dengan kerugian sekitar Rp 36 triliun per tahun atau 1,29% dari PDRB DKI Jakarta (World Bank, 2019). Selain itu, kemacetan menyumbang pada 8.000 kecelakaan lalu lintas dan 13.000 kematian dini per tahun akibat polusi udara (Greenpeace, 2021). Gangguan ini juga berpotensi mendorong inflasi karena distribusi logistik menjadi tidak efisien.



Sumber: Ditlantas Polda Metrojaya, 2021

Grafik IV.2.4 Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas DKI Jakarta

Berbagai proyek strategis telah digulirkan oleh Pemerintah untuk mengurai kemacetan dan memperkuat integrasi transportasi Jabodetabek. Salah satu solusi utama adalah pengembangan sistem JakLingko yang menyatukan layanan transportasi publik dalam satu platform. JakLingko memungkinkan pemesanan tiket MRT, LRT, Transjakarta, dan KRL dalam satu aplikasi. Sistem ini juga mengembangkan Central Clearing House System (CCHS) dan Mobility as a Service (MaaS) guna meningkatkan kemudahan akses dan penggunaan transportasi umum.

Pola kerja hybrid yang diperkenalkan selama pandemi terbukti mengurangi waktu perjalanan hingga 19-60% per tahun. Implementasi pola kerja fleksibel dan pengaturan jam kerja dalam dua kloter (masuk pukul 8 dan 10 pagi) juga berperan dalam meratakan volume kendaraan dan penumpang transportasi publik. Selain itu, pemberlakuan jam kerja fleksibel memberikan opsi bagi pekerja untuk memilih waktu perjalanan yang lebih nyaman, sehingga membantu mengurangi kemacetan.

London dan New Delhi

London, yang dikenal sebagai kota paling macet di dunia, menerapkan tarif jalan atau *congestion zone* sebesar Rp 246.000 per hari untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Kebijakan ini berlaku sepanjang hari kerja dan akhir pekan di jam tertentu. Selain itu, kota tersebut terus memperluas jaringan transportasi publik dan menerapkan

zona bebas emisi untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Di New Delhi, pengaturan jam kerja dual time diberlakukan di sektor Pemerintahan, tetapi implementasinya masih terbatas dan kurang efektif karena belum diterapkan di sektor swasta.

Jakarta dapat mengambil beberapa langkah strategis untuk menanggulangi kemacetan.

Upaya Jangka Pendek:

- I. Pengaturan jam kerja sesuai karakteristik perusahaan dan instansi (kloter, flexible time, dan hybrid).
- II. Penyediaan insentif tarif transportasi publik berlangganan.
- III. Peningkatan akses ke transportasi umum dengan waktu tunggu yang lebih singkat.

Upaya Jangka Panjang:

- I. Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
- II. Pembangunan infrastruktur transportasi publik yang berkelanjutan.
- III. Integrasi moda transportasi publik dan wilayah Jabodetabek.
- IV. Penenaan tarif dan implementasi Ultra Low Emission Zone (ULEZ) di ruas jalan utama.

Dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara pada 2024, Jakarta tetap perlu menjaga relevansinya sebagai pusat ekonomi dan bisnis nasional. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Jakarta harus memaksimalkan potensi dan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru yang juga dapat mendukung peningkatan daya saing Jakarta sebagai kota global.

Memperkuat Posisi

Mencapai status kota global bukanlah hal mudah bagi Jakarta. Global Power City Index (GPCI) Mori 2022 menempatkan Jakarta di peringkat 45 dari 48 kota global, masih di bawah Singapura (5), Bangkok (40), dan Kuala Lumpur (41). Meski demikian, Jakarta mencatatkan peringkat baik dalam kualitas hidup (29), namun berada di peringkat terbawah dalam dimensi lingkungan (46).

Potensi Jakarta untuk menjadi kota global ditopang oleh ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara berstandar internasional. Beragam moda transportasi publik yang terintegrasi, seperti MRT, LRT, dan Transjakarta melalui JakLingko, memperkuat posisi Jakarta. Selain itu, kawasan Jabodetabek yang menjadi megacity memperkuat Jakarta sebagai hub ekonomi dan perdagangan regional.

Tabel IV.2.1 Gap antara Kondisi Eksisting Jakarta dan Standar Kota Global dalam Bidang Layanan Publik

Bidang	Kota Global	Jakarta
Perumahan	Populasi tunawisma 0%, 10% penduduk tinggal di pemukiman kumuh	23% penduduk hidup di pemukiman kumuh
Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan cukup dan merata	Jumlah fasilitas kesehatan belum cukup dan belum merata
Persampahan	<i>waste to energy</i> dan <i>recycling</i>	<i>Open dumping, waste to energy on progress</i>
Sanitasi dan Air Limbah	Seluruh industri/perkantoran/rumah tangga dilengkapi dengan sanitasi yang terhubung dengan pusat pengolahannya	Jakarta Sewarage System baru menjangkau wilayah Jakarta Pusat (akan dituntaskan tahun 2050)
Transportasi Umum	<i>Underground rapid system</i>	Kereta rel listrik permukaan dan BRT (<i>underground rapid transit system on progress</i>)
Jaringan Jalan	<i>Multimodal street, 30100 orang/jam</i>	<i>Car oriented street, 12.300 orang/jam</i>

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Peningkatan kualitas layanan publik di bidang transportasi, sanitasi, dan kesehatan menjadi fokus penting agar Jakarta bisa bersaing dengan kota global lainnya. Penguatan ini dapat didorong melalui RUU Kekhususan Jakarta, pengembangan layanan digital, serta peningkatan fasilitas publik dan integrasi moda transportasi melalui TOD. Selain itu, akselerasi sektor pariwisata MICE dan pembentukan Jakarta Exhibition and Convention Bureau akan memperkuat daya tarik Jakarta sebagai destinasi bisnis internasional.

Jakarta memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai kota global, namun kesuksesan ini memerlukan kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Selain mengandalkan APBN dan APBD, pendanaan kreatif dari dalam dan luar negeri perlu dioptimalkan untuk membiayai pembangunan. Dengan sinergi antara sektor publik dan swasta, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan melalui model kolaborasi *penta-helix*, Jakarta dapat mengubah tantangan menjadi peluang dan memantapkan posisinya sebagai pusat ekonomi global.

Seperti kata Lily Tomlin, “*The road to success is always under construction.*” Perjalanan Jakarta untuk mengatasi kemacetan dan menjadi kota global tidak akan pernah selesai, namun setiap langkah maju adalah kemenangan kecil. Dengan kebijakan yang inovatif, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen jangka panjang, Jakarta bisa mengubah tantangan transportasi menjadi peluang untuk membangun kota yang lebih layak huni dan efisien. Perubahan ini tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga memantapkan posisi Jakarta di peta ekonomi global.





Foto: Cakung, Jakarta Timur

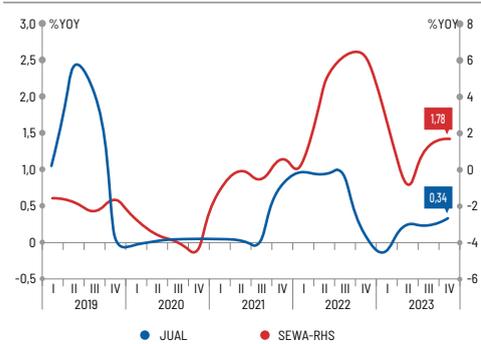
03. Properti Jakarta vs Bodetabek

INTISARI

- Jakarta menghadapi tantangan dalam menyediakan hunian terjangkau di tengah keterbatasan pasokan.
- Fasilitas kredit dan kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan properti di Jakarta dan Bodetabek.
- Tren harga properti komersial di Jakarta menunjukkan potensi pemulihan ekonomi yang menjanjikan.
- Pengembangan hunian terintegrasi dan transportasi publik akan menentukan masa depan sektor properti di Jakarta.
- Kebijakan insentif dan sinergi antar pemangku kepentingan mempercepat pemulihan sektor properti.

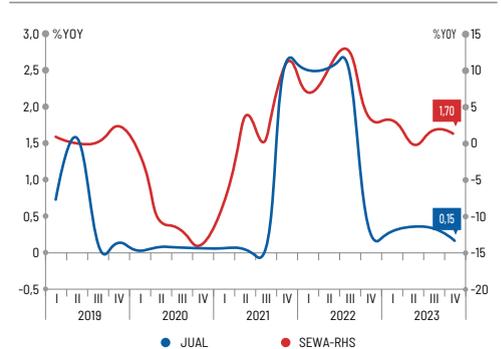
“Real estate is not just about property, it’s about people”

– G.K. Chesterton



Sumber: Survei Properti Komersial, Bank

Grafik IV.3.1 Perkembangan Harga Sewa dan Harga Jual Properti Komersial di DKI Jakarta



Sumber: Survei Properti Komersial, Bank

Grafik IV.3.2 Perkembangan Permintaan Properti Komersial di DKI Jakarta

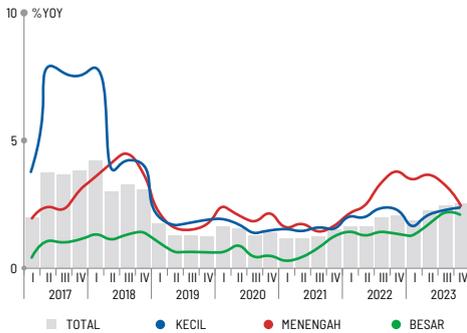
Bagi Arya, seorang pekerja di Jakarta, memilih hunian yang tepat bukan sekadar tentang lokasi, tetapi juga soal harga yang realistis. “Banyak pilihan di Bodetabek, tapi buat saya, lebih strategis tinggal di Jakarta,” ujarnya. Arya adalah salah satu dari banyak warga yang bergantung pada fasilitas kredit untuk memiliki rumah, tetapi keterbatasan pasokan hunian tipe kecil memaksa banyak orang mencari alternatif di luar Jakarta. Tantangan serupa juga dihadapi dalam sektor properti komersial, di mana permintaan tinggi mendorong kenaikan harga sewa dan jual.

Harga sewa properti komersial di DKI Jakarta mengalami peningkatan menjadi 1,78% pada triwulan IV 2024 (Grafik IV.3.1). Kenaikan ini didorong oleh permintaan sewa yang masih tinggi, sementara ketersediaan unit properti sewa tumbuh lebih lambat (Grafik IV.3.2). Peningkatan harga sewa terutama terlihat pada sektor perkantoran dan *convention hall*, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kegiatan MICE serta *event* di Jakarta.

Sementara itu, harga jual properti komersial di Jakarta juga meningkat, meski terbatas. Pada triwulan IV 2023, harga jual tumbuh dari 0,26% menjadi 0,34% (Grafik IV.3.1). Kenaikan ini didominasi oleh sektor perkantoran, sementara harga jual properti ritel (mall dan pusat perbelanjaan) serta pergudangan relatif stabil pada periode yang sama.

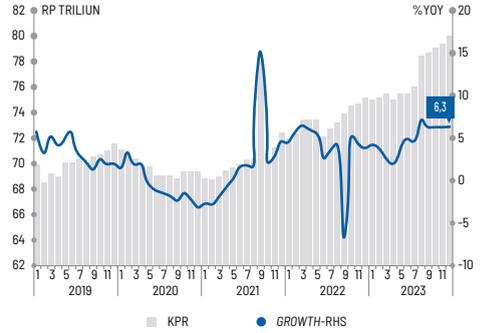
Kinerja Properti Residensial

Harga jual properti residensial di DKI Jakarta dan Bodetabek pada triwulan IV 2023 juga menunjukkan peningkatan (Grafik 1.3). Pertumbuhan ini didorong oleh tingginya permintaan, tercermin dari penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang tetap tumbuh tinggi sebesar 6,3% (yoy) pada triwulan IV 2023 (Grafik IV.3.4).



Sumber: Survei Harga Properti Residensial, Bank

Grafik IV.3.3 Perkembangan Harga Properti Residensial Jabodetabek



Sumber: Data Kredit, Bank Indonesia

Grafik IV.3.4 Perkembangan Penyaluran KPR di Jakarta

Berdasarkan tipe hunian, penyaluran KPR untuk rumah tinggal tipe besar (>70) dan menengah (22-70) meningkat signifikan, sementara penyaluran KPR untuk tipe kecil mengalami kontraksi akibat terbatasnya pasokan. Unit rumah tipe kecil hanya menyumbang 9,7% dari total unit yang dibiayai kredit, sedangkan tipe menengah dan besar masing-masing berkontribusi 49,3% dan 41%. Di sisi lain, penyaluran KPR untuk flat dan apartemen melambat, terutama untuk tipe kecil (<21), karena minimnya pasokan apartemen baru dengan tipe ini.

Pemerintah dan berbagai lembaga telah menerapkan beragam kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor properti. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

- I. Bank Indonesia memperpanjang kebijakan *Loan to Value* (LTV) 100% atau DP 0% hingga 31 Desember 2024.
- II. Kementerian Keuangan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) hingga 31 Desember 2024.
- III. Kementerian PUPR meluncurkan program KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
- IV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta fokus membangun rusunami, rumapadu, dan hunian terjangkau untuk mendukung kepemilikan rumah masyarakat.

Meski berbagai kebijakan telah diluncurkan, rendahnya penyaluran kredit untuk hunian tipe kecil menunjukkan perlunya memperluas pembangunan rusunami dan apartemen terjangkau di Jakarta dan Bodetabek. Hal ini bertujuan untuk menambah pasokan hunian

bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain memperluas pembangunan, dukungan berupa skema pembiayaan yang lebih terjangkau sangat diperlukan.

Dengan ketersediaan pasokan hunian yang mencukupi, fasilitas kredit yang mudah diakses, dan insentif pajak yang mendukung, sektor properti diharapkan dapat tumbuh lebih cepat dengan harga yang tetap terkendali. Dukungan kebijakan yang konsisten dan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri akan menjadi kunci bagi pertumbuhan sektor properti yang berkelanjutan di masa depan.

Seperti yang dikatakan G.K. Chesterton, *“Real estate is not just about property, it’s about people.”* Pemulihan dan pertumbuhan sektor properti di Jakarta tidak hanya bergantung pada angka-angka dan kebijakan, tetapi juga pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Tantangan yang ada saat ini justru bisa menjadi peluang untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan terintegrasi, di mana setiap orang memiliki akses ke hunian yang layak dan terjangkau. Dengan tersedianya hunian yang layak dan terjangkau, Jakarta juga dapat memperkuat aspek *accessibility* dan *livability* sehingga dapat meningkatkan daya saingnya sebagai Kota Global.



Foto : Bundaran HI, Jakarta

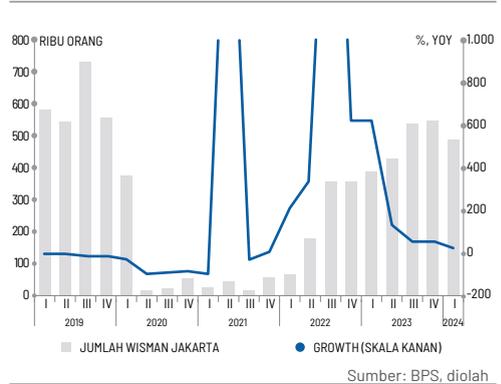
04. Destinasi Urban Berkelas Global

INTISARI

- Bagaimana Jakarta memanfaatkan wisata urban untuk memperkuat posisinya sebagai kota global.
- Apa saja strategi kreatif yang digunakan untuk memperpanjang masa tinggal wisatawan di Jakarta.
- Mengapa aplikasi dan kartu elektronik seperti Jakarta Tourist Pass memainkan peran penting bagi wisatawan.
- Bagaimana kolaborasi antara sektor publik dan bisnis mendukung industri pariwisata Jakarta.
- Apa yang dapat dipelajari dari berbagai kota besar dunia dalam membangun sektor pariwisata urban.

“Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Anonymous

Dinda, seorang pekerja lepas di Jakarta, memutuskan untuk menghabiskan hari dengan mengunjungi Monas dan museum di Kota Tua beberapa waktu lalu. Sebagai penduduk asli Jakarta, ia merasa sudah saatnya mengenal kota ini lebih dalam. Dari transportasi MRT yang nyaman hingga ragam kuliner di sekitar Monas, Dinda mendapati bahwa Jakarta menyimpan potensi wisata urban yang lebih dari sekadar gedung pencakar langit. Baginya, pengalaman ini membuktikan bahwa Jakarta bisa memberikan sensasi petualangan di tengah hiruk-pikuk kota besar.



Grafik IV.4.1 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara

Sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, sektor pariwisata, khususnya wisata urban (*urban tourism*), menjadi salah satu potensi utama yang terus dikembangkan. Pemprov DKI Jakarta menetapkan wisata urban sebagai program prioritas melalui KepGub No. 588/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Urban. Wisata urban merujuk pada kegiatan pariwisata di kawasan perkotaan yang menonjolkan karakteristik khas kota. Berdasarkan klasifikasi UNWTO, ada sembilan kategori wisata urban di Jakarta: Wisata Sejarah, Budaya, Belanja, Rekreasi, Kuliner, MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions*), Olahraga/Kebugaran, Religi dan Ziarah, serta Wisata Alam.

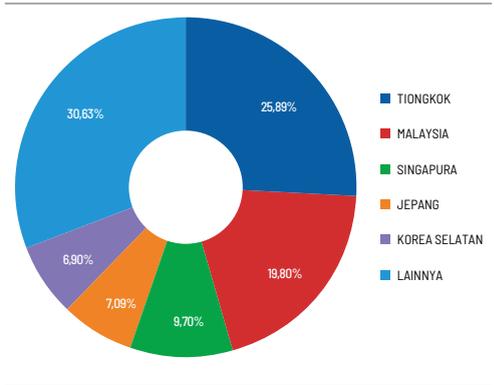
Pengembangan wisata urban selaras dengan identitas Jakarta sebagai kota metropolitan yang unggul dalam infrastruktur dan fasilitas publik. Kota ini memiliki transportasi

Tabel IV.4.1 Lokasi Wisata Urban di DKI Jakarta

No	Jenis Wisata Urban	Lokasi Pengembangan di Jakarta
1	Sejarah	Monumen Nasional, Istana & Balai Kota, Kantor Pos, Museum Kesejarahan, Rumah si Pitung, Toko Merah, Kali Besar Kota Tua
2	Budaya	Museum Wayang, Museum Nasional, Gedung Joang 45, Pencak Silat, Batik Encim
3	Belanja	Mall Senayan City, Sarinah, PosBloc, Mall Central Park, Pasar Mayestik, Thamrin City
4	Rekreasi	Waterboom PIK, Taman Margasatwa Ragunan, Dunia Fantasi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
5	Kuliner	Sabang, Chilax, Pantai Indah Kapuk
6	MICE	JIEXpo Kemayoran, JCC Senayan, Ancol, Hotel
7	Olahraga/kebugaran	Jetski Ancol, Golf PIK, Jakarta International Stadium, Hutan Kota GBK, Aquatic, Jakarta International Velodrome, Wisata Sepeda
8	Religi dan Ziarah	Kuil Shiva Mandhir, Makam Habib Cikini, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Masjid Ramlie Mustofa
9	Alam	Tebet Eco Park, Kepulauan Seribu, Taman Menteng, Taman Wisata Alam Mangrove PIK

Sumber : Disparekraf DKI Jakarta

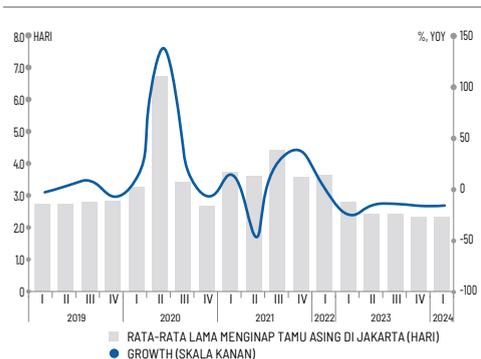
terintegrasi, layanan keamanan yang baik, fasilitas ramah disabilitas, dan aksesibilitas yang memadai. Program ini juga mendukung target pariwisata tahun 2024, yaitu 1,87 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 34,18 juta wisatawan nusantara (wisnus). Pada triwulan I 2024, tercatat sebanyak 486,74 ribu wisman datang ke Jakarta, tumbuh 26,76% secara tahunan (yoy) (Grafik IV.4.1). Kontribusi terbesar datang dari Tiongkok (25,89%), Malaysia (19,80%), dan Singapura (9,70%) (Grafik IV.4.2).



Grafik IV.4.2 Asal Negara Wisatawan Mancanegara

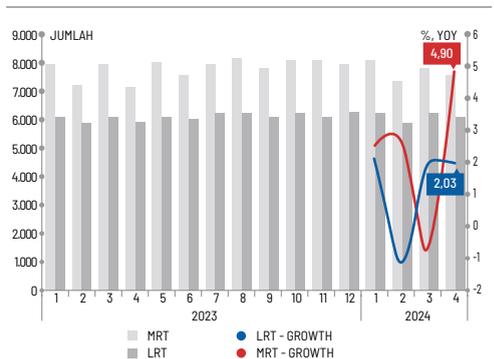
Namun, rata-rata lama menginap wisatawan asing di Jakarta hanya 1,59 hari (Grafik IV.4.3), jauh lebih pendek dibandingkan rata-rata global sebesar 4,7 hari menurut survei Travelness 2023. Pendeknya lama tinggal ini memengaruhi pengeluaran wisatawan dan berdampak pada devisa.

Di sisi wisatawan domestik, pergerakan wisnus pada triwulan I 2024 tercermin dari 42,32 ribu perjalanan menggunakan transportasi publik seperti MRT dan LRT, dengan pertumbuhan 1,29% (yoy) (Grafik IV.4.4). Angka ini masih jauh dari target 34,18 juta perjalanan pada tahun 2024.



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.4.3 Rata-rata Length of Stay Tamu Asing di Jakarta



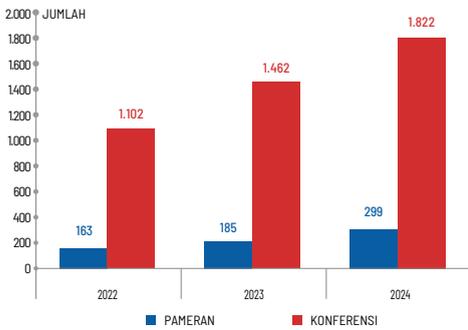
Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.4.4 Perkembangan Jumlah Perjalanan Domestik Menggunakan Transportasi Publik di Jakarta

Potensi Wisata Urban Jakarta

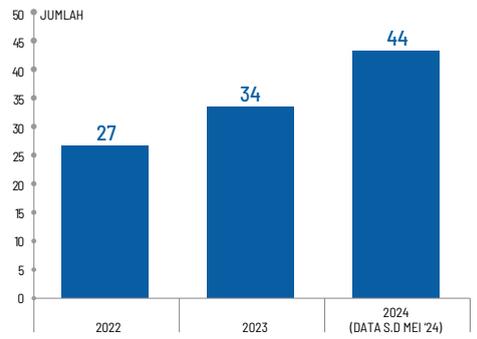
Pengembangan wisata urban juga bertujuan memperkuat posisi Jakarta dalam indeks kota global. Dalam *Global Power City Index (GPCI)*, Jakarta berada di peringkat 42 dari 48 negara untuk kategori *tourism/cultural interaction*, masih tertinggal dibandingkan kota Asia lainnya seperti Singapura, Bangkok, dan Kuala Lumpur.

Beberapa destinasi unggulan wisata urban Jakarta meliputi Ancol, Monas, Ragunan, Kota Tua, dan TMII. Kelima lokasi ini menarik jumlah pengunjung tertinggi sepanjang 2023 dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain itu, Jakarta memiliki keunggulan sebagai pusat ekonomi dan bisnis, dengan fasilitas MICE yang lengkap—mulai dari stadion, *hall*, hingga hotel berbintang—yang menjadikan kota ini ideal untuk menyelenggarakan *event* besar. Peningkatan jumlah *event* MICE dan kegiatan lain juga terus terlihat (Grafik IV.4.5 dan IV.4.6).



Sumber: dari segala sumber

Grafik IV.4.5 Jumlah Penyelenggaraan Pameran dan Konferensi di Jakarta



Sumber: dari segala sumber

Grafik IV.4.6 Jumlah Penyelenggaraan Konser Musik di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan *Jakarta Tourist Pass*, kartu elektronik yang memudahkan wisatawan mengakses transportasi umum dan berbagai destinasi wisata, seperti museum, Monas, Ancol, dan Ragunan. Selain itu, aplikasi *Jakarta Tourist Pass-JakOnePay* dirancang untuk menyediakan informasi wisata, daftar destinasi populer, dan kalender *event* di Jakarta. Pemprov DKI berencana memperluas layanan ini melalui *one-stop service* di *website* resmi, memungkinkan wisatawan membeli tiket dan mengikuti *event* secara lebih praktis.

Untuk memperpanjang masa tinggal dan meningkatkan daya tarik, Pemprov DKI mendorong integrasi paket wisata dari berbagai atraksi kota. Selain itu, pengembangan

sektor ini juga menerapkan strategi 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas) dan 2P (Promosi dan Pelaku Usaha), guna memperkuat citra Jakarta sebagai kota global dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Pada akhirnya, seperti yang Dinda alami, Jakarta lebih dari sekadar rutinitas dan hiruk-pikuk jalanan. Kota ini menyimpan beragam pengalaman urban yang dapat membuat setiap kunjungan menjadi petualangan baru. Dalam perjalanan menjadi kota global, Jakarta tidak hanya menawarkan destinasi, tetapi juga membuka kesempatan bagi setiap orang untuk memperkaya diri dengan pengalaman. Seperti kata pepatah, *“Travel is the only thing you buy that makes you richer.”* Dengan pendekatan kreatif dan inovatif dalam pariwisata urban, Jakarta siap melangkah lebih jauh, menyambut wisatawan dari seluruh dunia untuk menemukan kekayaan tak ternilai di setiap sudut kota.





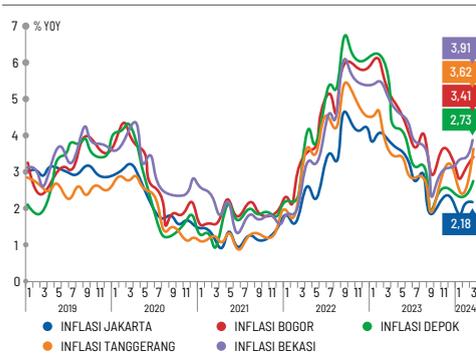
Foto : Pasar Induk Beras Cipinang

05. Sinergi Baru Pengendalian Inflasi Jabodetabekjur

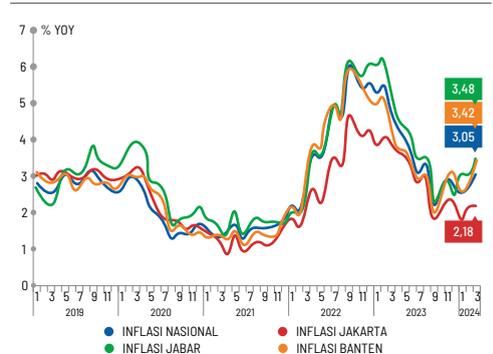
INTISARI

- Bagaimana Jakarta memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi dan distribusi pangan.
- Upaya bersama kota-kota di Jabodetabekjur untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
- Pentingnya kolaborasi dan kerjasama antar daerah untuk mendukung ketahanan pangan.
- Peran teknologi dan sistem informasi dalam pengendalian harga dan stok di kawasan aglomerasi.

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new.” - Socrates



Grafik IV.5.1 Perkembangan Inflasi Jabodetabek



*SBH 2022

Sumber: BPS

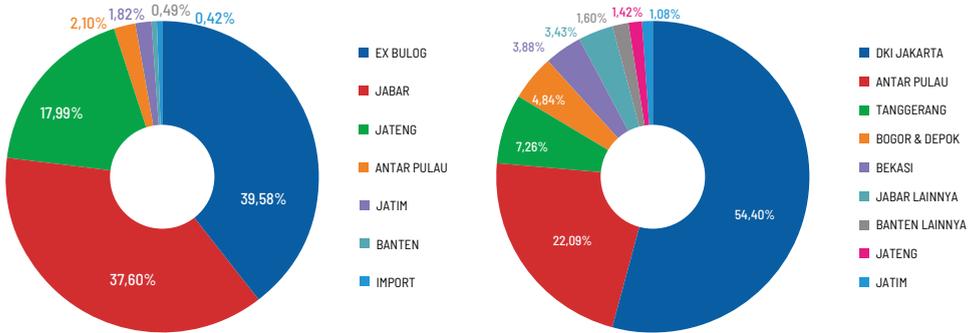
Grafik IV.5.2 Perkembangan Inflasi Provinsi

Di sebuah pasar di Jakarta, pedagang beras tengah melayani pembeli dari Bekasi yang datang khusus untuk mendapatkan stok beras dengan harga lebih terjangkau. “Harga di sini lebih stabil, dan kualitasnya bagus,” ujar Budi, pedagang beras yang telah berjualan di Pasar Induk Cipinang selama puluhan tahun. Peran Jakarta sebagai pusat distribusi utama begitu terasa hingga ke pelosok Bodetabek dan bahkan Jawa Tengah. Sinergi ini mencerminkan betapa erat keterkaitan antara kota-kota di kawasan aglomerasi Jabodetabekjur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024 menandai momentum penting bagi Jakarta dalam menentukan arah kebijakan pasca-pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara. Undang-undang ini juga mempertegas peran Jakarta di kawasan aglomerasi yang mencakup 10 daerah: Jakarta, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Cianjur, dikenal sebagai Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur.

Dalam struktur baru ini, Dewan Aglomerasi akan mengoordinasikan kawasan tersebut. Peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan global akan semakin kuat dengan status Daerah Khusus Jakarta. Ketika dikombinasikan dengan 10 daerah lainnya, kawasan Jabodetabekjur memegang peran penting dalam perekonomian dan inflasi nasional.

Wilayah ini menyumbang hampir sepertiga ekonomi Indonesia. Dari sisi inflasi, kota-kota di Jabodetabek sebagian besar berada dalam sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ pada Maret 2024, kecuali Bekasi (3,91% yoy) dan Tangerang (3,62% yoy) (Grafik V.5.1). Secara provinsi, inflasi DKI



Sumber: : Sumber: PT Food Station Tjipinang Jaya

Grafik IV.5.3 Sumber Pasokan dan Distribusi Komoditas Beras Jakarta

Jakarta tercatat 2,18% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional 3,05% (yoy), sementara Jawa Barat dan Banten sedikit lebih tinggi, masing-masing 3,48% dan 3,42% (yoy) (Grafik V.5.2). Perbedaan tingkat inflasi ini menciptakan peluang sinergi karena komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras, serupa di seluruh wilayah.

Sinergi Ekonomi

Jakarta memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Bodetabek sebagai megapolitan dan berperan sebagai hub distribusi pangan. Pasokan strategis seperti beras untuk Jakarta sebagian besar berasal dari Jawa Barat dan didistribusikan kembali ke Bodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga antar pulau (Grafik V.5.3). Keterkaitan ini mendukung stabilitas inflasi, dengan Jakarta mencatat volatilitas terendah di kawasan (Tabel V.5.1). Disparitas harga pangan juga relatif rendah untuk komoditas seperti beras, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras, meski harga minyak goreng masih berfluktuasi.

Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) menjadi kunci stabilitas harga. Jakarta telah menjalin KAD dengan Jawa Barat dan Banten dalam format *Business to Business* (B2B), melibatkan BUMD pangan DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya dan Dharma Jaya) serta koperasi dan korporasi. Komoditas yang dikerjasamakan meliputi beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi. Untuk beras, PT Food Station Tjipinang Jaya bahkan mendukung produktivitas petani melalui skema budidaya (*on-farm*) dan *standby buyer*.

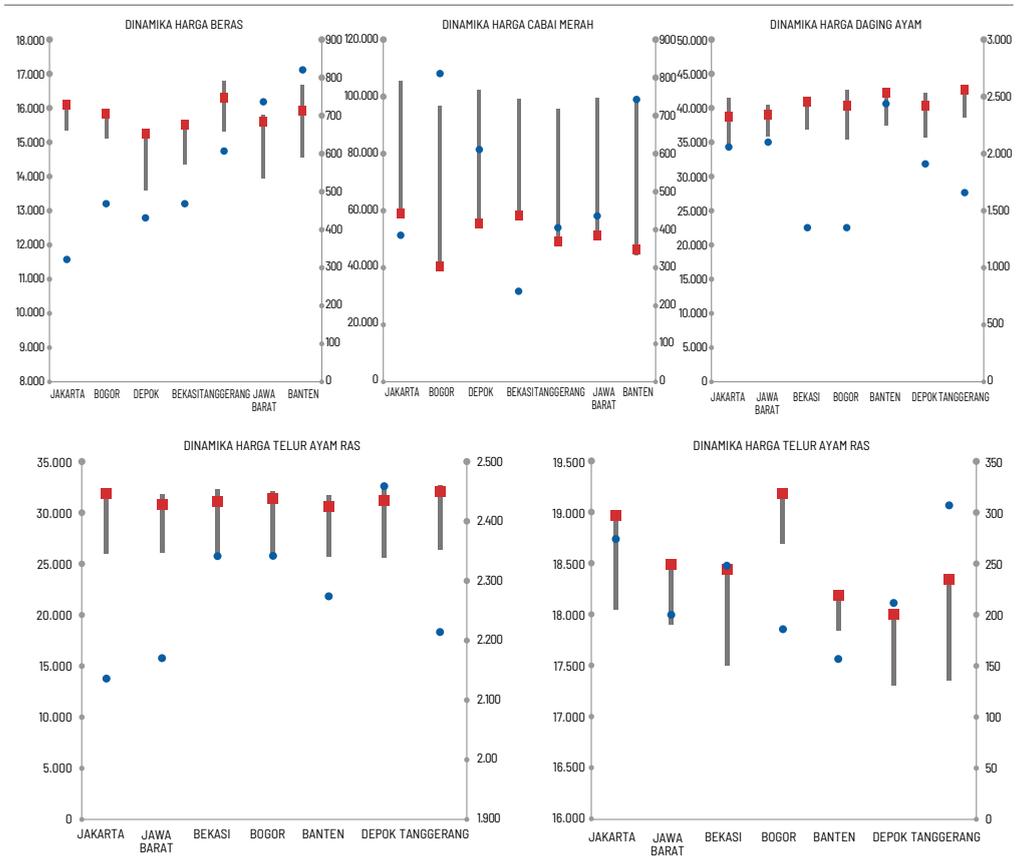
Tabel IV.5.1 Volatilitas Inflasi Jabodetabek 2020 - 2023

Wilayah	Stdev
Jakarta	0,26
Bogor	0,31
Depok	0,29
Bekasi	0,29
Tangerang	0,30
Jabar	0,29
Banten	0,30

Sumber: BPS

Sinergi pengendalian inflasi di Jabodetabekjur didukung oleh digitalisasi dan sistem informasi harga serta stok pangan. DKI Jakarta memanfaatkan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) untuk memantau harga 37 komoditas di 46 pasar, sementara Pusat Informasi Beras Cipinang – Food Station mengawasi harga dan stok beras di Pasar Induk Cipinang. Sistem Informasi Ketahanan Pangan juga memantau 44 komoditas lainnya. Jawa Barat memiliki Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Simawaspagi, sementara Banten menggunakan Sipagi Banten untuk mengawasi harga 32 komoditas di 32 pasar. Ke depan, diperlukan integrasi sistem informasi harga dan stok pangan di seluruh kawasan.

Untuk memastikan inflasi terkendali, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat koordinasi lintas wilayah. *Quick-win* sinergi seperti Operasi Pasar dan Pasar



Sumber: BI, diolah

Grafik IV.5.4 Perkembangan Indeks Ekspektasi Konsumen dan Komponennya

Murah dapat digelar untuk meratakan harga di seluruh daerah. Penguatan pasokan pangan bisa dilakukan melalui penanaman dan panen serempak serta intensifikasi *urban farming*. Pemantauan harga dan distribusi pangan juga perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan kelancaran suplai.

Penguatan Komunikasi

Upaya pengendalian inflasi akan lebih efektif dengan komunikasi ekspektasi yang kuat. Iklan Layanan Masyarakat mengenai Belanja Bijak dan Konsumsi Pangan Olahan dapat disebarluaskan oleh para pemimpin daerah melalui berbagai media. Untuk jangka menengah, TPID dapat memperkuat pertukaran data dan informasi harga serta memperkuat rantai pasok pasar induk.

Penguatan KAD juga harus dilanjutkan dengan perluasan model bisnis *on-farm* dan *standby buyer* untuk menjaga kestabilan harga di daerah produsen dan konsumen. Diversifikasi pangan serta perluasan *urban farming* dengan memanfaatkan lahan tidur dan melibatkan pesantren akan memperkuat ketahanan pangan di Jabodetabek. Koordinasi TPID harus dilakukan secara berkala, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan.

Seperti pesan Socrates tentang perubahan, pengendalian inflasi dan pembangunan ekonomi kawasan Jabodetabekjur membutuhkan fokus pada inovasi dan kerjasama baru, bukan sekadar menanggulangi masalah yang ada. Dengan sinergi dan koordinasi yang semakin kuat, kawasan aglomerasi ini berpotensi tidak hanya menjadi pusat perekonomian nasional, tetapi juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas wilayah bisa menciptakan perubahan nyata dan berkelanjutan.





Foto : Gudang BULOG, Jakarta Utara

06. Mengamankan Pasokan, Mengendalikan Harga

INTISARI

- Bagaimana inovasi urban farming mendukung keberlanjutan pangan Jakarta.
 - Kerja sama antar daerah menjadi kunci kestabilan harga pangan.
 - Peran operasi pasar dalam menstabilkan harga pangan di ibu kota.
 - Pentingnya distribusi yang efisien untuk menjaga keterjangkauan harga.
 - Strategi komunikasi TPID dalam mengendalikan ekspektasi inflasi.
-

“In the middle of every difficulty lies opportunity.”

– Albert Einstein

Dalam setiap tantangan, tersembunyi peluang. Pandangan ini relevan bagi Jakarta, kota yang menghadapi tantangan unik dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai daerah nonprodusen. Seperti halnya seorang pedagang kecil di Pasar Tanah Abang, yang bercerita bahwa setiap musim panen adalah kesempatan bagi usahanya bertahan meski harga bahan pokok fluktuatif.



Gambar IV.6.1 Kegiatan Urban Farming Jakarta

Jakarta menghadapi tantangan struktural dalam pengendalian harga, terutama karena posisinya sebagai daerah nonprodusen dengan populasi besar. Selain memenuhi kebutuhan 10,67 juta penduduk tetap, Jakarta juga melayani sekitar 3,3 juta “penduduk siang”—warga dari Bodetabek yang beraktivitas di ibu kota. Hampir 99% kebutuhan pangan Jakarta dipasok dari luar daerah, membuat pengendalian harga menjadi krusial.

Untuk menghadapi kondisi ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta mengimplementasikan strategi 4K, yaitu:

- Peningkatan produktivitas melalui *urban farming*.
- Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan pasokan.
- Operasi Pasar Murah guna memastikan keterjangkauan harga.
- Distribusi pangan yang efisien melalui BUMD pangan Jakarta.
- Koordinasi dan komunikasi efektif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi.

Peningkatan Produktivitas

Dengan luas lahan pertanian hanya ±400 hektar di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat, Utara, dan Timur, sektor pertanian di ibu kota menghadapi tantangan seperti lahan tidur dan alih fungsi lahan. Selain itu, karakteristik sosiokultural warga Jakarta yang bukan petani membuat *urban farming* menjadi solusi tepat.

Desain besar *urban farming* 2018–2030 mencakup budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di perkotaan, melibatkan pertanian, peternakan, budidaya perairan, dan hortikultura.

Program ini menargetkan ruang-ruang seperti rusun, lahan kosong, pekarangan, sekolah, gedung, RPTRA, hingga lahan laut. Beberapa target utama:

- 30% ruang terbuka produktif.
- 30% peningkatan produksi pangan dan produk olahan.
- Sertifikasi 1.000 produk olahan pangan.

Pencapaian *urban farming* di Jakarta menempatkannya sebagai provinsi dengan proporsi Unit Pertanian Perseorangan (UTP) terbesar di Indonesia pada 2023 (1,48%). Kebijakan ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 54/2022 yang menetapkan PBB-P2 sebesar 0% untuk lahan yang lebih dari 50% digunakan untuk pertanian dan perikanan.

Pengembangan ini didukung oleh APBD, APBN, CSR, dan institusi pendidikan untuk penyediaan bibit, promosi, sertifikasi hasil, serta edukasi. Tiga model pengembangan *urban farming* meliputi:

1. Budidaya hemat lahan: hidroponik dan vertiminaponik.
2. Penggunaan ruang: rooftop, gang, dan dinding.
3. Agroeduwisata sebagai sarana edukasi dan rekreasi.

Perluasan Kerja Sama

Jakarta bekerja sama dengan daerah surplus untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Tiga BUMD pangan—PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya—aktif menjalin KAD dengan daerah mitra.

- PT Food Station: bekerja sama dengan 32 daerah untuk pasokan beras, gula, telur, dan tepung.
- Perumda Dharma Jaya: bermitra dengan 7 daerah untuk pasokan daging, ikan, dan sapi hidup.
- Perumda Pasar Jaya: bekerja sama dengan 7 daerah untuk komoditas bawang dan cabai.



Gambar IV.6.2 Model Pengembangan Urban Farming Jakarta (1a. Hidroponik; 1b. Vertiminaponik; 2. rooftop, gang, dinding; 3. Agroeduwisata)

KAD beras dilaksanakan dengan beberapa skema:

1. Skema 1: Pembeli Siaga
Kerja sama dengan Gapoktan untuk memastikan pembelian hasil panen (10.243 ha pada 2023, target 12.500 ha pada 2024).
2. Skema 2: Budidaya (*On-Farm*)
Pengembangan lahan padi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur (1.000 ha di 2023, target 1.250 ha di 2024).
3. Skema 3: Pembelian dari Penggilingan
Mendukung penggilingan kecil di delapan wilayah, termasuk Lampung Timur.
4. Skema 4: Mitra Produksi
Kerja sama dengan perusahaan penggilingan dengan kapasitas produksi 20.000 ton/bulan dan kapasitas simpan 23.500 ton.

TPID DKI Jakarta secara rutin mengadakan berbagai bentuk Operasi Pasar Murah guna memastikan keterjangkauan harga:

- 1) Pasar murah oleh BUMD pangan.
- 2) Sembako murah bekerja sama dengan CSR swasta.
- 3) Kegiatan pangan bersubsidi dengan anggaran Rp800 miliar.
- 4) Gerakan Pangan Murah bersama Bapanas.
- 5) Program SPHP yang telah mencapai 114% target per akhir Agustus 2024.

Distribusi pangan yang efisien dilakukan melalui berbagai kanal yang dimiliki BUMD DKI Jakarta, seperti rumah beras, pasar modern, toko daging, rumah potong hewan, Jakmart, Jakgrosir, dan gerai KJP. Kanal distribusi ini bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

TPID DKI Jakarta juga memperkuat koordinasi dan komunikasi publik untuk mengendalikan inflasi pangan melalui berbagai inisiatif:

1. *High-Level Meeting* (HLM) dengan Pj Gubernur dan Sekda DKI.
2. Rapat rutin tim teknis untuk monitoring harga dan pasokan.
3. *Talkshow* di TV dan radio nasional terkait pengendalian inflasi.
4. Iklan Layanan Masyarakat untuk edukasi konsumen.
5. Dialog dengan tokoh agama mengenai belanja bijak.
6. Demo masak dan *showcase* UMKM pangan olahan.

7. Pengawasan mutu dan keamanan pangan.
8. Kampanye perubahan pola konsumsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dengan strategi dan kerja sama yang kuat, Jakarta terus berupaya mengendalikan inflasi pangan secara efektif meskipun bukan daerah produsen. *Urban farming* dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) menjadi dua pilar utama dalam menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan pangan bagi seluruh warga ibu kota.

Albert Einstein pernah mengatakan, “*In the middle of every difficulty lies opportunity.*” Perjalanan Jakarta dalam mengatasi tantangan sebagai daerah nonprodusen adalah bukti nyata bahwa di balik setiap kesulitan, terdapat peluang untuk berinovasi dan berkembang. Kolaborasi dengan daerah lain, optimalisasi *urban farming*, hingga pelaksanaan operasi pasar hanyalah beberapa contoh bagaimana ibu kota mampu memanfaatkan setiap peluang di tengah tantangan struktural.





Foto : Kartu Jak Lingko

07. Satu Kartu, Seribu Kemudahan

INTISARI

- Bagaimana inovasi transportasi digital membantu mengurangi kemacetan di Jakarta.
 - Peran integrasi moda transportasi dalam memudahkan mobilitas warga ibu kota.
 - Inisiatif Bank Indonesia Jakarta dalam mendukung digitalisasi transportasi daerah.
 - Pentingnya interoperabilitas dan interkoneksi dalam sistem pembayaran digital.
 - Manfaat penerapan pembayaran non-tunai untuk mendorong budaya digital di masyarakat.
-

Hana, seorang pekerja kantoran di bilangan Sudirman, kini tidak lagi pusing dengan perjalanan pulang-pergi. Sebelumnya, ia harus berganti moda transportasi dengan beberapa tiket berbeda, membuat perjalanannya rumit dan memakan waktu. Namun, sejak menggunakan platform JakLingko, Hana merasakan kemudahan. Dengan satu kartu elektronik, ia dapat menggunakan MRT, Transjakarta, dan LRT tanpa hambatan, serta menikmati sistem pembayaran digital yang praktis. Pengalaman seperti inilah yang kini menjadi bagian dari keseharian warga Jakarta, seiring dengan transformasi transportasi publik di ibu kota.

Perkembangan teknologi telah membawa banyak kemudahan bagi masyarakat DKI Jakarta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal transportasi. Salah satu inovasi penting adalah kehadiran *platform* JakLingko, yang mengintegrasikan infrastruktur fisik, layanan, rute, data, informasi, serta sistem pembayaran dan tarif transportasi di wilayah DKI Jakarta. Integrasi moda transportasi ini terwujud melalui kolaborasi *Public Transport Operator* (PTO) seperti PT Transjakarta, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Upaya ini menjawab tantangan optimalisasi layanan transportasi umum sekaligus membantu mengurangi kemacetan di wilayah ibu kota.

Platform JakLingko telah menerapkan *Central Clearing House System* (CCHS) pada gerbang operator transportasi yang terhubung dengan masing-masing PTO, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, dan *Commuterline*. CCHS ini memungkinkan pengelolaan pembayaran tiket terpadu melalui kartu elektronik atau tiket berbasis QR. Selain itu, sistem pembayaran JakLingko kini telah mendukung instrumen digital seperti Kartu Uang Elektronik berbasis server dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dinamis.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta ikut aktif dalam mendukung digitalisasi transportasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DKI Jakarta. Salah satu peran pentingnya adalah merumuskan strategi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Elektronifikasi Transportasi, serta Elektronifikasi Bantuan Sosial. Dukungan ini diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.550/2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Beberapa langkah konkret telah dilakukan untuk memperkuat elektronifikasi transportasi melalui program kerja jangka pendek dan menengah TP2DD, di antaranya:

- I. Monitoring pelaksanaan JakLingko oleh KPw BI Jakarta guna memastikan pembayaran dilakukan secara inklusif melalui berbagai kanal, dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas.

- II. Pengembangan fitur *Account-Based Ticketing (ABT)* di *platform* JakLingko. Fitur ini memungkinkan penyaluran subsidi biaya transportasi bagi masyarakat DKI Jakarta yang termasuk dalam golongan khusus.

Sebagai *role model* implementasi Elektronifikasi Transportasi di Indonesia, program Integrasi Sistem Pembayaran pada Transportasi Multi Moda menjadi program unggulan TP2DD DKI Jakarta dan berperan penting dalam Championship TP2DD tahun 2023. Penerapan pembayaran non-tunai (*cashless*) di transportasi umum di wilayah DKI Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan budaya digital tetapi juga memperkuat inklusi keuangan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat, platform seperti JakLingko menunjukkan bahwa inovasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan transportasi perkotaan. Dengan penerapan *cashless payment* dan integrasi moda transportasi, DKI Jakarta membuktikan bahwa perubahan tidak hanya mungkin, tetapi juga diperlukan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan inklusif bagi semua warganya.



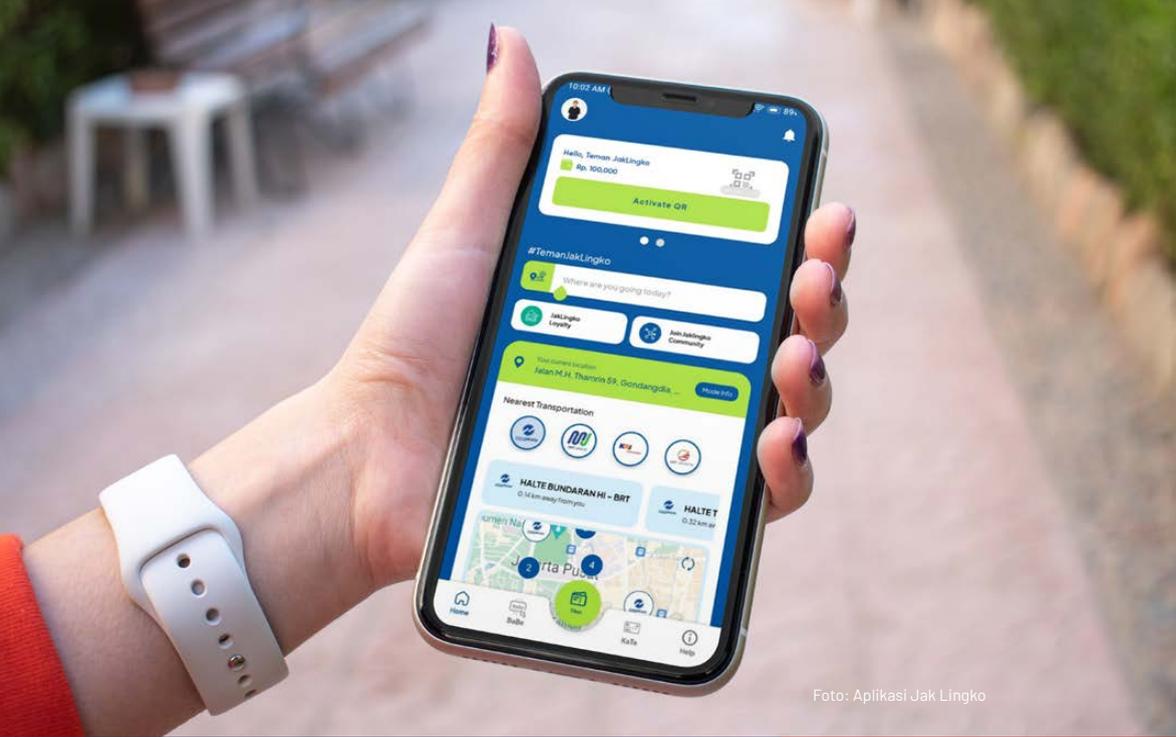


Foto: Aplikasi Jak Lingko

08. Integrasi Sistem Pembayaran Sektor Transportasi Jakarta

INTISARI

- Transformasi digital transportasi di Jakarta melalui aplikasi JakLingko.
- Program Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ).
- Inovasi *Account-Based Ticketing* (ABT) untuk efisiensi layanan.
- Pencapaian Jakarta dalam *Urban Mobility Readiness Index* dan *Sustainable Mobility Index 2023*.
- Dampak positif digitalisasi transportasi terhadap lingkungan dan kenyamanan warga.

“Technological progress must be accompanied by efforts to improve the quality of life of society.”

– Vint Cerf

Pada suatu pagi di Stasiun MRT Lebak Bulus, Nia, seorang pekerja kantoran di Jakarta Selatan, tampak sibuk dengan ponselnya. Ia memesan tiket kereta melalui aplikasi JakLingko sambil sekaligus memesan ojek daring untuk menjemputnya dari stasiun tujuan. “Sekarang, semua serba mudah. Tidak perlu lagi bingung dengan tiket berbeda atau bayar tunai. Satu aplikasi, semua terhubung,” ujar Nia dengan senyum puas. Kisah seperti ini menjadi bagian dari transformasi digital yang mengubah wajah transportasi di Jakarta.

30

World rank 2023

On average, how long did it take to drive 10 km in 2023?

23_{min} **20**_s
40 s more than in 2022

Sumber: TomTom Traffic Index, 2023 dan East Ventures

Gambar IV.8.1 Posisi TomTom Traffic Index Jakarta

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
12:00 AM	16 min 30 s	14 min 40 s	14 min 50 s	15 min	15 min 10 s	15 min 10 s	15 min 50 s
	15 min 30 s	14 min 20 s	14 min 20 s	14 min 30 s	14 min 30 s	14 min 30 s	15 min
02:00 AM	14 min 40 s	13 min 40 s	13 min 40 s	13 min 50 s	13 min 50 s	13 min 50 s	14 min 10 s
	14 min	13 min	13 min 10 s	13 min 10 s	13 min 20 s	13 min 10 s	13 min 40 s
04:00 AM	13 min 20 s	12 min 20 s	12 min 40 s	13 min 10 s			
	13 min 30 s	13 min 40 s	13 min 40 s	13 min 30 s	13 min 40 s	13 min 30 s	13 min
06:00 AM	14 min 50 s	18 min 40 s	18 min 40 s	18 min 20 s	18 min 30 s	18 min 10 s	14 min 10 s
	15 min 30 s	23 min 30 s	23 min 30 s	23 min	22 min 40 s	22 min	15 min 30 s
08:00 AM	16 min 20 s	27 min 20 s	27 min 30 s	27 min 20 s	26 min 10 s	24 min 20 s	16 min 50 s
	17 min 40 s	25 min 10 s	26 min 10 s	25 min 40 s	24 min 40 s	22 min 40 s	18 min 20 s
10:00 AM	18 min 10 s	24 min	25 min 20 s	25 min 10 s	24 min 20 s	23 min 20 s	20 min 10 s
	18 min 50 s	23 min 50 s	25 min 10 s	25 min 20 s	24 min 40 s	23 min 50 s	21 min 50 s
12:00 PM	19 min 40 s	23 min 40 s	24 min 50 s	25 min 10 s	24 min 50 s	21 min 20 s	22 min 50 s
	20 min 20 s	23 min 40 s	24 min 50 s	25 min 10 s	25 min	24 min 10 s	24 min
02:00 PM	20 min 20 s	24 min 10 s	25 min 40 s	26 min 10 s	25 min 40 s	26 min 40 s	25 min 10 s
	20 min 30 s	24 min 30 s	26 min	26 min 30 s	25 min 50 s	27 min 20 s	25 min 40 s
04:00 PM	20 min 40 s	26 min 40 s	27 min 40 s	28 min 20 s	27 min 20 s	28 min 30 s	25 min 50 s
	20 min 30 s	31 min 10 s	32 min 10 s	32 min 50 s	31 min 20 s	33 min 20 s	25 min 10 s
06:00 PM	20 min 30 s	31 min	32 min 30 s	33 min	31 min 20 s	33 min 40 s	24 min 20 s
	20 min	26 min 30 s	28 min 10 s	28 min 40 s	27 min 10 s	29 min 40 s	23 min
08:00 PM	19 min 40 s	20 min 50 s	22 min 20 s	22 min 50 s	22 min	24 min 10 s	21 min 30 s
	19 min 10 s	18 min 40 s	19 min 40 s	20 min 10 s	19 min 50 s	22 min	21 min 50 s
10:00 PM	18 min 20 s	18 min	18 min 40 s	19 min	18 min 50 s	21 min	21 min 40 s
	16 min 10 s	16 min 10 s	16 min 30 s	16 min 40 s	16 min 30 s	18 min	18 min 40 s

Gambar IV.8.2 Waktu Tempuh Perjalanan di Jakarta Berdasarkan Jam Operasional

Membangun Jakarta sebagai kota global dan mempertahankan modernitasnya sebagai kota cerdas adalah bagian dari visi jangka panjang Jakarta untuk menjadi pusat perdagangan, layanan jasa dan keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan global, khususnya setelah pemindahan Ibu Kota Negara.

Meskipun Jakarta telah menjadi barometer kota maju di tingkat nasional, tantangan masih ada dalam memperkuat daya saingnya di antara kota-kota global dunia. Salah satu fokusnya adalah peningkatan kualitas mobilitas masyarakat melalui pembangunan infrastruktur transportasi, jalur pedestrian, integrasi antarmoda, serta penerapan teknologi pada transportasi umum.

Untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginisiasi Program Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ). Program ini bertujuan memperkuat infrastruktur transportasi umum dan menghadirkan sistem pembayaran digital terintegrasi pada layanan multimoda, *ride hailing*, dan *park and ride*.

225_h

time spent driving

117h due to congestion

45 x  Approximately 45 books

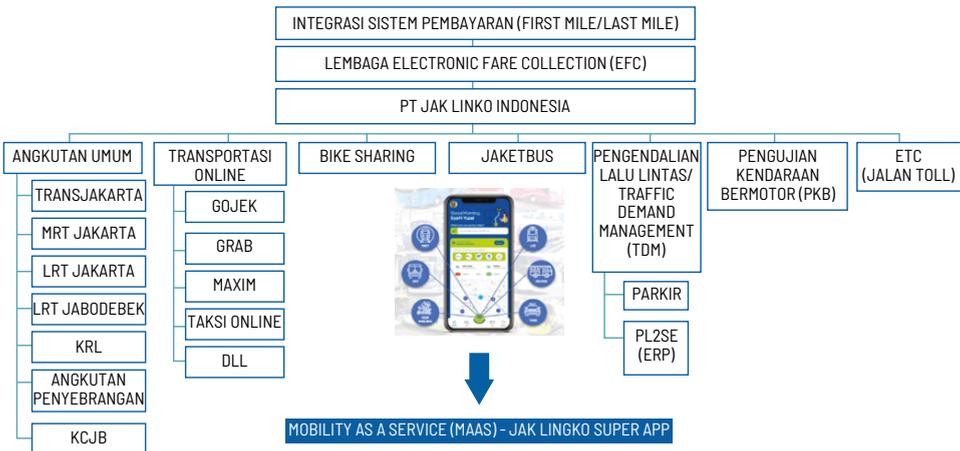
969_{kg}

CO₂ emitted

270kg due to congestion

97 x  97 trees grown over a year to absorb

Gambar IV.8.3 Total Waktu dan Produksi Emisi Mengendara di Jakarta 2023



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Gambar IV.8.4 Skema Perluasan Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Jakarta (EIPTJ)



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Gambar IV.8.5 Skema *Mobility as a Service, First Mile-Last Mile*



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2023

Grafik IV.8.1 Perkembangan Penumpang Angkutan Umum Jakarta (juta)

Sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik, Pemprov DKI menyediakan aplikasi JakLingko, yang menghubungkan berbagai moda transportasi dalam satu sistem *e-ticketing*. Aplikasi ini mendukung kebijakan peningkatan penggunaan angkutan umum massal dan pembatasan kendaraan bermotor pribadi (Pergub DKI No. 68/2021). Dengan konsep *Mobility as a Service* (MaaS), pengguna dapat menikmati tarif terintegrasi dari MRT Jakarta, TransJakarta, LRT Jakarta, hingga KRL *Commuterline*. Selain itu, layanan *First Mile-Last Mile* memudahkan pemesanan kendaraan *ride hailing* dari dan menuju stasiun terdekat. Saat ini, JakLingko telah bekerja sama dengan aplikasi Grab dalam integrasi layanan ini.

Fasilitas pembayaran digital juga menjadi bagian penting dari JakLingko, yang mendukung berbagai metode nontunai seperti QRIS, uang elektronik, dan *mobile banking* melalui *virtual account*. Kolaborasi antara sistem *e-ticketing* dan kanal pembayaran ini memperkuat implementasi elektronifikasi di sektor transportasi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendorong mekanisme *Park and Ride* di titik-titik stasiun di perbatasan Jakarta. Hal ini diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan dari Bodetabek yang masuk ke Jakarta. Lokasi-lokasi pengembangan meliputi Stasiun MRT Lebak Bulus, Ragunan, Terminal Kampung Rambutan, Pulo Gebang, South Quarter, Terminal Pinang Ranti, PGC Cililitan, dan Kalideres.

Inovasi dalam transportasi publik terus dikembangkan, termasuk *Account-Based Ticketing* (ABT), yang memungkinkan layanan disesuaikan dengan profil pengguna. Beberapa fitur ABT meliputi:

1. *Easy to Go* – Pengguna bisa *check-in* dan *check-out* dengan QR token tanpa memasukkan titik berangkat atau tujuan.
2. *Period Pass* – Langganan paket tarif hemat untuk mendorong penggunaan transportasi publik secara berkelanjutan.
3. Subsidi Golongan Khusus – Subsidi tepat sasaran bagi penerima yang terverifikasi berdasarkan Pergub No. 133/188.

Di masa depan, penerapan ABT akan memungkinkan tarif transportasi yang lebih adil, disesuaikan dengan jarak, domisili, dan tingkat pendapatan pengguna. Subsidi tidak hanya dinikmati warga Jakarta, tetapi juga penduduk Bodetabek, sejalan dengan sinergi aglomerasi Jabodetabek. Kerja sama antar pemerintah daerah di kawasan ini diperlukan untuk menyeimbangkan beban subsidi dan mendorong penggunaan transportasi umum, sekaligus menekan kemacetan dan polusi udara, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan digitalisasi ini mulai menunjukkan hasil positif. *Urban Mobility Readiness Index* menempatkan Jakarta pada peringkat ke-49 tahun 2023. Jumlah pengguna transportasi umum sepanjang tahun tersebut mencapai 591 juta, mencakup KRL, LRT, TransJakarta, dan MRT. Selain itu, penurunan emisi CO₂ juga tercatat dalam *Sustainable Mobility Index*, di mana Jakarta berada di posisi ke-58 pada tahun 2023, mencerminkan dampak positif dari penggunaan transportasi publik terhadap lingkungan.

Seperti yang disampaikan oleh Vint Cerf, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Digitalisasi transportasi di Jakarta telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi katalisator untuk perubahan positif. Keberhasilan ini tidak hanya tentang angka dan sistem, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari warga Jakarta dan sekitarnya yang semakin mudah, nyaman, dan berkelanjutan.

Jakarta

Urban Mobility Readiness Index	Sustainable Mobility	Public Transit
49 _{/65}	58 _{/65}	37 _{/65}
Population (million)		22,5
Population density (people per km ²)		6,346
CDP per capita (US\$)		22,520
Surface area (km ²)		3,546

Sumber: OliverWyman, 2023

Gambar IV.8.6 *Urban Mobility Readiness Index* Jakarta



Epilog

Daerah Khusus Jakarta Menuju Kota Global

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang mengatur perpindahan pusat pemerintahan ke Nusantara, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menetapkan peran baru Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, Jakarta diarahkan untuk menjadi Jakarta Kota Global di masa depan. Berdasarkan Global City Index (GCI) A.T Kearney, terdapat lima dimensi utama yang menjadi parameter kota global yaitu: 1) *Business Activity*; 2) *Human Capital*; 3) *Information Exchange*; 4) *Cultural Experience*; dan 5) *Political Engagement*.

Dalam dua dekade ke depan, Jakarta memiliki target untuk masuk ke dalam peringkat 20 besar dalam Global City Index (GCI) dengan fokus pada perwujudan sebagai pusat ekonomi Asia Tenggara, dengan pendapatan per kapita yang diproyeksikan mencapai USD 86.000.

Namun, tentu tak mudah untuk mencapainya. Banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama dalam mencapai visi tersebut adalah aspek sumber daya manusia atau *human capital*. Pada 2023, peringkat Jakarta dalam *Global City Index* (GCI) mengalami penurunan dari posisi 54 pada 2015 menjadi 74 pada 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi *human capital*, di mana kota ini memiliki skor rendah pada indikator pendidikan, daya saing tenaga kerja, dan keterhubungan global, serta kurang optimalnya infrastruktur teknologi informasi dan pertukaran budaya.

Angka ini lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di kawasan Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur (72), Bangkok (45), Singapura (7), dan Beijing (5). Penurunan ini menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam kualitas tenaga kerja dan pendidikan di Jakarta untuk mendukung transformasi menjadi kota global.

Jakarta juga menghadapi berbagai tantangan struktural yang kompleks, termasuk keterbatasan daya dukung lahan, pasokan air bersih, kemacetan, banjir, dan ketergantungan pada pasokan pangan dari daerah lain.

Berdasarkan survei Tomtom Index 2022, Jakarta menempati peringkat ke-29 dari 390 kota termacet di dunia, dengan kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 36 triliun per

Epilog

tahun, setara dengan 1,29% PDRB DKI Jakarta. Kemacetan ini diperburuk oleh pergerakan lebih dari 1,2 juta komuter yang masuk ke Jakarta setiap hari.

Selain itu, banjir yang terjadi secara berkala turut mengganggu distribusi logistik, meningkatkan inflasi harga pangan, dan memperburuk ketahanan pangan kota. Ketergantungan Jakarta terhadap pasokan dari wilayah sentra menambah risiko ini, terutama dalam menghadapi gangguan rantai pasok.

Perpindahan ibukota ke Ibukota Nusantara (IKN) diperkirakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Jakarta. Dari sisi pengeluaran, perpindahan ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Mengingat konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah memiliki porsi besar dalam PDRB Jakarta (masing-masing sebesar 58% dan 12%), dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kota ini tidak dapat diabaikan. Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya juga diperkirakan akan mengurangi kontribusi sektor perdagangan dan akomodasi makan-minum.

Sementara itu, juga muncul tantangan yang bersifat siklikal yang utamanya bersumber dari kondisi global yaitu perlambatan ekonomi global yang terutama bersumber dari melambatnya ekonomi negara maju dan masih tertahannya ekonomi Tiongkok, perluasan ketegangan geopolitik antara lain berlanjutnya perang Rusia-Ukraina.

Modal Penting Jakarta

Di sisi lain, Jakarta memiliki beberapa modal penting yang dapat dioptimalkan untuk menjadi Kota Global. Berdasarkan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jakarta akan menjadi daerah khusus yang semakin terintegrasi dengan wilayah sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Bodetabekjur) sebagai satu kawasan aglomerasi. Integrasi ini diharapkan dapat mendorong mobilitas regional yang lebih efisien, mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah, dan menciptakan peluang investasi yang lebih besar dalam berbagai sektor, seperti transportasi, perdagangan, dan infrastruktur.

Dibandingkan dengan kota-kota besar lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, Jakarta juga memiliki potensi unik dalam hal populasi produktif dan infrastruktur transportasi modern. Misalnya, meskipun Singapura unggul dalam daya saing

Epilog

teknologi, Jakarta menawarkan peluang pasar yang jauh lebih besar dengan populasi yang lebih tinggi dan daya beli yang terus meningkat.

Jakarta juga berkontribusi sekitar 17% terhadap perekonomian nasional dan sekitar 6% dari total PDB ASEAN pada 2023. Dengan pendapatan per kapita sebesar USD 21.000, Jakarta telah masuk kategori pendapatan tinggi. Kota ini pun memiliki populasi yang dinamis dan produktif, dengan 73% penduduk berada pada usia produktif. Infrastruktur modern seperti MRT, LRT, dan pelabuhan Tanjung Priok semakin memperkuat posisi Jakarta.

Tingkat penetrasi internet yang mencapai 87% dan cakupan jaringan 5G sebesar 22% juga menjadi keunggulan tersendiri. Selain itu, sektor-sektor potensial seperti pariwisata, industri kreatif, transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Strategi dan Pengembangan Sektor Potensial

Modal-modal yang dimiliki Jakarta tersebut dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan daya saing Jakarta sebagai Kota Global. Untuk mencapai visi sebagai kota global yang maju dan berdaya saing, Jakarta perlu fokus pada tiga pilar utama: optimalisasi sektor ekonomi eksisting, pengembangan sektor ekonomi potensial, dan sinergi aglomerasi dengan daerah sekitar.

Jakarta perlu mempercepat adopsi teknologi digital di seluruh sektor, termasuk transportasi, layanan publik, dan ekonomi. Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan antara lain penerapan aplikasi JakLingko untuk integrasi sistem pembayaran transportasi publik, digitalisasi layanan perizinan melalui platform Jakarta Smart City, dan rencana pengembangan *big data* untuk manajemen kota secara efisien. Pengembangan *smart city* yang berbasis data *real-time* dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi kemacetan, dan mengoptimalkan sumber daya kota. Teknologi digital juga harus dimanfaatkan untuk mendorong inklusi ekonomi dan memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM untuk bersaing di pasar global.

Jakarta juga perlu menjadi pelopor dalam inisiatif keberlanjutan di Indonesia. Program seperti penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi di gedung-gedung, dan pengelolaan

Epilog

sampah berbasis sirkular harus menjadi prioritas. Dengan memimpin upaya mitigasi perubahan iklim, Jakarta tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup warganya, tetapi juga menarik perhatian dunia sebagai kota yang bertanggung jawab secara lingkungan. Penanaman pohon, pembangunan ruang terbuka hijau, dan konservasi air adalah bagian dari upaya tersebut.

Pengembangan sektor-sektor potensial seperti perdagangan, transportasi, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, serta pariwisata dan industri kreatif mutlak harus dilakukan. Dukungan investasi, integrasi teknologi digital, serta kolaborasi antarwilayah menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ini.

Sektor perdagangan, yang berkontribusi 17,67% terhadap PDRB Jakarta, menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 5-6% per tahun, didukung oleh perdagangan online melalui *e-commerce*. Tren terbaru menunjukkan peningkatan signifikan pada transaksi *e-commerce* di Jakarta, dengan nilai transaksi mencapai Rp 390 triliun pada 2023, naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak hanya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tetapi juga membuka peluang besar untuk penciptaan lapangan kerja baru di bidang teknologi dan logistik. Selain itu, inovasi teknologi yang berkembang melalui *e-commerce* semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang terhubung secara digital.

Sektor transportasi dan pergudangan juga memiliki potensi besar, terutama karena posisi Jakarta sebagai gerbang logistik utama Indonesia. Sebagai contoh, peningkatan infrastruktur transportasi seperti MRT dan LRT dapat meningkatkan efisiensi logistik.

Sementara itu, sektor jasa keuangan memiliki peluang untuk menjadi pusat keuangan internasional meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sektor informasi dan komunikasi, yang mencatatkan pertumbuhan 7,45% pada 2023, juga semakin berkembang dengan dukungan investasi tinggi di bidang telekomunikasi.

Pariwisata dan industri kreatif menjadi alternatif sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan hampir 50% kontribusi terhadap ekspor Jakarta, sektor ini memiliki potensi besar,

Epilog

terutama pada subsektor MICE . Industri kreatif seperti musik, film, dan fashion juga dapat menjadi penggerak ekonomi baru, didukung oleh promosi internasional yang lebih kuat.

Untuk mengoptimalkan strategi yang ada, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Program-program pelatihan berbasis teknologi, kerja sama dengan lembaga pendidikan internasional, dan pengembangan keterampilan wirausaha merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Jakarta. Investasi dalam pendidikan vokasi yang berfokus pada sektor prioritas seperti industri kreatif, teknologi informasi, dan jasa kesehatan juga dapat memperkuat kemampuan SDM lokal untuk bersaing di pasar global.

Di sisi lain, transformasi Jakarta menjadi Daerah Khusus juga menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola baru. Jakarta perlu merancang model pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, mengingat kompleksitas fungsi-fungsi yang harus dijalankan, baik sebagai pusat perekonomian nasional maupun kota global yang kompetitif.

Dengan pendekatan ini, Jakarta diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada sekaligus menjadi kota global yang berdaya saing tinggi di masa depan. Dengan visi yang terarah dan strategi yang matang, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi, ekonomi, dan budaya yang tidak hanya berpengaruh di tingkat regional tetapi juga global.



Testimoni

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC, Akademisi

“Buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang perjalanan ekonomi Jakarta, terutama dalam mengintegrasikan keberlanjutan dengan pembangunan ekonomi. Sebagai kota metropolitan, pendekatan berbasis transformasi sektor-sektor strategis, termasuk inovasi dalam ekonomi hijau dan digital, adalah langkah nyata untuk memperkuat daya saing. Saya yakin, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, tetapi juga bagi akademisi dan praktisi yang berkomitmen pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.”

Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M. Sc, Akademisi, Birokrat

„Buku ini menggambarkan fenomena yang menarik bagaimana sinergi kebijakan serta pengelolaan sumber daya inovatif dapat membawa dampak besar. Ketersediaan infrastruktur kehidupan di Jakarta dibantu oleh perspektif penyusunan kebijakan yang inovatif dan transformatif telah membantu pemulihan Jakarta pasca periode pandemi. Dengan Jakarta adalah salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional, buku ini menjadi referensi penting bagi penyusun kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang inklusif, berkelanjutan serta membawa manfaat bagi masyarakat“

Prof. Dr. Ir Heri Hermansyah, Akademisi

“Buku ini secara cerdas memaparkan bagaimana dinamika ekonomi Jakarta bergerak dari krisis menuju pemulihan dan transformasi. Analisis mendalam pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, industri kreatif, dan digitalisasi memberikan wawasan berharga bagi pengembangan ekonomi kota di era global. Buku ini layak menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan para pengambil keputusan yang ingin memahami tantangan dan peluang dalam membangun kota berkelas dunia.“

Inarno Djajadi, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta, Birokrat

“Perjalanan ekonomi Jakarta yang didokumentasikan dalam buku ini menunjukkan bagaimana transformasi ekonomi yang inovatif dapat mengatasi tantangan global dan lokal. Penguatan sektor keuangan dan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Buku ini memberikan gambaran yang jelas tentang sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebuah kontribusi yang sangat berharga bagi literatur ekonomi dan pembangunan.“



Transformasi Ekonomi Jakarta untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Jakarta memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan kontribusi sekitar 17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan sekitar 6% terhadap total PDB ASEAN, Jakarta harus mampu merespons berbagai dinamika ekonomi, baik yang bersumber dari global maupun domestik.

Buku ini memaparkan bagaimana kebijakan dan sinergi berbagai pemangku kepentingan—termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat—berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pemulihan. Melalui kajian empiris dan analisis kebijakan, buku ini mengeksplorasi isu-isu strategis terkait transformasi ekonomi Jakarta termasuk strategi dalam mewujudkan Jakarta kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi Jakarta pascapandemi di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang didukung sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dari berbagai pemangku kebijakan merupakan sebuah *institutional memory* dan *tacit knowledge* yang sangat berharga. Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami karakteristik ekonomi Jakarta, menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi Jakarta, dan menjadi bagian dalam pengembangan keilmuan ekonomi regional, ekonomi kewilayahan, dan ekonomi perkotaan di era digitalisasi dan globalisasi.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42
Jakarta Pusat - 10410

